



UNIVERSITAS INDONESIA

Strategi Kebijakan Pengarusutamaan Pemuda

Tesis

Siti Wahyudini

0906596481

**Program Pascasarjana Universitas Indonesia
Program Studi Kajian Ketahanan Nasional
Peminatan Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan
Jakarta
Juni 2011**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Siti Wahyudini

NPM : 0906596481

Tanda tangan :

Tanggal : 30 Juni 2011



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Siti Wahyudini
NPM : 0906596481
Program Studi : Kajian Stratejik Pengembangan Kepemimpinan
Judul Tesis : Strategi Kebijakan Pengarusutamaan Pemuda

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Kajian Stratejik Pengembangan Kepemimpinan Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M.

Ketua Sidang : Dr. Amy Yayuk Sri Rahayu, M.Si.

Penguji : Drs. Zubakhrum Tjenreng, M.Si.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 30 Juni 2011

KATA PENGANTAR

Segala puji saya panjatkan kepada Allah Swt, atas berkah dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan amanah studi dan penyusunan Tesis pada Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung selama masa pendidikan dan penyusunan Tesis ini, yaitu:

1. Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga yang telah memberikan beasiswa pendidikan S-2 selama 4 semester kepada saya pada Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. Chandra Wijaya, M.Si., M.M., sebagai Pembimbing Tesis, yang telah mencurahkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing saya dalam penyusunan Tesis ini.
3. Ibu Dr. Amy Y. S. Rahayu, M.Si., sebagai Ketua Sidang Tesis dan Bapak Drs. Zubakhrum Tjenreng, M.Si. sebagai Penguji Tesis, yang telah memberikan banyak masukan berharga kepada Tesis saya.
4. Ibu Dra. Adiati Noerdin, M.A. Staf Ahli Pengarusutamaan Pemuda dan Olahraga, Kemenpora RI, atas sumbang saran selama penyusunan Tesis ini.
5. Seluruh informan/narasumber yang telah memberikan informasi, pengetahuan, dan wawasan kepada saya sehubungan dengan penyelesaian Tesis ini, yaitu:
 - a. Bapak A.Agus Ridallah, Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor.
 - b. Bapak A.Hanif Saha Ghafur, Pengamat Pendidikan Nasional, Staf Khusus Mendiknas RI
 - c. Bapak Amin Hudoyo, Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta.
 - d. Bapak Dadang Rizki Ratman, Direktur Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI /Bappenas.
 - e. Bapak Guntur Pawoko, Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.
 - f. Ibu Hermin Narwati, Asisten Deputi Bidang Tenaga Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.

- g. Bapak Lalu Wildan, Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.
 - h. Ibu Nila F. Moeloek, Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs.
 - i. Bapak Nurhasan Zaidi, Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI.
 - j. Bapak Pribudiarta Nur Sitepu, Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI.
 - k. Bapak Sanusi, Kepala Bagian Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI.
 - l. Bapak Suarmansyah, Asisten Deputi Bidang Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI.
 - m. Bapak Syah Djohan, Kepala Seksi Karang Taruna, Kementerian Sosial RI.
6. Seluruh Dosen Pengajar yang telah membagikan ilmunya selama saya menempuh masa studi pada Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Program Pascasarjana Universitas Indonesia.
 7. Keluarga Besar Koalisi Bogor Sehat yang telah merekomendasikan saya dan teman-teman Forum Kabupaten Siaga.
 8. Suami tercinta, Anggoro Santoso Edy Widayat, yang selalu memberikan dorongan dan motivasi tak terhingga agar saya meningkatkan kapasitas diri, serta Aulia Wicaksono dan Lintang Khairani yang senantiasa menjadi penghibur dan penyemangat saya dalam menyelesaikan tugas ini.
 9. Keempat orang tua saya, di Bogor dan Jepara, serta abang, kakak, dan adik-adik yang senantiasa mendoakan kelancaran studi saya.
 10. Seluruh rekan angkatan PKN IV yang selalu memberikan motivasi, berbagi pengalaman dan berdiskusi, saling mencerahkan dan mendoakan, bertemu dengan kalian adalah anugerah yang selalu saya syukuri.
 11. Sahabat-sahabat saya, di Sekolah Alam Bogor, di majelis ilmu, alumni GMSK IPB, kalian adalah bagian dari inspirasi.

Akhir kata, semoga Allah Swt memberikan balasan terbaik atas segala usaha dan kebaikan yang telah dicurahkan oleh semua pihak. Saya menyadari masih banyak kekurangan yang ditemui dalam penyusunan Tesis ini. Namun demikian, harapan saya Tesis ini dapat dimanfaatkan oleh berbagai pihak serta berguna bagi pembangunan kepemudaan di masa depan.

Bogor, Juni 2011

Siti Wahyudini

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Wahyudini
NPM : 0906596481
Program studi : Kajian Ketahanan Nasional
Peminatan : Kajian Stratejik Pengembangan Kepemimpinan
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Strategi Kebijakan Pengarusutamaan Pemuda

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada Tanggal : 30 Juni 2011

Yang menyatakan

Siti Wahyudini

ABSTRAK

Nama : Siti Wahyudini
NPM : 0906596481
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Peminatan : Kajian Stratejik Pengembangan Kepemimpinan
Judul Tesis : Strategi Kebijakan Pengarusutamaan Pemuda

Penelitian ini fokus pada perumusan konsep pengarusutamaan pemuda sebagai sebuah kebijakan yang sedang dirancang oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan bagaimana strategi kebijakan pengarusutamaan pemuda tersebut sebagai bagian dari pembangunan kepemudaan. Dari analisis yang telah dilakukan disimpulkan bahwa (1) Konsep pengarusutamaan pemuda adalah “suatu strategi yang mengikat setiap pihak untuk berkomitmen dalam memprioritaskan pembangunan kepemudaan dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada monitoring dan evaluasi, yang dilakukan secara koordinatif, sinergi, dan harmonis”; dan (2) Strategi kebijakan yang diusulkan adalah perlunya perumusan kebijakan yang lebih implementatif untuk mengikat pihak-pihak yang berkepentingan agar mau menerapkan konsep dan kebijakan pengarusutamaan pemuda dalam proses pembangunan. Kebijakan ini diharapkan berbentuk Peraturan Pemerintah, yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 40 tahun 2009. Agar implementasinya bisa berjalan lancar, kebijakan ini harus memperhatikan faktor-faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur dan adanya komitmen yang kuat dari pemimpin.

Kata kunci: pengarusutamaan, kebijakan, strategi, pemuda

ABSTRACT

Name : Siti Wahyudini
NPM : 0906596481
Faculty : Post-Graduate Program
Discipline : National Resilience Study
Subject of Interest : Leadership Development
Thesis Title : Policy Strategy of Youth Mainstreaming

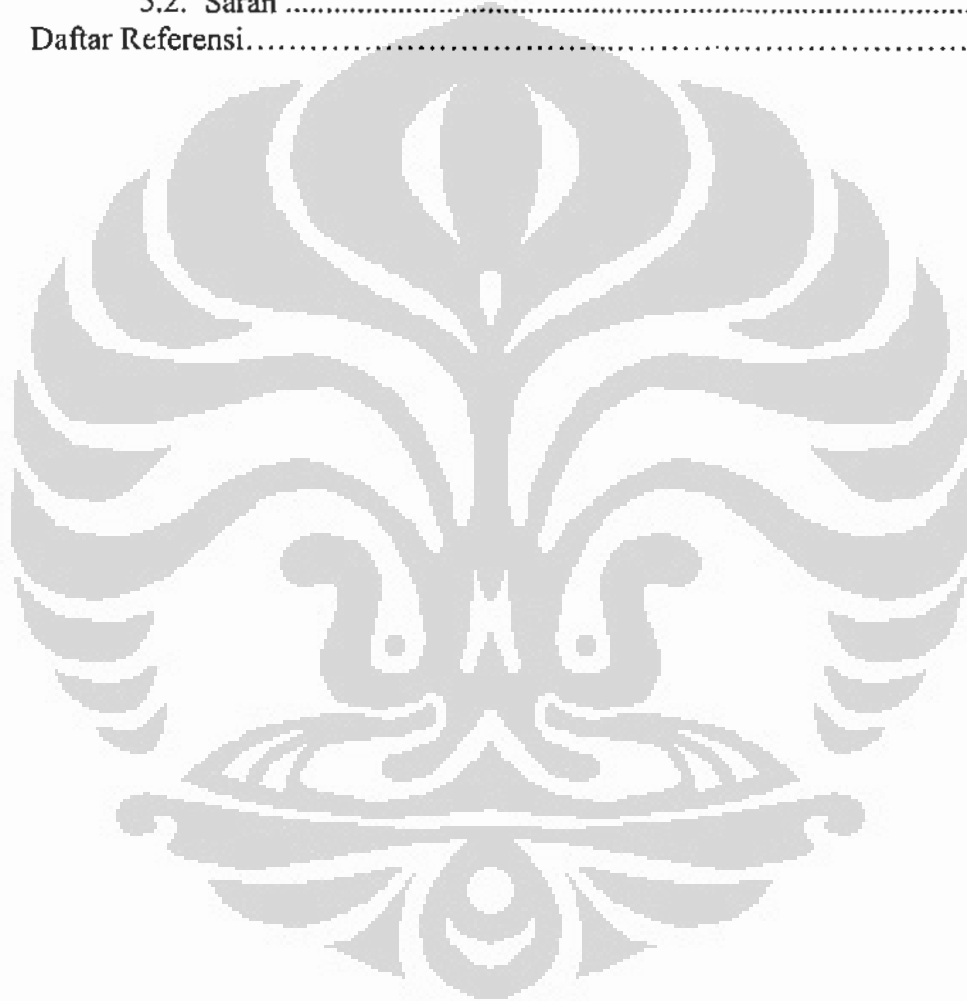
This research is focused on concept formulation of youth mainstreaming as an ongoing policy prepared by The Ministry of Youth and Sport of the Government of Indonesia, as well as developing the strategy of youth mainstreaming as part of the country youth development. The conclusions of the analysis are (i) the concept of youth mainstreaming by definition is “ a strategy that binds commitment of youth development stakeholders to make priority of youth developments issues regarding the urgency in all stage of development, beginning from planning, implementing, monitoring and evaluation, that managed in a coordinative, harmony, and synergy way. (ii) The suggested strategy of youth mainstreaming is to formulate policy to implement the Act No. 40/2009 to encourage the policy makers and actors to pay attention to and implement the mainstreamed policy in development process. In order to run successfully, this policy must consider communication, resources, disposition, structure, and strong willingness from leader.

Key words: mainstreaming, policy, strategy, youth

Daftar Isi

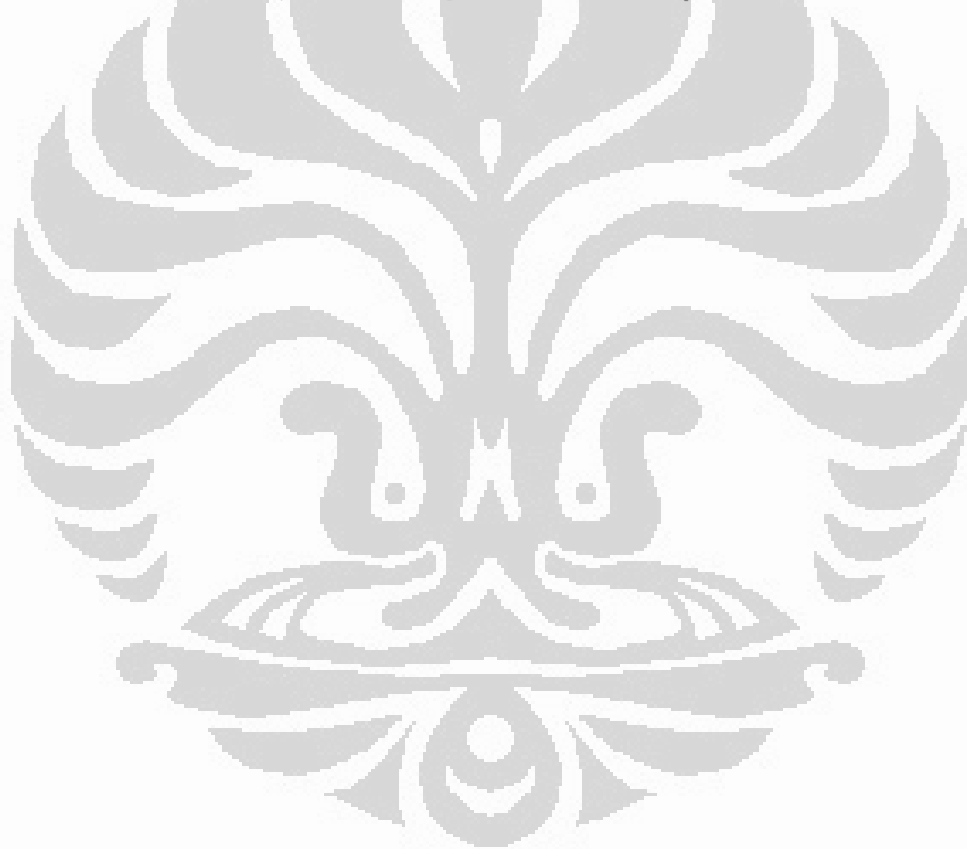
Halaman Judul	i
Lembar Pernyataan Orisinalitas	iii
Lembar Pengesahan	iv
Kata Pengantar	v
Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	vii
Abstrak	viii
Abstract	ix
Daftar Isi	x
Daftar Gambar	xii
Daftar Tabel	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Signifikansi Penelitian	7
1.5. Penelitian Sebelumnya	7
1.6. Kerangka Pikir Penelitian	9
BAB II. Tinjauan Pustaka.....	11
2.1. Definisi dan Konsep Strategi	11
2.2. Manajemen Strategis	14
2.3. Pengarusutamaan (<i>Mainstreaming</i>)	20
2.4. Perumusan Kebijakan Publik.....	23
2.5. Implementasi Kebijakan	28
BAB III. Metode Penelitian.....	31
3.1. Tipe Penelitian.....	31
3.2. Sumber Data.....	31
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.4. Teknik Analisis Data.....	34
3.5. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	36
3.6. Batasan Penelitian	36
BAB IV. Hasil dan Pembahasan	37
4.1. Daftar Informan	37
4.2. Konsep Kebijakan Pengarusutamaan Pemuda	37
4.2.1. Konteks/Lingkungan Kebijakan	38
4.2.2. Pelaku Kebijakan	41
4.2.3. Konten Kebijakan	42
4.3. Elemen Kebijakan Pengarusutamaan Pemuda	44
4.3.1. Komitmen	44
4.3.2. Sistem untuk evaluasi	47
4.3.3. Strategi untuk memaksa	48

4.4.	Syarat Implementasi Kebijakan	50
4.4.1.	Komunikasi	50
4.4.2.	Sumberdaya	51
4.4.3.	Disposisi/Sikap	52
4.4.4.	Struktur	54
4.5.	Faktor Lainnya	55
4.6.	Perumusan Strategi	57
BAB V. Kesimpulan dan Saran		61
5.1.	Kesimpulan	61
5.2.	Saran	62
Daftar Referensi.....		63



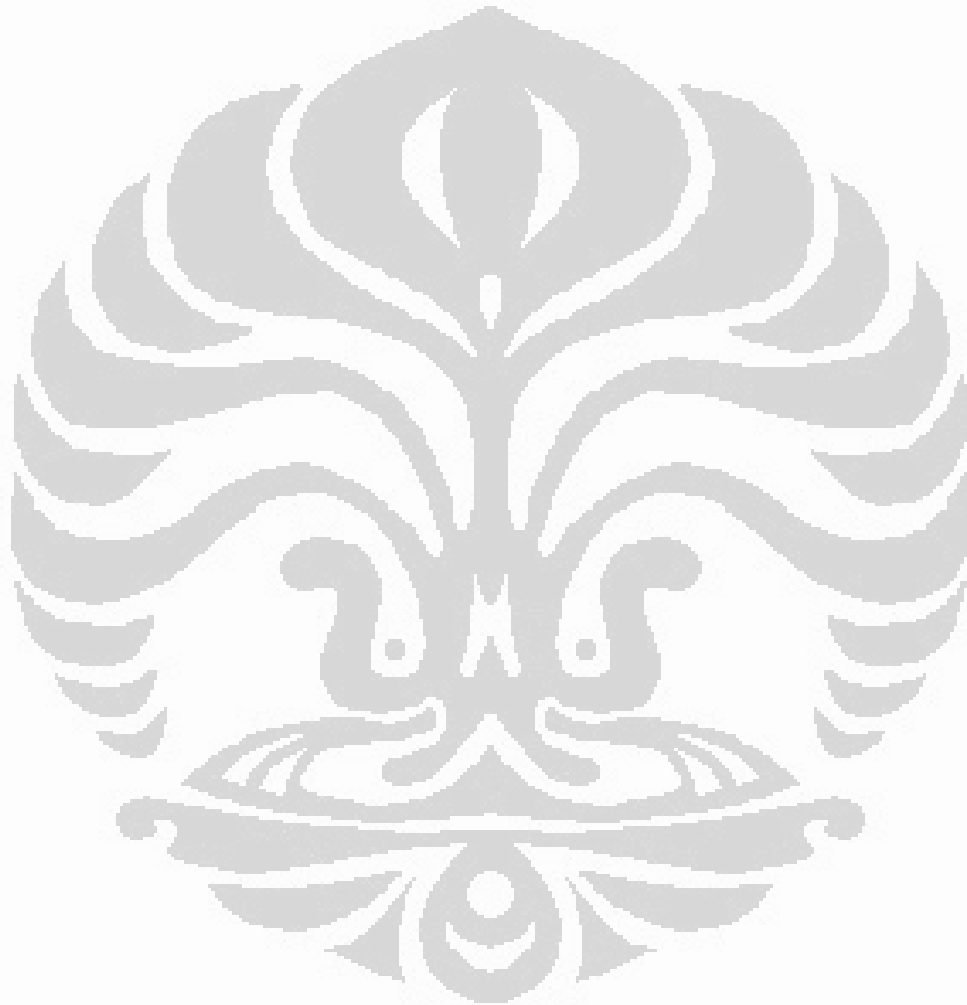
Daftar Gambar

Gambar 1. Kerangka Penelitian	9
Gambar 2. Posisi Strategi	13
Gambar 3. Model Manajemen Strategi dari Fred R. David	15
Gambar 4. Elemen-elemen Dasar dari Proses Manajemen Strategis	16
Gambar 5. Model Manajemen Strategis menurut Hunger dan Wheelen	17
Gambar 6. Elemen Sistem Kebijakan	24
Gambar 7. Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III	29
Gambar 8. Kerangka Konseptual Penelitian	32
Gambar 9. Teknik Analisis	36
Gambar 10. Manajemen Strategis Kebijakan Pengarusutamaan Pemuda	59



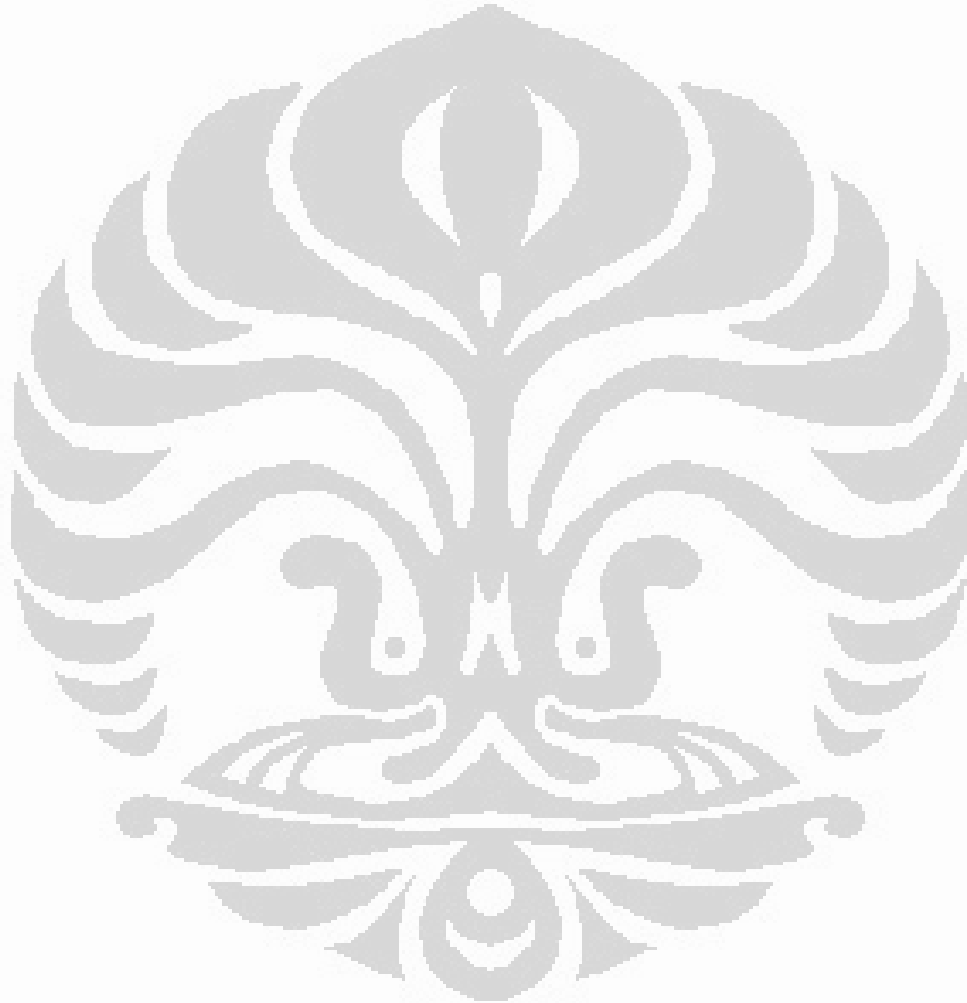
Daftar Tabel

Tabel 1. Definisi Strategi menurut Ahli	11
Tabel 2. Pembuatan Kebijakan Sebagai Suatu Proses	26
Tabel 3. Proses Kebijakan	27
Tabel 4. Daftar Informan	37



Daftar Lampiran

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	67
Lampiran 2. Hasil Coding Wawancara	70
Lampiran 3. Transkrip Wawancara	75



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemuda tak bisa dipungkiri memiliki posisi dan peran yang penting dalam pembangunan nasional. Hal ini terlihat dari jumlahnya yang cukup dominan dalam struktur kependudukan. Berdasarkan proyeksi data *single years* Badan Pusat Statistik 2009, potensi pemuda Indonesia sangat besar jika dilihat dari jumlah pemuda sebanyak 29,5 persen dari total penduduk Indonesia yang berjumlah 213,287 juta jiwa yaitu sebesar 62.985.401 jiwa. Jumlah yang besar ini akan menjadi strategis jika digerakkan menjadi motor untuk berperan aktif dalam pembangunan di segala bidang. Disamping itu pemuda merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, penanggung jawab dan pelaku pembangunan masa depan. Kekuatan bangsa di masa mendatang tercermin dari kualitas sumber daya pemuda saat ini. Masa depan bangsa ditentukan oleh kualitas pemudanya.

Pemuda adalah masa dimana manusia sedang berada di dalam puncak potensinya. Berbagai potensi yang dimiliki pemuda adalah *Pertama*, Potensi Spiritual. Pemuda sejati, ketika meyakini sesuatu, akan memberi sesuatu apapun yang dimiliki dan disanggupinya secara ikhlas tanpa mengharapkan pamrih apapun. *Kedua*, Potensi Intelektual. Daya analisis yang kuat di dukung dengan spesialisasi keilmuan yang dipelajari menjadikan kekritisannya berbasis Intelektual. *Ketiga*, Potensi Emosional. Keberanian, semangat, dan kemauan keras yang dimilikinya senantiasa menggelora serta mampu menular kedalam jiwa bangsanya. *Keempat*, Potensi Fisikal. Secara fisik pemuda berada dalam puncak kekuatan.

Dalam rangka mencapai kualitas pemuda yang diharapkan menuju cita-cita pembangunan bangsa, generasi muda harus diarahkan dan disiapkan untuk berperan sebagai penggerak perubahan dan pewaris masa depan melalui pembangunan kepemudaan yang terstruktur dan menyeluruh. Pembangunan kepemudaan merupakan upaya penting dalam mendukung pencapaian pembangunan sumberdaya manusia. Pentingnya pembangunan sumberdaya

manusia seringkali terkait dengan fakta, bahwa prestasi pembangunan manusia Indonesia yang dipresentasikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) relatif masih kurang baik dibandingkan negara-negara tetangga di lingkup ASEAN. Menurut Human Development Index (HDI) 2010 yang mencatat kualitas manusia di 168 negara, Indonesia berada di peringkat 108 sementara Filipina berada di peringkat 97, Thailand di peringkat 92, Malaysia 57, dan Singapura 27. Oleh karena itu, pembangunan sumberdaya manusia menempati posisi prioritas utama dan sangat strategis dalam pembangunan nasional.

Oleh karena itu menjadi penting agar pemuda memiliki kesadaran tentang peran strategis dan tugas besar yang diembannya. Kenyataannya, kondisi pemuda saat ini tak lepas dari berbagai masalah yang merongrong yang menghambat pengembangan dirinya. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia masih sangat rendah bila dibandingkan dengan negara Asia lainnya. Pada saat sekarang APK Indonesia masih di bawah 20 %. Sementara Malaysia di atas 60%, Singapore di atas RRC diatas 50 % sementara Korea Selatan mencapai angka 90%. Dari sensus tahun 2006, diperoleh gambaran, bahwa sebagian besar pemuda Indonesia berpendidikan SMU ke bawah, bahkan ada yang tidak pernah bersekolah dan tidak sedikit pula yang putus sekolah yang disebabkan kondisi sosial ekonomi.

Rendahnya tingkat pendidikan pemuda, memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, antara lain ketidakmampuan dalam bersaing, terbatasnya peluang kerja yang menjanjikan kesejahteraan yang lebih baik. Dengan kondisi yang demikian berarti di Indonesia tenaga kerja yang tersedia adalah tenaga kerja kasar yang dari segi penghasilannya masih akan menimbulkan masalah lain. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2009, jumlah pemuda Indonesia yang kini masih menganggur mencapai 17 persen dari 70 juta jiwa, atau sekitar 12 juta pemuda. Sebagian besar dari mereka juga hidup dalam kondisi miskin dan berpendidikan rendah. Menurut Data Badan Pusat Statistik per Agustus 2010, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2010 mencapai 7,14 persen, (8,32 juta orang dengan angkatan kerja sebesar 116,53 juta jiwa). Belum lagi masalah-masalah sosial yang merupakan turunan

dari masalah-masalah di atas seperti penggunaan narkoba dan zat aditif lainnya, HIV AIDS, kematian ibu dan bayi akibat pernikahan usia muda, kriminal, tawuran, produktivitas, kreativitas, daya saing pemuda dan masih banyak lagi. Masalah yang dihadapi oleh pemuda menjadi semakin kompleks di tengah semakin berkembangnya masyarakat dunia yang serba global.

Melihat kondisi di atas, diperlukan suatu strategi yang dapat mendukung upaya pembangunan di bidang kepemudaan. Pembangunan kepemudaan mendapatkan landasan yang kuat dengan lahirnya UU Nomor 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pola dasar pembangunan nasional kepemudaan adalah:

1. Melaksanakan pengarusutamaan pemuda, sehingga pemuda menjadi bagian yang senantiasa melekat dan tak terpisahkan dalam setiap program pembangunan.
2. Menjangkau keseluruhan pemuda baik individu, kelompok maupun lembaga kepemudaan, baik yang berpotensi maupun yang bermasalah.
3. Menempatkan organisasi kepemudaan pada posisi penting dan strategis dalam melaksanakan berbagai upaya pembangunan kepemudaan dalam lingkup penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan.
4. Menempatkan pembangunan kepemudaan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat.

Melihat bahwa masalah yang dihadapi oleh pemuda ternyata saling berkaitan satu sama lain, dipandang perlu agar pembangunan kepemudaan dilakukan dengan koordinasi yang sinergis, efektif, dan berkesinambungan antar lembaga yang menangani pembangunan kepemudaan, mengingat beberapa kementerian, lembaga, dan organisasi memiliki kebijakan yang berhubungan dengan kepemudaan. Dalam hal ini pengarusutamaan pemuda diartikan sebagai strategi yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan peran pemuda dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan memperhatikan serta melibatkan pemuda ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai kehidupan dan pembangunan. Pengarusutamaan pemuda merupakan isu lintas sektor dimana semua sektor

pembangunan pusat dan daerah harus menjadi penggerak dengan memberikan perhatian dan dukungan dalam proses pembangunan pemuda. Hal ini terkait dengan perumusan strategi kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pengarusutamaan pemuda yang kondusif bagi pembangunan kepemudaan.

Sehubungan dengan pengarusutamaan sebagai sebuah strategi ataupun konsep, menurut Picciotto dari *World Bank* istilah *to mainstream* merupakan sebuah konsep yang dinamis. Pengarusutamaan mengacu pada suatu perubahan pada *status quo* yang tidak menimbulkan kekacauan. Dengan demikian konsep pengarusutamaan lebih berkonotasi pada reformasi yang terjadi secara bertahap. Pada konteks kebijakan, hal ini dicapai melalui perubahan bertahap pada tujuan program, protokol pelaksanaan, dan budaya organisasi.

Pengarusutamaan menurut Geyer (1999) melibatkan tiga elemen administratif utama, yaitu:

1. Adanya komitmen untuk membuka seluruh pintu kebijakan agar mengarah pada area kebijakan yang diarusutamakan.
2. Adanya sistem yang dapat mengevaluasi dampak dari kebijakan yang diarusutamakan.
3. Adanya strategi untuk memaksa/mendorong pelaku administratif agar memberi perhatian dan mengimplementasikan kebijakan yang diarusutamakan.

Di Indonesia, pengarusutamaan dikenal sebagai kebijakan dalam rangka memperkuat sinergi antarbidang dalam pembangunan. Pada dasarnya pembangunan di setiap bidang untuk mencapai keberhasilan tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan pembangunan di bidang lainnya. Dengan pembiayaan yang terbatas, untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan hasil yang maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan di setiap bidang sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung dan saling memperkuat. Setiap kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan pembangunan di setiap bidang harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai sinergi tersebut melalui proses komunikasi, konsultasi, koordinasi serta monitoring, dan evaluasi dengan

pemangku kepentingan terkait di pusat dan daerah dan mengedepankan keberhasilan bersama dalam pencapaian sasaran pembangunan (Bappenas 2010).

Sehubungan dengan langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam menuangkan konsep pengarusutamaan dalam sebuah strategi kebijakan, Anderson (2006) menjelaskan bahwa terdapat beberapa tahap penting dalam proses penetapan kebijakan, yaitu:

1. Penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), yaitu menentukan masalah publik yang perlu untuk dipecahkan.
2. Formulasi kebijakan (*policy formulation*), mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang mungkin digunakan dalam memecahkan masalah
3. Adopsi kebijakan (*policy adoption*), menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan para administrator dan legislative. Tahap ini ditentukan setelah melalui tahap suatu proses rekomendasi.
4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*), merupakan suatu tahap dimana kebijakan yang telah diadopsi tadi dilaksanakan oleh unit-unit tertentu dengan memobilisasi dana dan sumber daya yang ada
5. Penilaian kebijakan (*policy assessment*), berbagai unit yang telah ditentukan melakukan penilaian tentang apakah semua proses implementasi telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan atau tidak.

Sementara untuk merumuskan suatu strategi, diperlukan langkah-langkah manajemen strategi. Perumusan strategi menurut Hunger dan Wheelen (1996) meliputi: menentukan misi perusahaan, menentukan tujuan yang dapat dicapai, pengembangan strategi dan penetapan pedoman kebijakan. Sejalan dengan itu yang juga perlu dilakukan adalah pengamatan lingkungan, baik internal maupun eksternal. Pengamatan lingkungan eksternal adalah untuk melihat kesempatan dan ancaman dan pengamatan lingkungan internal adalah untuk melihat kekuatan dan kelemahan. Dengan mengetahui lingkungan maka kejutan strategis akan dapat dihindari. Telah terbukti adanya hubungan yang positif antara pengamatan lingkungan dengan laba yang diperoleh perusahaan.

1.2. Pokok Permasalahan

Kebijakan pengarusutamaan pemuda merupakan strategi kebijakan yang baru digulirkan oleh Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga sejak Kabinet Indonesia Bersatu II. Kebijakan ini ditujukan dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya pemuda Indonesia melalui pembangunan kepemudaan dan sumberdaya manusia. Pengarusutamaan pemuda menuntut koordinasi yang sinergis, efektif, dan berkesinambungan antar lembaga dalam menangani pembangunan kepemudaan, mengingat kementerian, lembaga, dan organisasi memiliki kebijakan/program yang menangani pemuda.

Sampai saat ini yang masih dilakukan adalah tahap sosialisasi, terutama diawali di lingkungan internal Kementerian Pemuda dan Olahraga. Sosialisasi juga masih dilakukan kepada *stakeholder* terkait yang memiliki kepentingan dan program-program yang berkaitan dengan pembangunan kepemudaan.

Permasalahan yang ditemukan adalah belum dirumuskannya langkah-langkah strategis untuk mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan pemuda ini. Langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara sistematis agar dapat merangkul dukungan *stakeholder* serta mengikat berbagai sektor terkait untuk mau melaksanakannya. Di samping itu pengarusutamaan pemuda sendiri belum menjadi sebuah konsep yang matang untuk siap digulirkan serta disosialisasikan kepada berbagai pihak. Untuk itu diperlukan konsep dan strategi yang jelas agar pengarusutamaan pemuda tidak hanya sekedar menjadi jargon ataupun kebijakan di atas kertas serta dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak.

Dengan demikian pertanyaan penelitian yang berhasil dirumuskan adalah:

1. Bagaimana konsep pengarusutamaan pemuda yang seharusnya?
2. Bagaimana strategi kebijakan pengarusutamaan pemuda sebagai bagian dari pembangunan kepemudaan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Merumuskan konsep pengarusutamaan pemuda
2. Merancang strategi kebijakan pengarusutamaan pemuda sebagai bagian dari pembangunan kepemudaan .

1.4. Signifikansi Penelitian

Secara praktis penelitian ini berguna bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai masukan dalam merumuskan strategi pengarusutamaan pemuda sehubungan dengan implementasi kebijakan pengarusutamaan pemuda.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan khazanah baru bagi penelitian kebijakan yang berkaitan dengan kepemudaan.

1.5. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang pernah dilakukan yang berhubungan dengan topik kepemudaan dan perumusan strategi adalah:

1. Juni Supriyanto. 2009. Analisis Pembangunan Pemuda Indonesia (Studi Indikator Pembangunan Pemuda Indonesia). Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Program Studi kajian Ketahanan Nasional, Peminatan Kajian Stratejik Pengembangan Kepemimpinan.

Dalam penelitian ini ditemukan ada dua kelompok besar permasalahan pemuda, yaitu masalah yang bersifat sistemik dimana pemuda tak dapat menghindarinya, yang disebabkan faktor eksternal. Yang kedua adalah masalah karakter pemuda yang disebabkan faktor internal dari dalam diri pemuda. Penelitian ini juga menghasilkan domain/area dan indikator untuk pengukuran pembangunan pemuda Indonesia. Rekomendasinya adalah agar Kemenpora memperhatikan masalah prioritas pemuda yaitu masalah sistemik dan masalah karakter pemuda. Selain itu agar dilakukan penelitian lanjutan yang bersifat kuantitatif untuk mengukur indeks pembangunan pemuda Indonesia berdasarkan pada domain dan prioritas hasil penelitian tersebut.

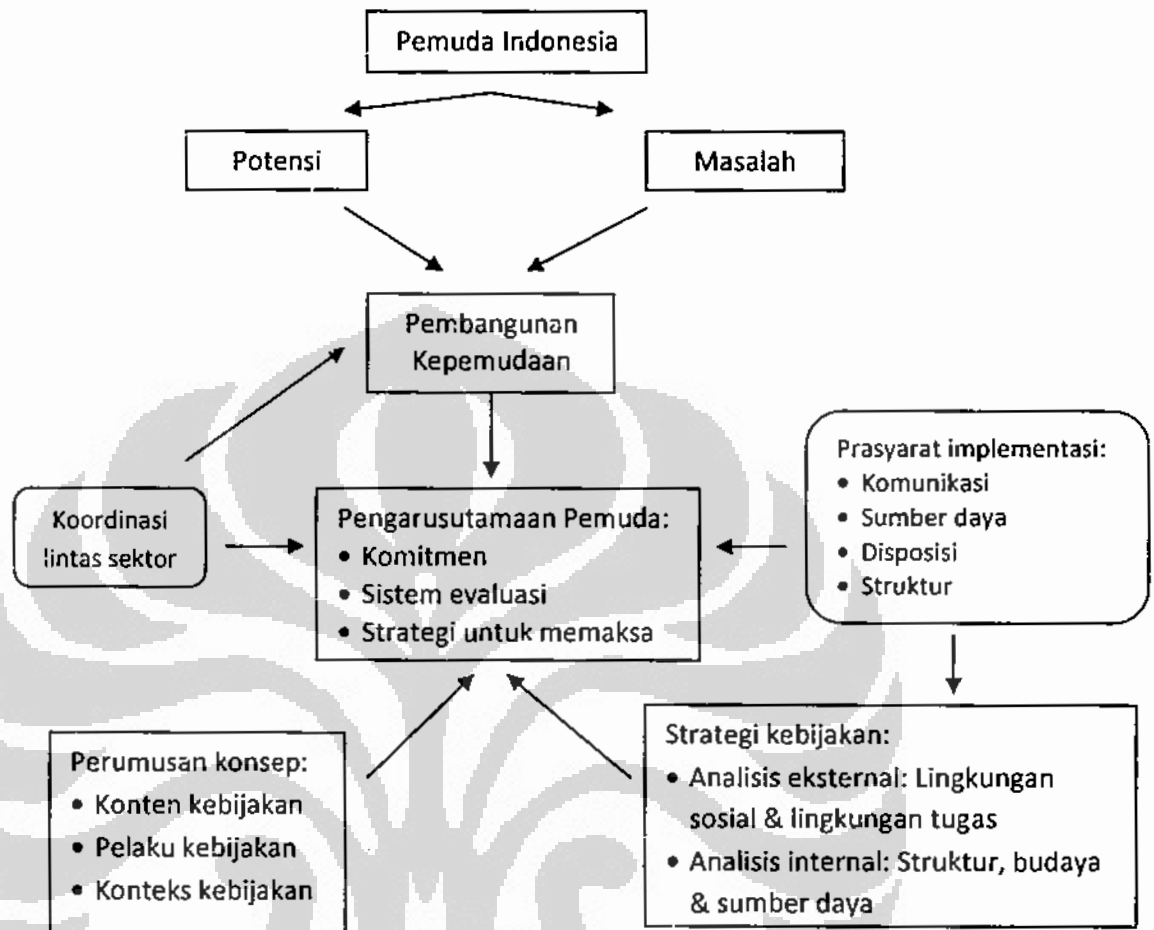
2. Buang Sabdo Waryoko. 2009. Strategi Pemberdayaan Pemuda Indonesia (Studi Kasus Pemuda di Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Propinsi DKI Jakarta). Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Program Studi kajian Ketahanan Nasional, Peminatan Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan.

Dalam menjalankan strategi pemberdayaan pemuda, OKP di DKI Jakarta perlu melakukan tiga langkah, yaitu: proses penyadaran, proses pengkapasitasan dan proses pemberdayaan. Dari penelitian ini, proses pemberdayaan terhadap pemuda sudah berjalan namun dirasakan kurang optimal. Strategi ke depan yang dilakukan untuk proses pemberdayaan pemuda: menjalin kerjasama dengan instansi secara lebih massif. Untuk itu diperlukan komunikasi yang baik antara pemerintah dengan pihak OKP, senantiasa menyebarkan nilai-nilai OKP ke semua pengurus dan anggota organisasi, memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan pemuda dan masyarakat.

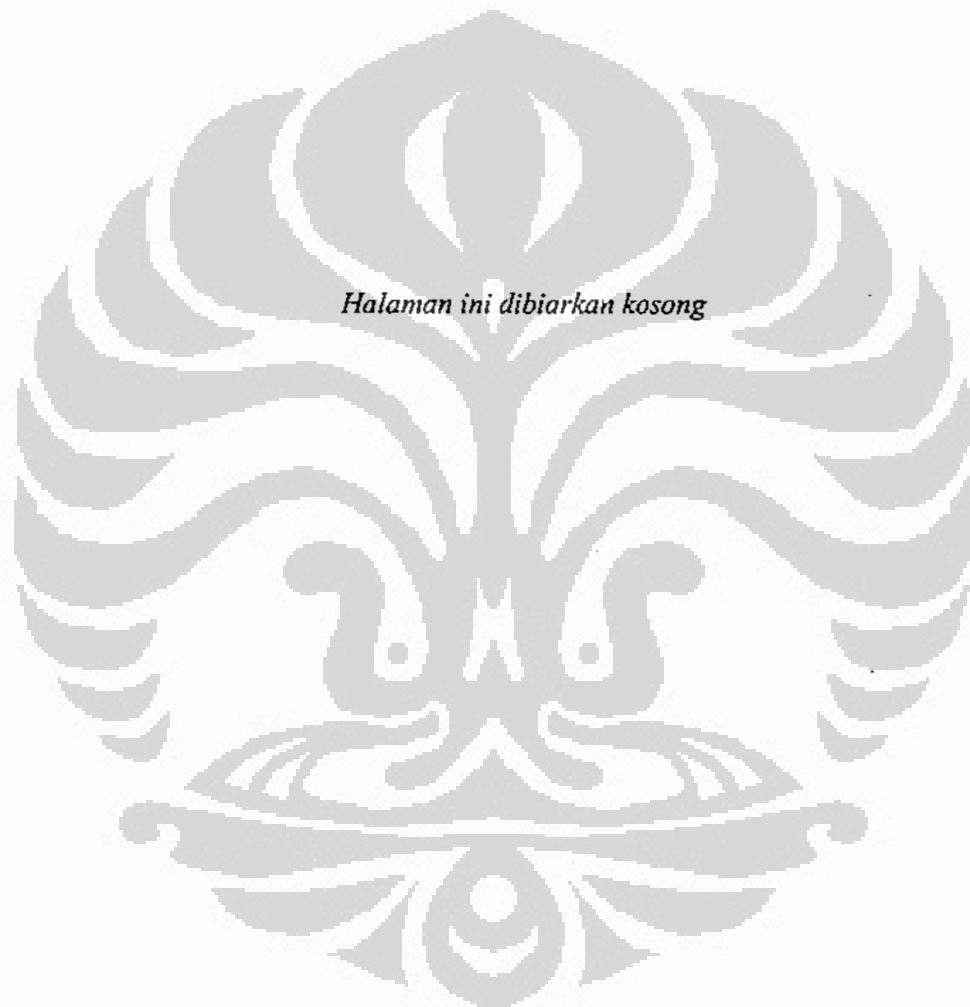
3. Budiyanto. 2009. Pengembangan Strategi Pemberdayaan Kader Kewirausahaan Pemuda pada Kementerian XYZ. Tesis Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Program Studi kajian Ketahanan Nasional, Peminatan Kajian Strategik Pengembangan Kepemimpinan.

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa program-program pemberdayaan kader kewirausahaan secara kuantitas dan kualitas belum efektif karena kader-kader yang dihasilkan belum memiliki karakter yang kokoh sebagai wirausaha. Sementara itu, strategi kemitraan oleh Kementerian XYZ dalam pemberdayaan kader kewirausahaan merupakan strategi yang tepat dalam rangka mengatasi kelemahan dan menangkap peluang yang ada, namun strategi tersebut belum sepenuhnya berhasil. Hal ini mengingat belum strategi ini belum bersifat kontinu sehingga tidak menyentuh makna dari pemberdayaan itu sendiri.

1.6. Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1. Kerangka Penelitian



BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi dan Konsep Strategi

Secara umum, konsep strategi memiliki sejarah yang cukup panjang, berawal dari istilah di bidang militer. Secara etimologi, kata 'strategi' berawal dari bahasa Yunani "strategos" yang artinya 'apa yang dilakukan sang jenderal'. Seiring dengan perkembangan dunia bisnis, konsep strategi berkembang mengikuti teori-teori bisnis. Beberapa definisi strategi yang diusung oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Definisi Strategi menurut Ahli

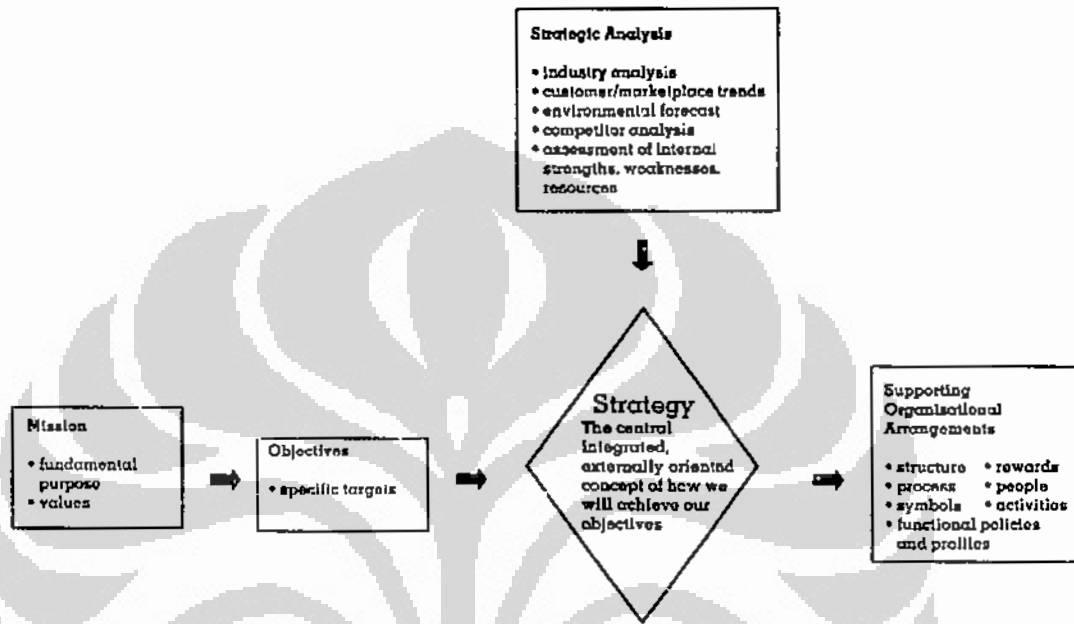
Sumber	Definisi Strategi
Chandler (1962)	Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya.
Learned, Christensen, Andrews, dan Guth (1965)	Strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu fokus strategi adalah memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak ada.
Argyris (1985), Mintzberg (1979), Steiner dan Miner (1977)	Strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi
Porter (1985)	Strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing
Andrews (1980), Chaffe (1985)	Strategi adalah kekuatan motivasi untuk stakeholders, debtholders, manajer, karyawan, konsumen, komunitas, pemerintah, dan sebagainya, yang baik secara langsung maupun tidak langsung menerima keuntungan atau biaya yang ditimbulkan oleh semua tindakan yang dilakukan oleh perusahaan
Hamel dan Prahalad (1995)	Strategi merupakan tindakan yang bersifat <i>incremental</i> (senantiasa meningkat) dan terus menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang

Sumber	Definisi Strategi
	tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.
James Quinn (1998)	Strategi merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama organisasi, kebijakan dan urutan tindakan menjadi kesatuan yang kohesif.
Kenneth Andrews (1998)	Strategi korporasi adalah pola keputusan dalam sebuah perusahaan yang menentukan dan mengungkapkan tujuan dan maksud, menghasilkan kebijakan pokok dan rencana untuk mencapai tujuan tersebut dan mendefinisikan jangkauan dari bisnis perusahaan, jenis kontribusi ekonomi dan manusia diniatkan bagi karyawan, pemegang saham, pelanggan dan masyarakat.

Hax dan Majluf (1996) mengatakan bahwa strategi adalah sejenis makhluk yang memiliki multi dimensi. Mereka menyatakan ada sembilan dimensi strategi:

1. Menyatakan dan menetapkan maksud organisasi sehubungan dengan tujuan jangka panjang, program aksi dan prioritas alokasi sumberdaya;
2. Memilih jenis bisnis organisasi;
3. Mencapai keuntungan jangka panjang dalam setiap bisnisnya dengan merespon kesempatan dan ancaman pada lingkungan serta kekuatan dan kelemahan organisasi;
4. Mengidentifikasi tugas-tugas manajerial pada tingkat korporasi, bisnis dan fungsional;
5. Merupakan keputusan-keputusan yang koheren, bersatu dan integrative;
6. Menerangkan kontribusi ekonomi dan non ekonomi yang akan dicapainya kepada pemegang saham;
7. Merupakan suatu bentuk tujuan stratejik dari organisasi;
8. Bertujuan mengembangkan kompetensi utama dari perusahaan;
9. Ditujukan untuk menginvestasikan sumberdaya yang terlihat maupun tidak dalam rangka mengembangkan kapabilitas yang bias menjamin keuntungan kompetitif yang berkesinambungan.

Hambrick dan Fredrickson (2005) mengungkapkan bahwa, penting untuk menempatkan strategi pada posisi yang tepat. Dalam hal ini visi dan misi suatu perusahaan bukanlah strategi perusahaan itu sendiri, namun visi dan misi memandu bagaimana merumuskan strategi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2. Posisi Strategi
(Sumber: Hambrick & Fredrickson, 2005)

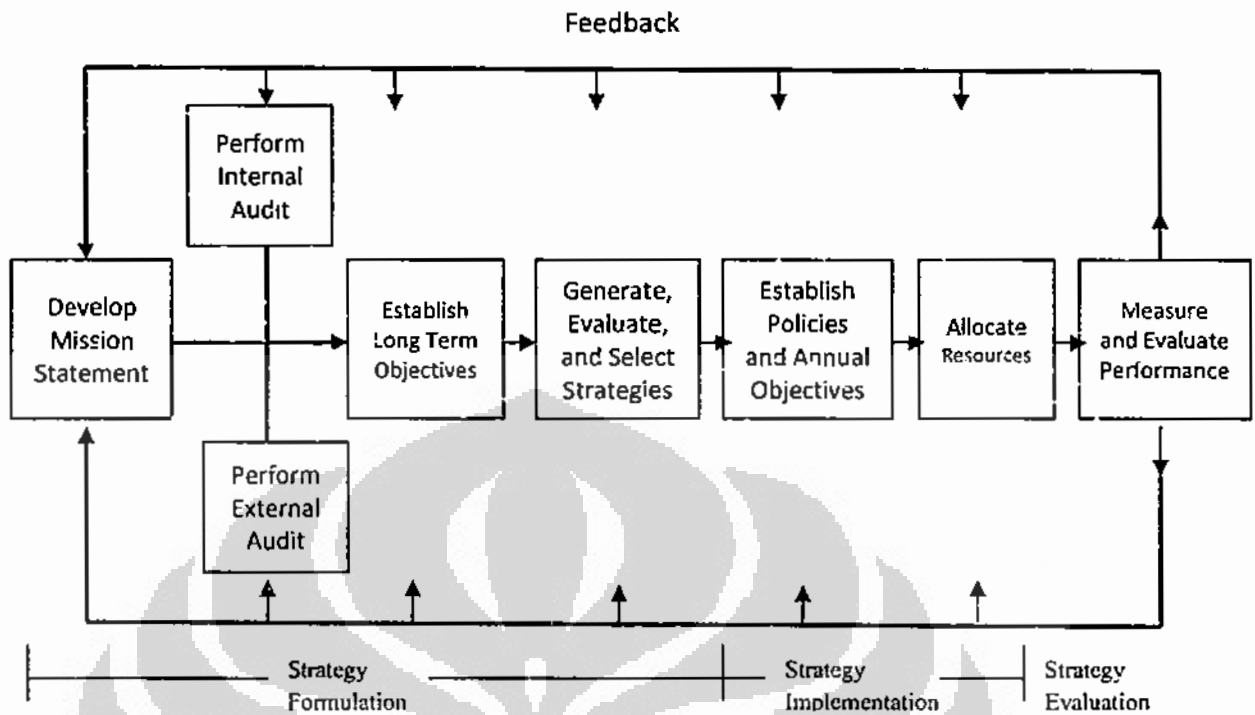
Gambar di atas tidak bermaksud menyederhanakan proses perumusan strategi, namun yang menjadi lebih penting adalah bagaimana memperkuat elemen-elemen strategi itu sendiri. Masih menurut Hambrick dan Fredrickson, sebuah strategi memiliki lima elemen yang tergambar dari lima pertanyaan berikut:

- Arena: dimana kita akan beraktivitas?
- Kendaraan: bagaimana kita bisa tiba di sana?
- Pembeda: bagaimana agar kita menang di pasar?
- Tahapan: bagaimana kecepatan dan langkah-langkah kita?
- Logika ekonomi: bagaimana kita mendapatkan keuntungan?

2.2. Manajemen Strategis

Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang (Hunger dan Wheelen, 1996). Menurut Fred R. David (2004) manajemen strategis adalah seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai objektifnya. Manajemen strategis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ilmu manajemen. Konsep ini hadir sebagai suatu solusi untuk memberdayakan keseluruhan organisasi (perusahaan) agar secara komprehensif dan sistematis mampu mewujudkan visi dan misi organisasi tersebut.

Proses manajemen strategik oleh Hitt, Ireland, dan Hoskisson (Hitt, Ireland, Hoskisson, 1995) dimengerti sebagai seperangkat komitmen, keputusan, dan tindakan yang dibutuhkan suatu perusahaan untuk mencapai persaingan strategik dan memperoleh keuntungan di atas rata-rata. Sementara Fred R. David menyatakan, manajemen strategi adalah seni dan ilmu penyusunan, penerapan dan pengevaluasian keputusan-keputusan lintas fungsi (*cross-functional*) yang memberdayakan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Oleh karenanya manajemen strategi meliputi proses penetapan visi, misi dan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran tersebut, serta mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Secara umum, model manajemen strategi dari Fred R. David dipaparkan seperti gambar berikut:



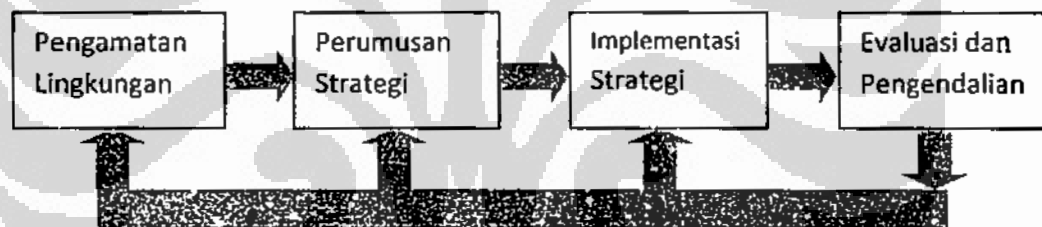
Gambar 3. Model Manajemen Strategi dari Fred R. David

Fred R. David menyatakan bahwa isu perumusan strategi termasuk memutuskan bisnis baru apa yang perlu dimasuki, bisnis apa yang harus dihentikan, bagaimana mengalokasikan sumber daya, apakah memperluas operasi atau diversifikasi, apakah akan memasuki pasar internasional, apakah akan melakukan merger atau membentuk usaha patungan, dan bagaimana menghindari pengambilalihan oleh perusahaan pesaing. Definisi misi menurut Fred R. David adalah pernyataan jangka panjang mengenai tujuan yang membedakan sebuah bisnis dari perusahaan lain yang serupa. Pernyataan misi menjawab pertanyaan apa sebenarnya bisnis kita. Pernyataan misi yang jelas menguraikan nilai-nilai dan prioritas dari suatu organisasi.

Kekuatan internal dan kelemahan internal adalah aktivitas dalam kendali organisasi yang prestasinya luar biasa baik atau buruk. Kekuatan dan kelemahan tersebut muncul dalam aktivitas manajemen, pemasaran, keuangan / akunting, produksi / operasi, penelitian dan pengembangan atau sistem informasi komputer. Selanjutnya menurut Fred R. David kekuatan internal dan kelemahan internal adalah aktivitas dalam kendali organisasi yang prestasinya luar biasa baik atau

buruk. Kekuatan dan kelemahan tersebut muncul dalam aktivitas manajemen, pemasaran, keuangan / akunting, produksi / operasi, penelitian dan pengembangan atau sistem informasi komputer. Faktor-faktor internal tersebut dapat ditentukan dengan beberapa cara termasuk menghitung rasio, mengukur prestasi dan membandingkan dengan periode sebelumnya serta rata – rata industri. Berbagai tipe survei dapat dikembangkan untuk memeriksa faktor internal seperti moral karyawan efisiensi produksi, efektivitas periklanan, dan loyalitas pelanggan. Data-data yang diperoleh secara akurat dapat memberikan informasi berbagai kondisi internal organisasi, sehingga memungkinkan adanya perbaikan yang tepat.

Proses manajemen strategis menurut Hunger dan Wheelen (1996) meliputi empat elemen dasar, yaitu (1) pengamatan lingkungan, (2) perumusan strategi, (3) implementasi strategi, dan (4) evaluasi dan pengendalian. Gambar 4 menunjukkan interaksi keempat elemen tersebut.

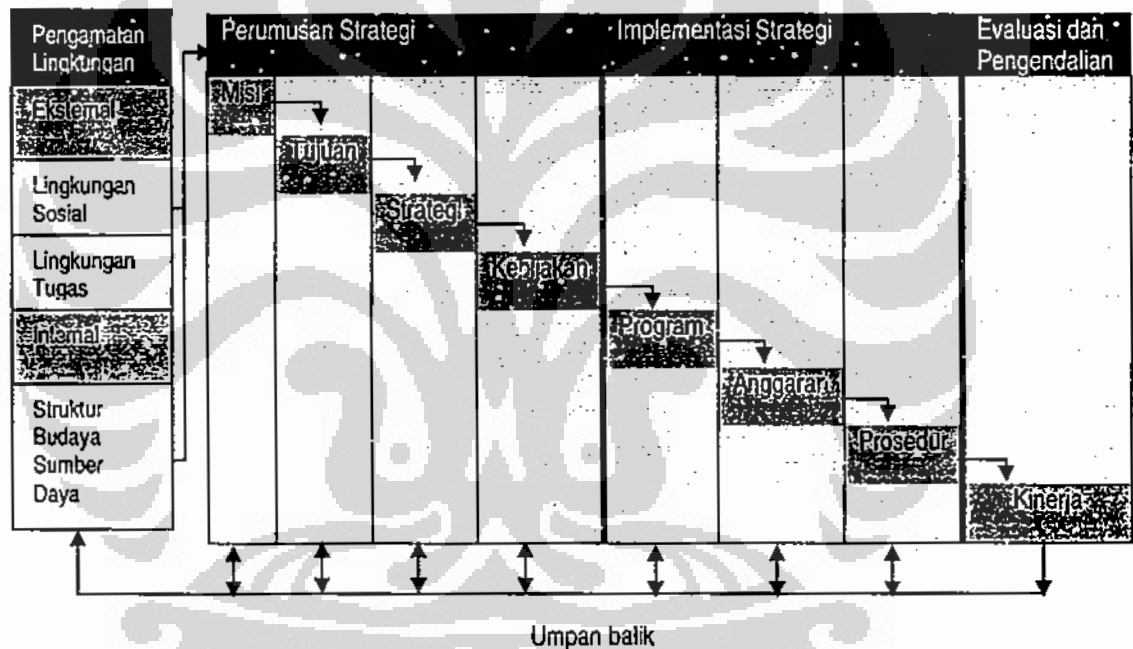


Gambar 4. Elemen-elemen Dasar dari Proses Manajemen Strategis
(Sumber: Hunger & Wheelen 1996)

Pada level korporasi, proses manajemen strategis meliputi aktivitas-aktivitas mulai dari pengamatan lingkungan sampai evaluasi kinerja. Manajemen mengamati lingkungan eksternal untuk melihat kesempatan dan ancaman. Pengamatan lingkungan internal ditujukan untuk melihat kekuatan dan kelemahan. Faktor-faktor yang paling penting untuk masa depan perusahaan disebut faktor-faktor strategis. Dan diringkas dengan singkatan SWOT, yang artinya *Strengths* (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (kesempatan) dan *Threats* (ancaman). Setelah mengidentifikasi faktor-faktor strategis, manajemen mengevaluasi interaksinya dan menentukan misi perusahaan yang sesuai. Langkah pertama dalam merumuskan strategi adalah pernyataan misi, yang

berperanan penting dalam menentukan tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Perusahaan mengimplementasi strategi dan kebijakan tersebut melalui program, anggaran dan prosedur. Akhirnya, evaluasi kinerja dan umpan balik untuk memastikan tepatnya pengendalian aktivitas perusahaan.

Model manajemen strategis yang ditunjukkan pada Gambar 5 menggambarkan proses tersebut secara berkelanjutan. Gambar ini merupakan perkembangan dari model dasar pada Gambar 4. Sebagai model normatif, model itu berusaha menunjukkan bagaimana manajemen strategis seharusnya dilakukan lebih dari sekadar menggambarkan apa yang sebenarnya dilakukan pada banyak organisasi.



Gambar 5. Model Manajemen Strategis menurut Hunger dan Wheelen (1996)

Pengamatan Lingkungan

Analisis Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari variabel-variabel (kesempatan dan ancaman) yang berada di luar organisasi dan tidak secara khusus ada dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Variabel-variabel tersebut membentuk keadaan dalam organisasi dimana organisasi ini hidup. Lingkungan eksternal memiliki dua bagian, yaitu lingkungan kerja dan lingkungan sosial. Lingkungan kerja terdiri dari elemen-elemen atau kelompok yang secara langsung

berpengaruh atau dipengaruhi oleh operasi-operasi utama organisasi, contohnya pemegang saham, pemerintah, pemasok, komunitas lokal, pesaing, pelanggan dan sebagainya. Lingkungan sosial terdiri dari kekuatan umum, yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas-aktivitas jangka pendek organisasi tetapi dapat dan sering mempengaruhi keputusan jangka panjang. Contohnya adalah kekuatan ekonomi, sosiokultural, teknologi dan politik hukum.

Analisis Internal

Lingkungan internal terdiri dari variabel-variabel (kekuatan dan kelemahan) yang ada di dalam organisasi tetapi biasanya tidak dalam pengendalian jangka pendek dari manajemen puncak. Variabel-variabel tersebut meliputi struktur, budaya dan sumberdaya organisasi. Struktur adalah cara bagaimana perusahaan diorganisasikan yang berkenaan dengan komunikasi, wewenang dan arus kerja. Budaya adalah pola keyakinan, pengharapan dan nilai-nilai yang dibagikan oleh anggota organisasi. Sumberdaya adalah asset yang merupakan bahan baku bagi produksi barang dan jasa organisasi. Aset ini meliputi keahlian orang, kemampuan dan bakat manajerial seperti asset keuangan dan fasilitas pabrik. Tujuan utama dalam manajemen strategis adalah memadukan variabel-variabel internal perusahaan untuk memberikan kompetensi unik yang membuat perusahaan mampu mencapai keunggulan kompetitif secara terus menerus sehingga menghasilkan laba.

Perumusan Strategi

Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif dari kesempatan dan ancaman lingkungan dilihat dari kekuatan dan kelemahan perusahaan. Perumusan strategi meliputi: menentukan misi perusahaan, menentukan tujuan yang dapat dicapai, pengembangan strategi dan penetapan pedoman kebijakan.

Misi

Misi organisasi adalah tujuan atau alasan mengapa organisasi hidup. Pernyataan misi yang disusun dengan baik mendefinisikan tujuan mendasar dan unik yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya dan mengidentifikasi

jangkauan operasi perusahaan dalam produk yang ditawarkan dan pasar yang dilayani.

Misi dapat ditetapkan secara sempit atau secara luas. Misi sempit menegaskan secara jelas bisnis utama organisasi dan membatasi jangkauan aktivitas perusahaan. Misi sempit juga membatasi kesempatan untuk tumbuh. Sebaliknya, misi luas melebarkan jangkauan aktivitas organisasi untuk memasukkan banyak tipe produk atau jasa, pasar atau teknologi.

Tujuan

Tujuan adalah hasil akhir dari aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan apa yang akan diselesaikan dan kapan akan diselesaikan, serta sebaiknya diukur jika memungkinkan. Pencapaian tujuan perusahaan merupakan hasil dari penyelesaian misi. Sedangkan sasaran adalah pernyataan terbuka yang berisi satu harapan yang akan diselesaikan tanpa perhitungan apa yang akan dicapai dan tidak ada penjelasan waktu penyelesaian.

Strategi

Strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi akan memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan bersaing. Strategi yang dinyatakan atau strategi eksplisit adalah strategi yang dengannya beberapa hal dapat diperdebatkan seperti pengembangan dan akuisisi lini produk baru. Akan tetapi investigasi lebih lanjut menemukan bahwa adanya strategi implicit yang sangat berbeda. Seringkali satu-satunya cara untuk melihat strategi implicit perusahaan adalah dengan tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh para manajer melainkan memperhatikan apa yang mereka lakukan.

Kebijakan

Aliran dari strategi, kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Kebijakan juga merupakan pedoman luas yang menghubungkan perumusan strategi dengan implementasi. Kebijakan perusahaan merupakan pedoman luas untuk individu guna mengikuti strategi perusahaan. Kebijakan-kebijakan tersebut diinterpretasi dan diimplementasi

melalui strategi dan tujuan divisi masing-masing. Divisi-divisi kemudian akan mengembangkan kebijakannya sendiri, yang akan menjadi pedoman bagi wilayah fungsionalnya untuk diikuti.

2.3. Pengarusutamaan (*Mainstreaming*)

Mainstreaming/pengarusutamaan adalah sebuah proses dimana pertimbangan terhadap suatu isu atau kebutuhan kelompok tertentu dilekatkan terhadap proses pengambilan keputusan – khususnya dalam pembuatan kebijakan. Konsep ini awalnya digunakan untuk memastikan agar perspektif gender selalu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, namun secara bertahap konsep ini digunakan pula untuk kelompok yang lain. Isu-isu yang dikaitkan dengan pengarusutamaan antara lain mengenai usia, penyandang cacat, ras, agama, orientasi seksual, disamping isu-isu ‘persamaan hak’ seperti hak anak dan hak asasi manusia (Kidner & Curtis, 2003).

Menurut definisi yang disebutkan oleh *GTZ* (*German Technical Cooperation*), istilah pengarusutamaan (*mainstreaming*) mencakup semua kegiatan dan proses komunikatif yang bertujuan untuk melembagakan (institusionalisasi) norma-norma, konsep, panduan dan gambaran baru dalam rangka mengenalkan dan menguatkan rutinitas, prosedur dan ritual baru dalam organisasi. Dengan demikian pengarusutamaan merupakan subtugas dari manajemen perubahan.

Tujuan dari pengarusutamaan adalah perubahan paradigma, yang dilakukan melalui tiga pendekatan parallel, komunikasi (*bridging*), penamaan identitas (*branding*), dan pembelajaran (*boosting*). Pada pendekatan komunikasi, kelompok target harus diidentifikasi dan diposisikan agar inovasi dapat tersebar baik secara formal maupun informal. Inovasi harus memiliki penamaan identitas yang *visible* dan bermakna yang secara substansi sesuai dengan kebutuhan kelompok target. Pembelajaran harus dikelola secara bertahap dan diatur dalam kelompok yang terpilih (*GTZ*).

Pengarusutamaan dapat dijalankan menggunakan metode yang halus maupun kasar. Komunikasi secara sukarela, *workshop*, maupun penciptaan sebuah

gambaran baru diidentifikasi sebagai metode halus atau horizontal. Sedangkan penegakan aturan dan prosedur baru, redistribusi sumberdaya, persyaratan standar kualitas baru atau panduan baru bagi struktur hirarkis dipahami sebagai strategi pengarusutamaan secara vertikal atau kasar.

Strategi pengarusutamaan bukanlah hal yang baru di bidang perbandingan kebijakan publik. Konsep pengarusutamaan dapat ditemui pada sejumlah kasus di negara-negara barat (di dalam dan luar Eropa Barat) terhadap isu-isu yang ditujukan bagi *disabled*, pendidikan, *gender*, dan kesehatan.

Awalnya, pengarusutamaan bidang pendidikan diterapkan pada tahun 1970-an di Amerika, dimana saat itu istilah pengarusutamaan digunakan untuk mendeskripsikan integrasi isu anak-anak yang menderita cacat fisik (*physically disabled*) ke dalam kebijakan di bidang pendidikan. Kemudian di tahun 1980 dan 1990-an, konsep ini berkembang lebih luas kepada isu lainnya, seperti yang terjadi pada *UN Conference on Women* di Beijing pada tahun 1995 yang mengusulkan pengarusutamaan isu-isu tentang perempuan /*gender* (Geyer 1999).

Menurut Geyer (1999), dari pembelajaran Uni Eropa yang telah menerapkan prinsip ini, pengarusutamaan melibatkan tiga elemen administratif pokok, yaitu:

1. Adanya komitmen untuk membuka seluruh pintu kebijakan agar mengarah pada area kebijakan yang diarusutamakan.
2. Adanya sistem yang dapat mengevaluasi dampak dari kebijakan yang diarusutamakan.
3. Adanya strategi untuk memaksa/mendorong pelaku administratif agar memberi perhatian dan mengimplementasikan kebijakan yang diarusutamakan

Bagi para pendukung kebijakan sosial, pengarusutamaan merupakan suatu kesempatan untuk mendorong kebijakan ke wilayah rutinitas birokrasi yang sudah berjalan tanpa secara langsung menantang wilayah tersebut atau meningkatkan biaya akibat adanya kebijakan tersebut. Pengarusutamaan akan menarik bagi aktor-aktor kebijakan sosial karena tidak memerlukan konfrontasi langsung ke wilayah kebijakan yang sudah ada dan tidak langsung membebankan biaya bagi

Negara serta menciptakan peluang-peluang kerjasama dan koordinasi dengan kekuatan politik yang lebih kuat. Dengan kata lain, strategi pengarusutamaan merupakan metode yang murah dan tidak langsung dalam melakukan perubahan kebijakan secara halus atau tidak kentara.

Dibalik semua itu, strategi pengarusutamaan memiliki kelemahan dan kontradiksi. Kelemahan administratifnya adalah diperlukan niat yang kuat dari pejabat yang bersangkutan untuk menjadikan isu yang diarusutamakan sebagai salah satu kewajiban yang harus dilakukan. Hal ini mengingat isu tersebut berada di luar kompetensinya, atau bisa saja bukan merupakan isu yang menarik dan akan menjadi beban tersendiri bagi tugas sehari-hari. Dengan demikian, resikonya pengarusutamaan hanya menjadi "paper pushing" dan bukannya menjadi kebijakan yang ada pengaruhnya. Pengarusutamaan memerlukan usaha dan pengawasan yang berkesinambungan untuk menekan birokrasi yang kerap enggan dan 'overload' dengan tugasnya sendiri.

Selain itu ada pula yang disebut dengan "mainstreaming competition" dan "mainstreaming overload". Seperti yang telah disinggung bahwa strategi pengarusutamaan dapat meliputi beberapa wilayah kebijakan seperti gender, orang cacat, manula, dan sebagainya, sehingga setiap area kebijakan akan saling bersaing untuk mendapatkan perhatian dan waktu dari para aktor/birokrat. Seperti yang dikatakan oleh Geyer (1999), apabila pengarusutamaan pada satu area kebijakan telah dianggap sukses, maka hal itu secara langsung atau tidak akan menghalangi kesuksesan pada area yang lain. Hal ini juga berimplikasi pada meningkatnya beban kerja dan tuntutan kepada birokrasi yang dapat mengakibatkan pada menurunnya efektifitas pengarusutamaan.

Di Indonesia, kebijakan pengarusutamaan dikenal dalam rangka memperkuat sinergi antarbidang dalam pembangunan. Pada dasarnya pembangunan di setiap bidang untuk mencapai keberhasilan, tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan pembangunan di bidang lainnya. Dengan pembiayaan yang terbatas, untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan hasil yang maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan di

setiap bidang sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung dan saling memperkuat. Setiap kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan pembangunan di setiap bidang harus memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai sinergi tersebut melalui proses komunikasi, konsultasi, koordinasi serta monitoring, dan evaluasi dengan pemangku kepentingan terkait di pusat dan daerah dan mengedepankan keberhasilan bersama dalam pencapaian sasaran pembangunan (Bappenas 2010).

Masih dalam Bappenas (2010), dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, terdapat prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada kebijakan pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan. Diharapkan dengan dijiwainya prinsip-prinsip pengarusutamaan itu, pembangunan jangka menengah ini akan memperkuat upaya mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Pengarusutamaan dilakukan dengan cara yang terstruktur dengan kriteria sebagai berikut: (1) pengarusutamaan bukanlah merupakan upaya yang terpisah dari kegiatan pembangunan sektoral; (2) pengarusutamaan tidak mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan (investasi) yang signifikan; dan (3) pengarusutamaan dilakukan pada semua sektor terkait namun diprioritaskan pada sektor penting yang terkait langsung dengan isu-isu pengarusutamaan. Sampai saat ini, pemerintah telah menetapkan beberapa isu yang dipandang penting untuk diarusutamakan, yaitu Pembangunan Berkelanjutan, Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dan Gender (Bappenas 2010).

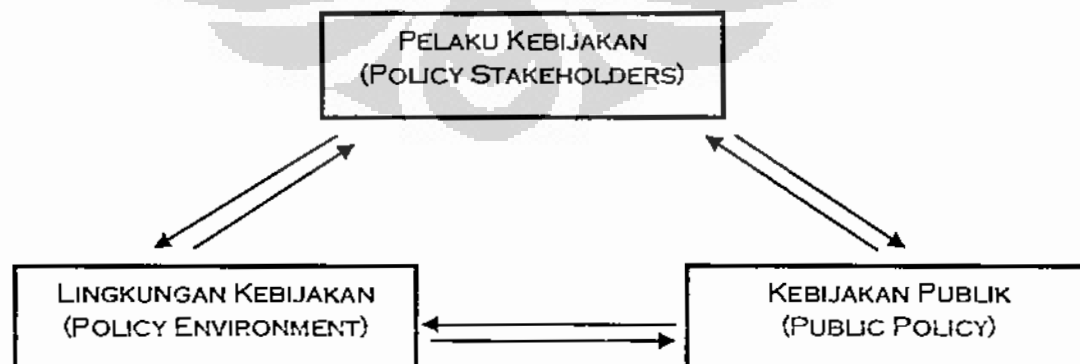
2.4. Perumusan Kebijakan Publik

Salah satu definisi kebijakan publik yang dikenal luas adalah menurut Dye (2005) yang dikutip dalam Kurniawan (2010) yaitu *apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan*. Sedangkan menurut Anderson (2006, 6)

dalam Kurniawan (2010), kebijakan dapat didefinisikan sebagai *tindakan yang didesain secara sengaja yang relatif stabil yang dilakukan oleh aktor atau sejumlah aktor untuk menyelesaikan masalah atau hal-hal yang menjadi perhatian bersama*. Kebijakan publik menurut Anderson dikembangkan oleh badan/lembaga dan pejabat pemerintah serta memiliki dampak secara substansial terhadap masyarakat. Anderson juga menyatakan bahwa “kebijakan publik adalah suatu respons dari sistem politik terhadap *demands/claim* yang mengalir dari lingkungannya”.

Dari definisi Anderson terlihat bahwa kebijakan publik memiliki 3 elemen sistem kebijakan yang satu sama lain memiliki hubungan, seperti yang dikatakan oleh Dunn (1988) dalam gambar di bawah yaitu:

1. Kebijakan publik (*public policy*), merupakan serangkaian pilihan yang dibuat atau tidak dibuat oleh badan atau kantor pemerintah, dipengaruhi atau mempengaruhi lingkungan kebijakan dan kebijakan publik.
2. Pelaku kebijakan (*policy stakeholders*), adalah kelompok masyarakat, organisasi profesi, partai politik, berbagai badan pemerintah, wakil rakyat, dan analis kebijakan yang dipengaruhi atau mempengaruhi pelaku kebijakan dan kebijakan publik.
3. Lingkungan kebijakan (*policy environment*), yakni suasana tertentu tempat kejadian di sekitar isu kebijakan itu timbul, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pelaku kebijakan dan kebijakan publik.



Gambar 6. Elemen Sistem Kebijakan
(Sumber: Dunn, 1988)

Dalam proses pembuatan suatu kebijakan, Anderson (2006) dalam Kurniawan (2010) menyebutkan bahwa terdapat tiga teori utama yang dapat digunakan yakni:

1. Teori rasional-komprehensif, yang intinya mengarahkan agar pembuatan sebuah kebijakan publik dilakukan secara rasional-komprehensif dengan mempelajari permasalahan dan alternatif kebijakan secara memadai.
2. Teori incremental, yaitu tidak melakukan perbandingan terhadap permasalahan dan alternatif serta lebih memberikan deskripsi mengenai cara yang dapat diambil dalam membuat kebijakan.
3. Teori *mixed scanning*, yang menggabungkan antara teori rasional-komprehensif dengan teori inkremental.

Terkait dengan kriteria yang dapat digunakan untuk mempengaruhi pemilihan terhadap suatu kebijakan tertentu, Anderson (2006) di dalam Kurniawan (2010) mengemukakan enam kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memilih kebijakan, yakni:

- (1) nilai-nilai yang dianut baik oleh organisasi, profesi, individu, kebijakan maupun ideologi
- (2) afiliasi partai politik
- (3) kepentingan konstituen
- (4) opini publik
- (5) penghormatan terhadap pihak lain; serta
- (6) aturan kebijakan.

Dalam perumusan sebuah kebijakan sebagai suatu proses, terdapat beberapa ahli yang mengembangkan sejumlah kerangka untuk memahami proses kebijakan (*policy process*) atau seringkali disebut juga sebagai siklus kebijakan (*policy cycles*). Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Dye (2005) yang dikutip oleh Kurniawan (2010) bahwa pembuatan kebijakan sebagai sebuah proses akan meliputi sejumlah proses, aktivitas, dan keterlibatan peserta sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. Pembuatan Kebijakan sebagai sebuah Proses

Proses	Aktivitas	Peserta
Identifikasi Masalah	Publikasi masalah sosial; mengekspresikan tuntutan akan tindakan dari pemerintah	Media massa; kelompok kepentingan; inisiatif masyarakat; opini publik
↓	↓	↓
Penetapan Agenda	Menentukan mengenai masalah-masalah apa yang akan diputuskan; masalah apa yang akan dibahas/ditangani oleh pemerintah	Elit, termasuk presiden dan kongres; kandidat untuk jabatan publik tertentu; media massa
↓	↓	↓
Perumusan Kebijakan	Fengerabangan proposal kebijakan untuk menyelesaikan dan memperbaiki masalah	Pemikir; Presiden dan lembaga eksekutif; komite kongres; kelompok kepentingan
↓	↓	↓
Legitimasi Kebijakan	Memilih proposal; mengembangkan dukungan untuk proposal terpilih; menetakannya menjadi peraturan hukum; memutuskan konstitusionalnya	Kelompok kepentingan; presiden; kongres; pengadilan
↓	↓	↓
Implementasi Kebijakan	Mengorganisasikan departemen dan badan; menyediakan pembiayaan atau jasa pelayanan; menetapkan pajak	Presiden dan staf kepresidenan; departemen dan badan
↓	↓	↓
Evaluasi Kebijakan	Melaporkan output dari program pemerintah; mengevaluasi dampak kebijakan kepada kelompok sasaran dan bukan sasaran; mengusulkan perubahan dan reformasi	Departemen dan badan; komite pengawasan kongres; media massa; pemikir

Sumber: Thomas R. Dye (2005). *Public Policy*. Eleventh Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall

Pandangan yang sedikit berbeda tentang proses kebijakan disampaikan oleh Anderson, yakni sebagai berikut:

Tabel 3. Proses Kebijakan

Terminologi Kebijakan	Tahap 1: Agenda Kebijakan	Tahap 2: Perumusan Kebijakan	Tahap 3: Adopsi Kebijakan	Tahap 4: Implementasi Kebijakan	Tahap 5: Evaluasi Kebijakan
Definisi	Sejumlah permasalahan diantara banyak permasalahan lainnya yang mendapat perhatian serius dari pejabat publik	Pengembangan usulan akan tindakan yang terkait dan dapat diterima untuk menangani permasalahan publik	Pengembangan dukungan terhadap sebuah proposal tertentu sehingga sebuah kebijakan dapat dilegitimasi atau disahkan	Aplikasi kebijakan oleh mesin administrasi pemerintah	Upaya pemerintah untuk menentukan apakah kebijakan efektif, serta mengapa efektif atau tidak efektif
Common sense	Membuat pemerintah untuk mempertimbangkan tindakan terhadap masalah	Apa yang diusulkan untuk dilakukan terhadap masalah	Membuat pemerintah untuk menerima solusi tertentu terhadap masalah	Aplikasi kebijakan pemerintah terhadap masalah	Apakah kebijakan bekerja baik?

Sumber: Anderson, 2006, 4 (diadaptasi dari Anderson, Brady dan Bullock III, 1984)

Terlihat perbedaan pada tahap Identifikasi Masalah dan Penetapan Agenda (Dye 2005) dimana pada rumusan Anderson keduanya disatukan menjadi tahap Agenda Kebijakan. Tahapan lainnya cenderung sama antara pendapat Dye dan Anderson, yang berbeda hanya istilah penyebutannya saja.

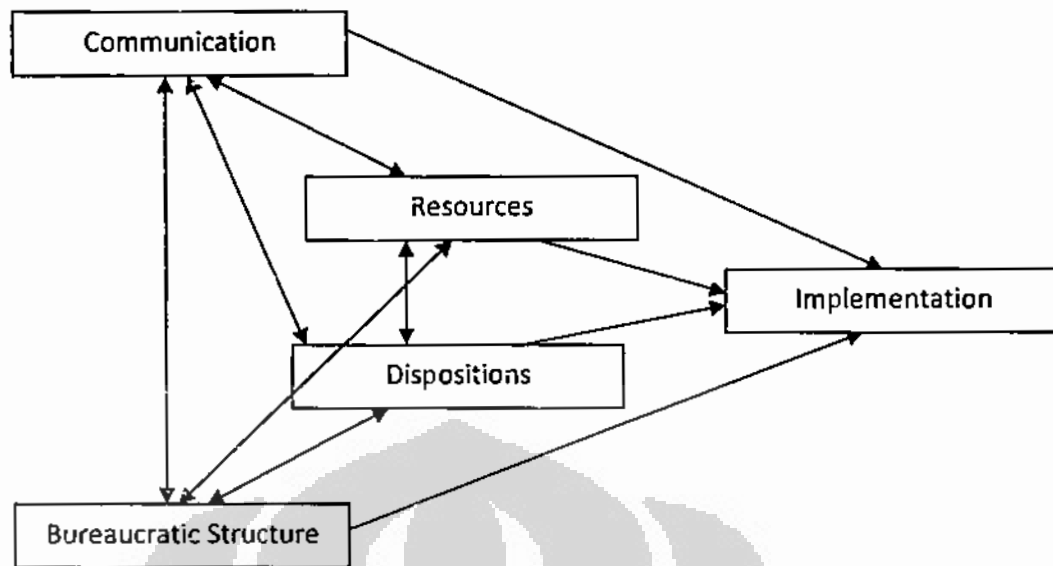
Menurut Sidney (2007) dalam Fischer, Miller and Sidney (2007), dalam sebuah proses kebijakan, tahap perumusan kebijakan merupakan tahap yang kritis. Hal ini terkait dengan proses pemilihan alternatif kebijakan oleh pembuat kebijakan yang biasanya mempertimbangkan besaran pengaruh langsung yang dapat dihasilkan dari pilihan alternatif utama tersebut. Proses ini biasanya akan mengekspresikan dan mengalokasikan kekuatan dan tarik menarik diantara

berbagai kepentingan sosial, politik dan ekonomi. Dengan mengutip pendapat dari Cochran dan Malone (1999), menurut Sidney (2007, 79 dalam Fischer, Miller and Sidney, 2007), perumusan kebijakan mencoba menjawab terhadap sejumlah pertanyaan “apa”, yakni: apa rencana untuk menyelesaikan masalah? Apa yang menjadi tujuan dan prioritas? Pilihan apa yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut? Apa saja keuntungan dan kerugian dari setiap pilihan? Eksternalitas apa, baik positif maupun negatif yang terkait dengan setiap alternatif?

Jann dan Wegrich (2007) dalam Fischer, Miller and Sidney (2007) mengemukakan dua faktor utama yang menentukan sejauh mana alternatif kebijakan akan diadopsi menjadi kebijakan, yakni: (1) penghilangan alternatif kebijakan akan ditentukan oleh sejumlah parameter substansial dasar—misalnya kelangkaan sumberdaya untuk dapat melaksanakan alternatif kebijakan. Sumberdaya ini dapat berupa sumberdaya ekonomi maupun dukungan politik yang didapat dalam proses pembuatan kebijakan. Apabila dalam proses pembuatan kebijakan suatu alternatif kebijakan banyak mendapat kritikan secara politik, maka alternatif tersebut layak untuk dihilangkan karena kurangnya dukungan politik. (2) alokasi kompetensi yang dimiliki oleh berbagai aktor juga memainkan peranan penting dalam penentuan kebijakan. Diluar kedua faktor tersebut, Jann dan Wegrich (2007) dalam Fischer, Miller and Sidney (2007) juga mengemukakan mengenai peranan penting dari akademisi yang berperan sebagai penasehat kebijakan atau pemikir (*think tanks*). Pengetahuan dari para penasehat ini seringkali berpengaruh dalam proses perumusan kebijakan.

2.5. Implementasi Kebijakan

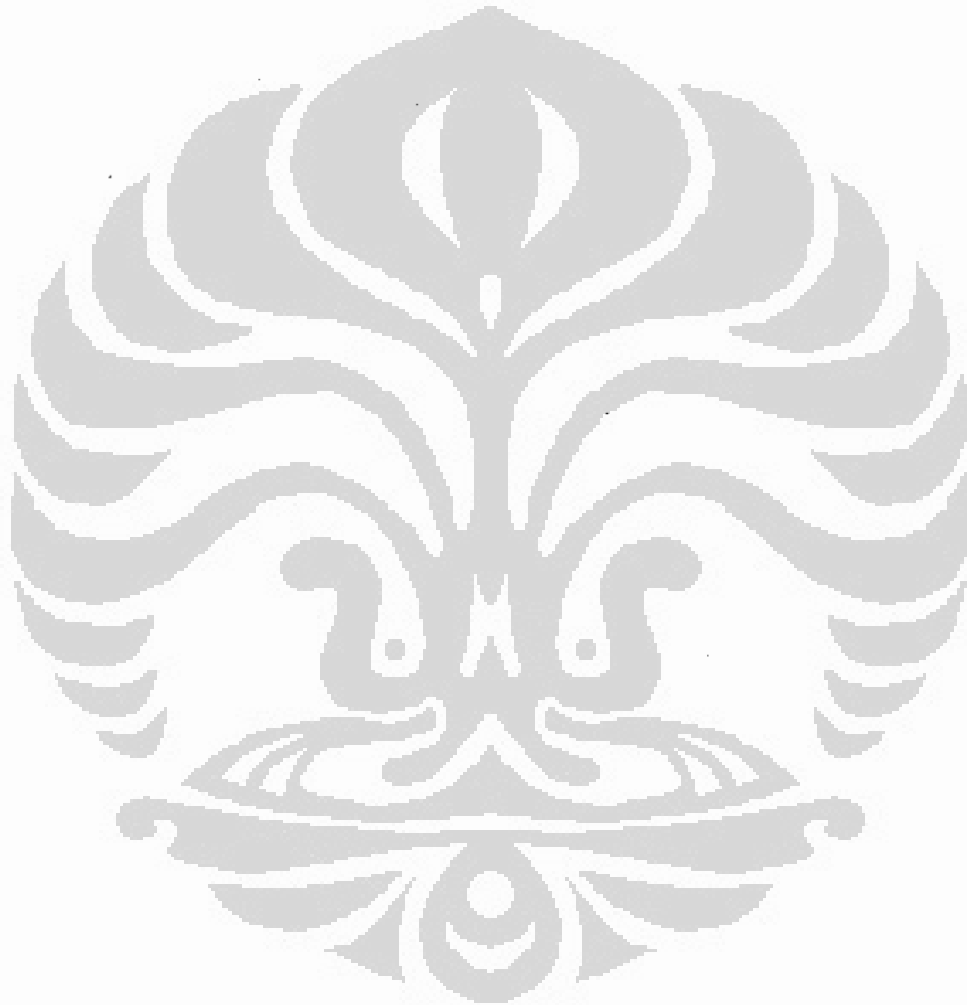
Anderson mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat aspek, yaitu siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dasar dari proses administrasi, kepatuhan kepada kebijakan, dan dampak implementasi pada isi kebijakan dan pengaruh dari kebijakan tersebut. Sedangkan menurut George C. Edwards III implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu: (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain seperti terlihat pada gambar di bawah.



Gambar 7. Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

Komunikasi yang dimaksud adalah bahwa implementasi kebijakan mensyaratkan agar pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Sumberdaya adalah faktor yang penting untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila pelaksana kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumberdaya manusia, yaitu kompetensi pelaksana dan sumberdaya finansial. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika pelaksana memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Struktur birokrasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standart (*standart operating procedures*). Prosedur operasi yang

standar menjadi pedoman bagi setiap pelaksana dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang dapat menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel (Subarsono, 2005).



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua pertanyaan penelitian, yaitu (i) Bagaimana konsep pengarusutamaan pemuda, dan (ii) Bagaimana strategi kebijakan pengarusutamaan pemuda. Jawaban dari pertanyaan penelitian ini hanya dapat diperoleh melalui penelitian yang bersifat kualitatif. Alasan mendasar penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu:

- Penelitian kualitatif menghasilkan tanggapan yang lebih mendalam, sehingga pemahaman lebih mendalam.
- Penelitian kualitatif membuat peneliti lebih mengerti perilaku subjek tertentu yang berhubungan dengan: keputusan, sikap, dan kebiasaan (terutama dengan menggunakan wawancara individual).
- Tipe penelitian ini dapat digunakan apabila topik penelitian bersifat baru, belum pernah dilakukan sebelumnya, seperti yang terjadi pada penelitian ini, ataupun teori yang ada tidak berlaku terhadap kelompok yang sedang diteliti.

3.2 Sumber data

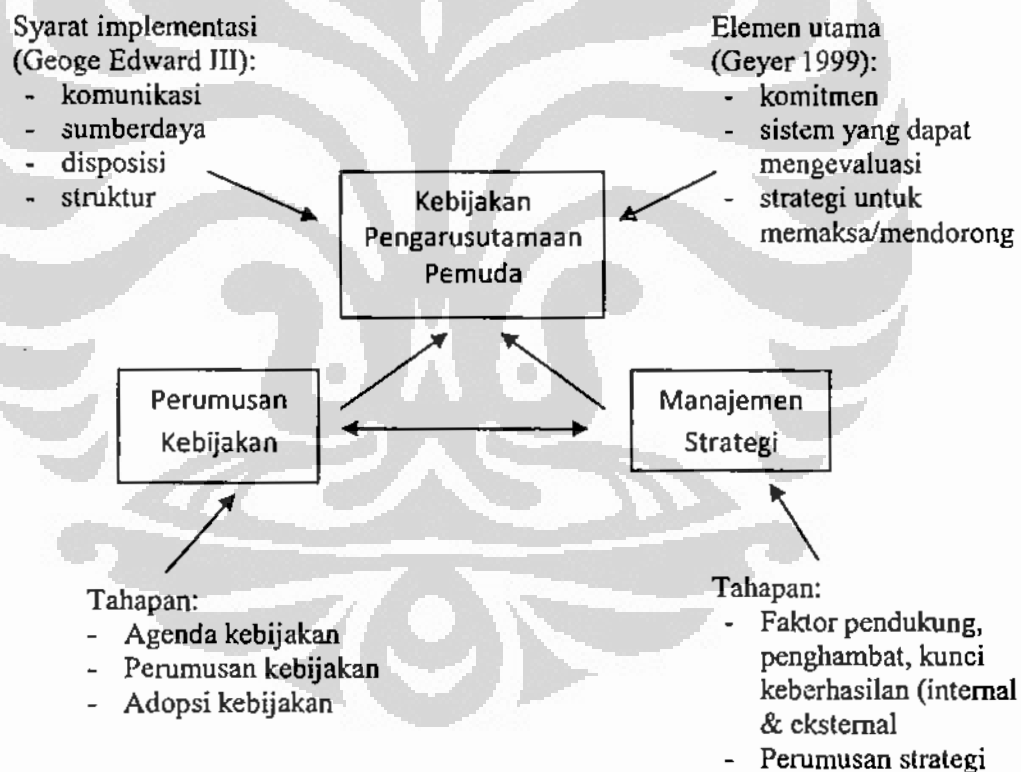
Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan informan kunci. Data primer yang diambil berupa jawaban informan dari pertanyaan yang disusun berdasarkan pedoman wawancara. Pedoman wawancara memungkinkan peneliti menggali topik-topik kunci dan aspek-aspek yang diperlukan dalam penelitian ini dari informan.

Pedoman wawancara dalam penelitian ini disusun berdasarkan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian pertama yang bertujuan untuk menggali konsep pengarusutamaan pemuda dijawab melalui pendekatan elemen sistem kebijakan, yaitu dengan melihat konteks/lingkungan kebijakan

(*policy environment*), pelaku kebijakan (*policy stakeholders*), dan konten kebijakan itu sendiri.

Pertanyaan penelitian kedua yang bertujuan merumuskan strategi kebijakan pengarusutamaan pemuda dijawab dengan pendekatan tiga elemen utama dari konsep pengarusutamaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III. Kemudian untuk memberi masukan dalam perumusan strategi ditanyakan pula mengenai faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan ini serta faktor kunci keberhasilan (faktor internal dan eksternal).

Kerangka konseptual penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 8. Kerangka Konseptual Penelitian

Sumber data primer berasal dari informan kunci yaitu:

1. Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu Deputi Harmonisasi dan Kemitraan, Asisten Deputi Tenaga Kepemudaan dan Bagian Hukum
2. Pejabat Kementerian terkait, yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappenas, Kemenkokesra, Kementerian Sosial
3. Dinas Olahraga dan Pemuda Povinsi DKI Jakarta
4. Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor
5. Pengambil kebijakan/Anggota DPR
6. Pengamat Pendidikan Nasional
7. Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi pustaka berupa peraturan perundangan dan dokumen-dokumen perencanaan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang dibutuhkan antara lain:

- Peraturan perundangan yang mengindikasikan adanya komitmen pemerintah terhadap pembangunan kepemudaan: UU No. 40 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2010.
- Dokumen-dokumen perencanaan yang mengindikasikan adanya perencanaan di bidang pembangunan kepemudaan: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, Rencana Strategis Kemenpora, Rencana Strategis Disorda Prov. DKI Jakarta, Rencana Strategis Dispora Kab. Bogor.

3.3 Teknik Pengumpulan Data:

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Wawancara mendalam semi-terstruktur.

Dalam penelitian ini, wawancara mendalam ditujukan untuk mengumpulkan informasi yang lebih terperinci mengenai pandangan informan tentang konteks, konten dan pelaku kebijakan pengarusutamaan pemuda. Hal ini perlu dilakukan mengingat topik ini masih baru dan memerlukan penggalian

mendalam untuk mengetahui pemahaman dan persepsi informan. Dalam wawancara semi-terstruktur, pedoman wawancara (pertanyaan) akan dikembangkan di lapangan yang memungkinkan pertanyaan-pertanyaan baru akan muncul. Namun pedoman wawancara tetap membantu para peneliti untuk berfokus pada topik penelitian.

2. Studi dokumen.

Dokumen merupakan informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter. Dokumen berisikan data yang telah resmi dirilis oleh instansi tertentu atau pemerintah. Dalam penelitian ini, studi dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan kepemudaan maupun dokumen perencanaan pembangunan nasional yang memuat tentang perencanaan pembangunan kepemudaan. Selain itu juga dokumen-dokumen perencanaan strategis dari berbagai instansi pemerintah yang memuat acuan perancangan dan pedoman pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan.

3. Studi literatur

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh konsep dan teori-teori yang akan digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini. Dari studi literature diperoleh konsep tentang pengarusutamaan, perumusan strategi dan penyusunan kebijakan. Literatur yang digunakan bersumber dari buku-buku referensi, jurnal ilmiah dan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data mentah.

Pada tahap pengumpulan data mentah peneliti melakukan pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan. Data primer yang dikumpulkan adalah informasi tentang konteks, konten dan pelaku kebijakan pengarusutamaan pemuda, elemen-elemen dari pengarusutamaan (komitmen, mekanisme evaluasi dan strategi), syarat implementasi kebijakan (*existing condition*) menurut

George C. Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur, serta faktor pendukung, penghambat dan faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan pengarusutamaan pemuda. Data sekunder meliputi dokumen perundang-undangan dan perencanaan.

2. Transkrip data

Hasil wawancara dengan informan dituangkan dalam bentuk dokumentasi tertulis untuk memudahkan menganalisis.

3. Pembuatan koding

Pada tahap ini, peneliti melakukan tinjauan ulang terhadap hasil wawancara yang sudah didokumentasikan secara tertulis dan melihat kata kunci serta melakukan pengelompokan.

4. Penyimpulan sementara

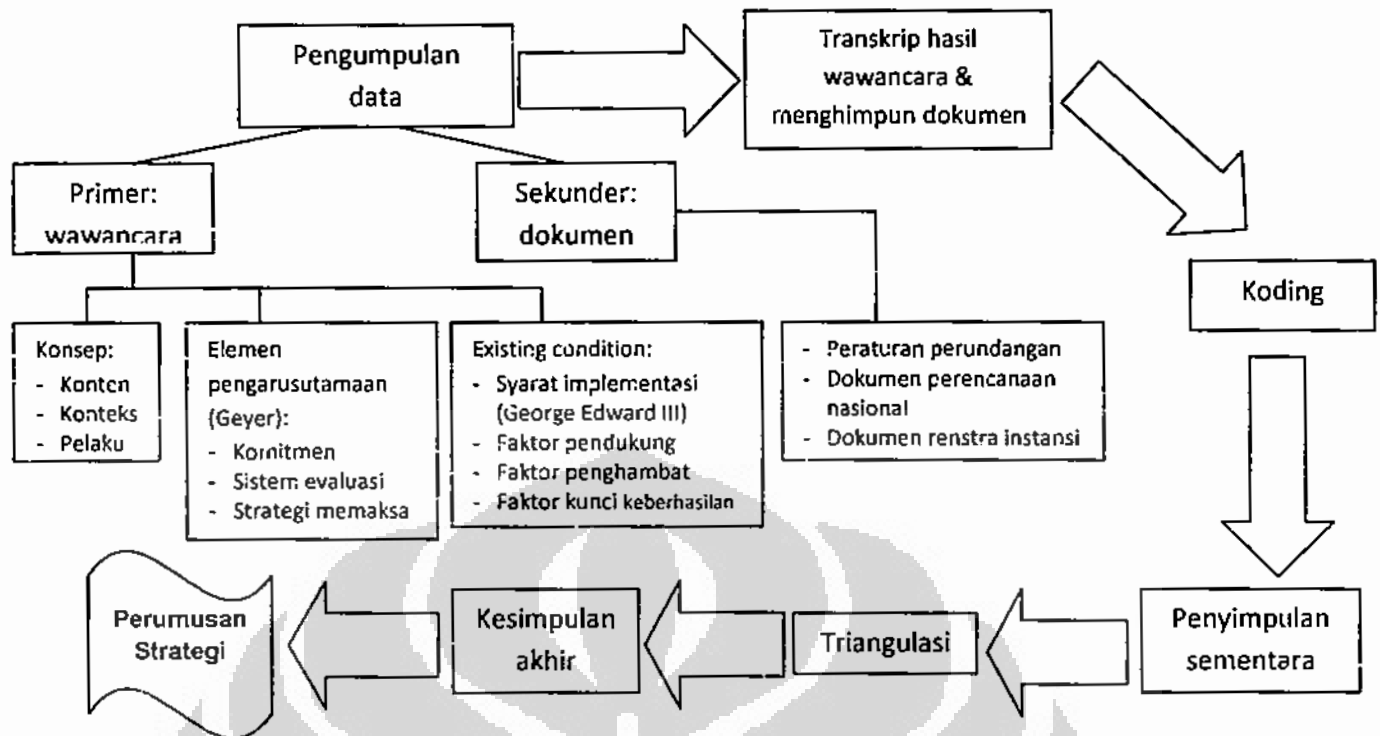
Kesimpulan sementara ditarik berdasarkan data yang diperoleh di lapangan tanpa diinterpretasikan lebih lanjut oleh peneliti.

5. Triangulasi

Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Pengertian triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.

6. Penyimpulan akhir

Teknik analisis data secara lebih dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 9. Teknik Analisis Data

3.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di DKI Jakarta dan Kabupaten Bogor dan berlangsung pada bulan Mei sampai dengan Juni 2011.

3.6 Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan antara lain:

1. Strategi kebijakan yang dirumuskan terbatas hanya pada kebijakan untuk pembangunan kepemudaan dan tidak termasuk untuk pembangunan keolahragaan.
2. Penelitian ini hanya mengambil data dari 7 kementerian dari 21 kementerian terkait yang memiliki program pembangunan kepemudaan.

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Daftar Informan

Berikut ini adalah daftar informan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini:

Tabel 4. Daftar Informan

1.	A.Agus Ridallah	Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bogor
2.	A.Hanif Saha Ghafur	Pengamat Pendidikan Nasional, Staf Khusus Mendiknas RI
3.	Amin Hudoyo	Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta
4.	Dadang Rizki Ratman	Direktur Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI /Bappenas
5.	Guntur Pawoko	Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
6.	Hermin Narwati	Asisten Deputi Bidang Tenaga Kepemudaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
7.	Lalu Wildan	Deputi Bidang Harmonisasi dan Kemitraan, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
8.	Narhasan Zaidi	Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI
9.	Pribudiarta Nur Sitepu	Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI
10.	Prof. Dr. Nila F. Moeloek, Sp.M.	Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs
11.	Sanusi	Kepala Bagian Hukum, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI
12.	Suarmansyah	Asisten Deputi Bidang Pemuda, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI
13.	Syah Djohan	Kepala Seksi Karang Taruna, Kementerian Sosial RI

4.2. Konsep Kebijakan Pengarusutamaan Pemuda

Agar kebijakan pengarusutamaan pemuda dapat diterima oleh berbagai pihak, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah merumuskan konsep kebijakan pengarusutamaan pemuda secara lebih terstruktur. Hal ini penting dilakukan karena jika tidak maka pihak-pihak yang berkepentingan dengan pembangunan kepemudaan akan memiliki persepsi dan definisi yang berbeda-beda tentang konsep pengarusutamaan pemuda. Untuk itu, pendekatan yang

dilakukan adalah dengan melihat konteks pembangunan kepemudaan (lingkungan kebijakan), konten dari kebijakan pengarusutamaan pemuda itu sendiri serta pelaku kebijakan. Menurut Dunn (1988, 109) suatu sistem kebijakan atau seluruh pola institusional di mana didalamnya kebijakan dibuat mencakup hubungan timbal balik diantara tiga unsur, yaitu kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, diformulasikan di dalam bidang-bidang isu mulai dari pertahanan, energy dan kesehatan, sampai kepada pendidikan, kesejahteraan dan kejahatan.

Dunn juga mengatakan bahwa definisi dari masalah kebijakan tergantung pada pola keterlibatan pelaku kebijakan (*policy stakeholders*) yang khusus, yaitu para individu atau kelompok individu yang mempunyai andil di dalam kebijakan karena mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Pelaku kebijakan, misalnya kelompok warga negara, perserikatan buruh, partai politik, agen-agen pemerintah, pemimpin terpilih, dan para analis kebijakan sendiri, sering menangkap secara berbeda informasi yang sama mengenai lingkungan kebijakan. Lingkungan kebijakan (*policy environment*) yaitu konteks khusus di mana kejadian-kejadian di sekeliling isu kebijakan terjadi, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembuat kebijakan dan kebijakan public. Oleh karena itu system kebijakan berisi proses yang bersifat dialektis, yang berarti bahwa dimensi objektif dan subjektif dari pembuat kebijakan tidak terpisahkan di dalam prakteknya. Sistem kebijakan adalah produk manusia yang subjektif yang diciptakan melalui pilihan-pilihan yang sadar oleh para pelaku kebijakan; sistem kebijakan adalah realitas objektif yang dimanifestasikan ke dalam tindakan-tindakan yang teramati berikut konsekuensinya; para pelaku kebijakan merupakan produk dari sistem kebijakan.

4.2.1. Konteks/Lingkungan Kebijakan

Dari hasil penggalian konteks kebijakan pengarusutamaan pemuda melalui wawancara dengan narasumber, terlihat bahwa masalah pembangunan kepemudaan disepakati sebagai masalah yang sangat strategis dan perlu

mendapatkan perhatian serius. Pemuda merupakan tumpuan harapan bangsa, dimana terletak masa depan suatu bangsa. Hal ini terbukti sejak awalnya bangsa Indonesia berdiri, di mana pendobrak dan penggerak kemerdekaan adalah para pemuda, yang kemudian juga memimpin Negara kita di usia yang tergolong masih muda.

“(Pembangunan) pemuda merupakan hal yang sangat strategis karena dari dulu sampai sekarang pemuda merupakan tumpuan harapan bangsa. Jika dilihat dari sejarah, yang menjadi pendobrak adalah pemuda (SY). Bangkitnya suatu bangsa dimulai dari pemuda, terlihat dari para pemimpin di masa awal bangsa ini berdiri yang ketika itu masih bisa dikategorikan pemuda (NZ). Pemuda sangat strategis karena merupakan motor penggerak pembangunan di tingkat yang paling dasar (SD).”

Pembangunan kepemudaan juga erat kaitannya dengan pembangunan kualitas sumber daya manusia, termasuk di dalamnya peningkatan daya saing pemuda dari segi pendidikan, kualitas fisik serta kapasitas keterampilannya. Dengan demikian pembangunan kepemudaan harus dilihat secara holistik/menyeluruh, tidak terkotak-kotak, dan tidak terbatas pada satu rentang waktu tertentu.

“Pembangunan kepemudaan harus dilihat secara holistik dan tidak sewaktu saja (cross sectional). Sehingga pendekatan pembangunan kepemudaan lebih kepada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, yang dimulai sedini mungkin dari bayi, yang dilanjutkan dengan pendidikan yang berkualitas. Pengetahuan dan informasi sangat penting, terutama bagi perempuan yang memiliki posisi strategis sebagai pengambil keputusan dalam keluarga” (NFM).

Hal ini sejalan dengan apa yang dipaparkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga, bahwa pembangunan kepemudaan merupakan upaya penting dalam mendukung pencapaian pembangunan sumberdaya manusia. Di dalam UU No. 40 tahun 2009 disebutkan pula bahwa

“Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Di tengah posisi strategis pembangunan kepemudaan, terdapat berbagai masalah yang melingkupi pemuda, baik yang berasal dari individu pemuda itu sendiri

maupun dari berbagai kebijakan dan yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pemuda. Beberapa masalah yang cukup penting adalah karakter pemuda yang dianggap akan berpengaruh terhadap kepribadian, jati diri dan nilai-nilai yang dipegang oleh pemuda sehingga pembangunan karakter pemuda menjadi penting. Karakter pemuda juga berhubungan dengan kemandirian dan masalah-masalah sosial lainnya yang ditemui pada pemuda seperti narkoba, HIV AIDS, pergaulan bebas, premanisme, kriminalitas, tawuran dan sebagainya.

“Jika pemuda memiliki jati diri dan karakter yang kuat mungkin tidak terjadi hal-hal yang (destruktif) seperti itu. Pemuda masih di usia labil, sedang mencari jati dirinya sehingga perlu diarahkan agar tidak salah langkah (AH). Pemuda masih belum menganggap dirinya sebagai potensi yang dapat diandalkan. Sehingga ia menjadi tidak mandiri dan rendah kreativitasnya (SD). Pemuda sekarang cenderung meniru tanpa memperhitungkan benar atau salah, karena mereka melihat apa yang terjadi di depan mata. Sehingga karakter mereka perlu diperkuat lagi misalnya dengan wawasan kebangsaan, bela Negara, Pancasila” (SY).

Masalah lain yang ditemukan sehubungan dengan pembangunan kepemudaan adalah diperlukannya peran yang harmonis dan saling bersinergi dari sektor-sektor lain di luar Kementerian Pemuda dan Olahraga. Hal ini mutlak dibutuhkan mengingat masalah pemuda sangat luas dan tidak dapat diatasi hanya oleh sektor kepemudaan, melainkan juga oleh sektor lain yang terkait seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, agama dan lainnya. Artinya Kementerian Pemuda dan Olahraga harus pro aktif dalam mengajak dan menjadi penggerak agar sektor lain mau lebih memprioritaskan isu pembangunan kepemudaan.

“Kemenpora harus pro aktif me‘manage’ potensi-potensi yang ada. Ia harus lebih aktif melakukan koordinasi antar kementerian yang punya fungsi program-program kepemudaan dan menyinergikannya. Kelemahan kita adalah pada pola koordinasi” (NZ). Persoalan yang paling dasar itu adalah sinergi yang dibangun, koordinasi dengan berbagai departemen (kementerian) itu belum ‘nyambung, apalagi tingkat kabupaten kota” (AR). Pembangunan kepemudaan melibatkan berbagai aspek kehidupan dan menyangkut berbagai bidang pembangunan, sehingga masalahnya ada di koordinasi, sinergi, kemitraan dan kerjasama” (DRR).

4.2.2. Pelaku Kebijakan (*Policy Stakeholders*)

Dalam pembangunan kepemudaan, terdapat pelaku-pelaku yang berfungsi baik sebagai penggerak utama (*leading sector*) maupun pelaku yang sifatnya pendukung walaupun tidak bisa dikatakan memiliki peran yang lebih kecil. Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam hal ini dianggap tepat sebagai motor penggerak pembangunan kepemudaan, sesuai dengan amanat undang-undang dan struktur birokrasi yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.

"Jika dicek di dalam amanah Undang-undang, kita (Kemenpora) sebagai leading sector di bidang kepemudaan, yaitu lebih kepada mengembangkan regulasi dan kebijakan umumnya. Kita memberikan panduan dan koridor, baru kemudian mengedukasi dan mengomunikasikan kepada pihak-pihak terkait agar semuanya memiliki visi kepemudaan" (LW).

Pelaku lainnya adalah Kementerian dan Lembaga terkait, yang memiliki program dan kegiatan yang terkait dengan pembangunan kepemudaan, diantaranya Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

"Kita sudah melist ada sekitar 21 Kementerian dan Lembaga yang memiliki program-program kepemudaan. Persoalan pemuda harus dilihat dan diterima bahwa memang ia strategis dan penting sehingga diharapkan kementerian, mitra, stakeholder, masyarakat dan swasta mau bergerak bersama secara sinergi untuk memecahkannya" (LW). Dari sisi pemerintah, aktor-aktor yang berperan adalah Kemenpora, Bappenas, Kemenkeu, Kemendagri juga, karena jika mau mainstreaming harus sampai ke tingkat daerah, bahkan tingkat desa. Juga termasuk lembaga-lembaga masyarakat, organisasi social politik, asosiasi, dunia usaha, dan akademisi" (PNS).

Sejauh ini keterlibatan sektor-sektor di luar Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pembangunan kepemudaan adalah pada tataran pelaksanaan kegiatan. Di dalam UU no 40 tahun 2009 tentang Kepemudaan, pada pasal 30 ayat 1 disebutkan bahwa Pemerintah wajib melakukan koordinasi strategis lintas sektor untuk mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Selanjutnya pada ayat 2 menyebutkan bahwa koordinasi strategis lintas sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi:

- a. program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda;
- b. kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan
- c. kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan serta narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

4.2.3. Konten Kebijakan

Secara istilah, kebijakan pengarusutamaan pemuda belum dikenal luas oleh para *stakeholder* dan secara konsep pun masih dianggap sebagai hal yang baru di lingkungan Kemenpora. Adapun konsep pengarusutamaan pemuda yang diusung oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam *draft* konsep kebijakan Pengarusutamaan Pemuda dan Olahraga (2010) mencakup "... strategi yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan peran serta pemuda dalam seluruh aspek kehidupan manusia dan memperhatikan serta melibatkan pemuda ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan".

Beberapa masukan sehubungan dengan konten dan konsep pengarusutamaan pemuda adalah bagaimana pemuda sebagai bagian dari asset bangsa bisa berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari seluruh sumber daya pembangunan. Sehingga menjadi penting bahwa pemuda tidak sekedar menjadi objek pembangunan tetapi juga sebagai pelaku, bukan hanya sekedar dipenuhi kebutuhannya tetapi juga didengarkan suaranya. Selain itu pemuda juga harus dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pada monitoring dan evaluasi sehingga aspirasi pemuda dapat tertampung dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pemuda. Mengenai konsep pengarusutamaan, masukannya adalah:

"Mainstreaming itu strategi. Mainstreaming pemuda ini sebenarnya adalah bagaimana memasukkan isu-isu pemuda dari mulai tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Konsep mainstreaming harus mengubah mindset. Jadi karena dia mengubah mindset sebenarnya begitu orang itu menyusun perencanaan program, di dalamnya itu sudah ada isu pemuda" (PNS). Konsep pengarusutamaan adalah mengutamakan

sesuatu dari keseluruhan kebijakan. Dalam pengarusutamaan pemuda, harus dimengerti dulu tujuan diarusutamakan dan untuk mengatasi masalah apa. Apakah ia berarti mengutamakan pemuda dibandingkan kelompok umur yang lain? Atau maknanya dipersempit menjadi memprioritaskan pemuda dalam setiap program pembangunan. Dengan demikian konsep pengarusutamaan pemuda harus diperjelas dulu tujuannya. Kalau tujuannya belum diperjelas atau belum dirumuskan, pengarusutamaan belum siap sebagai konsep” (DRR).

Di dalam Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang disusun oleh Bappenas yaitu Lampiran Buku II tentang Memperkuat Sinergi Antarbidang Pembangunan, BAB I tentang Kebijakan Pengarusutamaan dan Lintas Bidang, disebutkan bahwa terdapat prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada kebijakan pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan. Diharapkan dengan dijiwainya prinsip-prinsip pengarusutamaan itu, pembangunan jangka menengah ini akan memperkuat upaya mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

Di dalam buku tersebut juga disebutkan bahwa pengarusutamaan dilakukan dengan cara yang terstruktur dengan kriteria sebagai berikut: (1) pengarusutamaan bukanlah merupakan upaya yang terpisah dari kegiatan pembangunan sektoral; (2) pengarusutamaan tidak mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan (investasi) yang signifikan; dan (3) pengarusutamaan dilakukan pada semua sektor terkait namun diprioritaskan pada sektor penting yang terkait.

Menurut Geyer (1999), strategi pengarusutamaan bukanlah hal yang baru di bidang perbandingan kebijakan publik. Konsep pengarusutamaan dapat ditemui pada sejumlah kasus di negara-negara barat (di dalam dan luar Eropa Barat) terhadap isu-isu yang ditujukan bagi *disabled*, pendidikan, *gender*, dan kesehatan. Awalnya, pengarusutamaan bidang pendidikan diterapkan pada tahun 1970-an di Amerika, dimana saat itu istilah pengarusutamaan digunakan untuk mendeskripsikan integrasi isu anak-anak yang menderita cacat fisik (*physically disabled*) ke dalam kebijakan di bidang pendidikan. Kemudian di tahun 1980 dan

1990-an, konsep ini berkembang lebih luas kepada isu lainnya, seperti yang terjadi pada *UN Conference on Women* di Beijing pada tahun 1995 yang mengusulkan pengarusutamaan isu-isu tentang perempuan /gender.

Dari pembelajaran Uni Eropa yang telah menerapkan prinsip ini, pengarusutamaan melibatkan tiga elemen administratif pokok, yaitu:

1. Adanya komitmen untuk membuka seluruh pintu kebijakan agar mengarah pada area kebijakan yang diarusutamakan.
2. Adanya sistem yang dapat mengevaluasi dampak dari kebijakan yang diarusutamakan.
3. Adanya strategi untuk memaksa/mendorong pelaku administratif agar memberi perhatian dan mengimplementasikan kebijakan yang diarusutamakan.

Dengan melihat berbagai masukan, baik dari sisi konteks, pelaku, konten kebijakan, maupun dari sisi perencanaan pembangunan nasional, maka konsep kebijakan pengarusutamaan pemuda dapat dirumuskan sebagai:

“Suatu strategi yang mengikat setiap pihak untuk berkomitmen dalam memprioritaskan pembangunan kepemudaan dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada monitoring dan evaluasi, yang dilakukan secara koordinatif, sinergi, dan harmonis”.

4.3. Elemen Pengarusutamaan

4.3.1. Adanya komitmen

Salah satu elemen pokok dari konsep pengarusutamaan adalah adanya komitmen untuk membuka seluruh pintu kebijakan agar mengarah pada area kebijakan yang diarusutamakan (Geyer, 1999). Hal ini mengacu pada suatu keharusan untuk adanya *good will* dari para pelaku kebijakan agar mau menjadikan isu yang diarusutamakan sebagai suatu prioritas. Pertimbangannya adalah terkadang pelaku kebijakan merasa bahwa isu tersebut berada di luar wilayah kerjanya, tidak merasa memiliki kompetensi yang sesuai dengan isu tersebut, atau sudah cukup

terbebani dengan tugas pokoknya. Dengan demikian, adanya komitmen yang kuat menjadi suatu keharusan apabila konsep pengarusutamaan ini hendak dijalankan.

Dalam konteks kebijakan pengarusutamaan pembangunan kepemudaan, beberapa masukan tentang komitmen pelaksana dan tingkat kepentingannya dalam mendukung isu yang diarusutamakan telah dihimpun melalui wawancara dengan narasumber. Secara umum, narasumber menyepakati bahwa adanya komitmen yang kuat terutama dari pemimpin merupakan syarat mutlak agar kebijakan pengarusutamaan dapat dijalankan. Komitmen ini harus didukung oleh adanya sosialisasi dan komunikasi yang terus menerus dilakukan agar terdapat kesamaan persepsi tentang tingkat kepentingan kebijakan ini.

Komitmen ditunjukkan salah satunya melalui diterbitkannya produk kebijakan yang mendukung ke arah pembangunan kepemudaan. Fungsi legislatif yaitu DPR telah menerbitkan UU 40/2009 tentang Kepemudaan. Di dalam penjelasan umum UU 40/2009 tersebut, pada paragraf 6 dipaparkan bahwa kebijakan pelayanan kepemudaan mempunyai arah untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu, kebijakan pelayanan kepemudaan juga diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing.

Disamping itu juga telah diterbitkannya UU No. 12/2010 tentang Gerakan Pramuka yang menegaskan bahwa gerakan pramuka selaku penyelenggara pendidikan kepramukaan mempunyai peran besar dalam pembentukan kepribadian generasi muda sehingga memiliki pengendalian diri dan kecakapan hidup untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Hal ini tentu akan membawa dampak yang positif terhadap pembangunan generasi muda ke depan. Pendidikan kepramukaan merupakan salah satu pendidikan non-formal yang menjadi wadah pengembangan potensi diri serta memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup untuk melahirkan kader penerus perjuangan bangsa dan negara.

Fungsi kerangka regulasi dan anggaran yang dimiliki oleh Bappenas menunjukkan komitmen terhadap percepatan pembangunan kepemudaan, tercermin dari kerangka perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Penjelasan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, di mana dijelaskan tentang arah pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025, yang salah satunya adalah dengan mewujudkan bangsa yang berdaya saing, melalui pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Di dalamnya disebutkan bahwa pembangunan pemuda diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan karakter kebangsaan (*nation building*) dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang ekonomi, sosial budaya, iptek dan politik, serta memiliki wawasan kebangsaan dan beretika bangsa Indonesia. Hal ini kemudian dituangkan lagi ke dalam Lampiran Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Buku I tentang Prioritas Nasional. Di dalamnya disebutkan bahwa upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional juga melalui pencapaian prioritas nasional di bidang kesejahteraan rakyat, yang didalamnya termasuk peningkatan *character building* melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan serta revitalisasi gerakan pramuka.

Bappenas bersama-sama dengan Kemenpora dan Kemenkokesra telah pula menggagas Rencana Aksi Nasional (RAN) 2009-2014, untuk bersama-sama dalam berkoordinasi dan bersinergi dalam melakukan pembangunan kepemudaan. Harapannya, RAN dapat digunakan sebagai pedoman dan teknis penyelenggaraan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan pemuda dalam pelaksanaan program sinergi (kemitraan), penyatu visi, misi dan tujuan, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh masing-masing instansi/kementerian/lembaga terkait sebagai stakeholder dan pemangku kepentingan pembangunan kepemudaan.

Dari institusi lainnya komitmen yang ditunjukkan adalah pada sinergi kegiatan-kegiatan, dimana setiap sektor saling mengisi dalam kegiatan masing-masing. Dalam kerjasama-kerjasama ini biasanya diterbitkan MoU antar Kementerian.

4.3.2. Adanya sistem yang dapat mengevaluasi dampak dari kebijakan yang diurusutamakan

Elemen pengarusutamaan yang tak kalah penting adalah adanya sistem untuk mengevaluasi dampak dari kebijakan bersangkutan. Seperti yang telah dilakukan dalam kerangka pengarusutamaan gender, pada dasarnya diperlukan alat analisis yang praktis dan terintegrasi dengan format-format perencanaan, implementasi, monitoring dan evaluasi pembangunan. Menurut Wollman 2003, pemantauan (*monitoring*) adalah prosedur penilaian yang secara deskriptif dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan/atau mengukur pengaruh dari kegiatan yang sedang berjalan (*on-going*) tanpa mempertanyakan hubungan kausalitas. Sedangkan evaluasi merupakan proses analitis menggunakan metodologi sosial-ilmiah untuk melihat apakah sebuah intervensi kebijakan (program, kegiatan) mengakibatkan output atau hasil tertentu (King et al, 1987:17).

Dalam hal ini, RAN sebagai instrumen yang dirancang untuk melakukan koordinasi dan harmonisasi lintas sektor tidak menerbitkan format-format baru dalam melakukan monitoring dan evaluasi, melainkan tetap menggunakan PP No. 39/2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut, pemantauan merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Sedangkan evaluasi merupakan rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) terhadap rencana dan standar.

Selama ini sistem evaluasi yang berjalan adalah evaluasi per unit kegiatan yang dilakukan secara swa kelola, contohnya kegiatan di masing-masing Kementerian/Instansi seperti FIBOP di Kemenpora, pembinaan Karang Taruna di Kementerian Sosial, ataupun kegiatan Remaja Ceria di Disorda Provinsi DKI Jakarta. Namun mekanisme untuk mengevaluasi sejauh mana dampak yang dihasilkan dari sinergi yang dilakukan bersama dengan instansi lain belum ada.

4.3.3. Adanya strategi untuk memaksa/mendorong pelaku administratif agar memberi perhatian dan mengimplementasikan kebijakan yang diurusutamakan

Proses implementasi oleh Van Meter dan Van Horn didefinisikan sebagai:

"...those action by public or private individuals (or group) that are directed at the achievement of objectives set fort in prior policy decision"

Atau

"...tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan"

Menurut Daniel A. Mazmaniah dan Paul Sabatier menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa:

"Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang menyangkut baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat-akibat/dampak nyata dalam masyarakat atau kejadian-kejadian".

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi kebijakan bukan sekedar proses yang terkait dengan para pelaku administratif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kepatuhan pada kelompok sasaran, melainkan juga terkait dengan jaringan dan kekuatan politik, ekonomi, sosial yang baik secara langsung ataupun tidak dapat berpengaruh terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat. Pada akhirnya hal ini akan mempengaruhi dampak yang diperoleh, apakah itu dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Implementasi kebijakan bertujuan agar terdapat pemahaman terhadap apa yang akan terjadi setelah suatu program ditetapkan dan efek yang diakibatkan olehnya. Implementasi kebijakan juga tidak sekedar berhubungan dengan masalah-masalah administratif, tapi juga terkait dengan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan tersebut.

Dalam hal ini, konsep pengarusutamaan memiliki kelemahan dalam implementasinya, yaitu diperlukan kesadaran yang tinggi agar para pelaku administratif mau melaksanakan kebijakan yang diarusutamakan. Hal ini terkait dengan beban kerja yang mungkin sudah cukup tinggi, sehingga merasa berat ketika harus mengurus isu di luar bidang kerjanya. Dengan demikian, pengarusutamaan rawan menjadi kebijakan yang hanya 'kuat di atas kertas' saja, dan bukannya menjadi praktik kebijakan yang punya pengaruh. Untuk itulah diperlukan usaha-usaha dan pemantauan yang berkelanjutan agar dapat menekan para aktor birokrasi yang kerap merasa enggan dan 'overload'.

Strategi yang diusulkan agar para pelaku administratif tergerak dan mau mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan pemuda adalah melalui kebijakan. Kebijakan itu sebaiknya berasal dari pengambil keputusan tertinggi agar pelaksana merasa berkewajiban dalam mengimplementasikannya. Setelah itu baru diturunkan kepada tingkat berikutnya, yaitu menteri, semua kepala lembaga, semua kepala daerah, baik provinsi maupun kota/kabupaten. Namun hal ini harus diikuti dengan sosialisasi dan komunikasi yang intensif untuk menyampaikan tingkat urgensi dari kebijakan tersebut. Yang juga turut berperan adalah adanya tekanan dari masyarakat sendiri, yang ikut meyakinkan pemerintah bahwa isu ini penting dan harus segera dilaksanakan. Dengan demikian akan terbangun opini masyarakat sehingga tekanan menjadi lebih kuat, dari atas dan bawah. Lebih konkritnya dalam masalah pembangunan kepemudaan, diusulkan untuk segera membuat peraturan pelaksana dari UU No. 40 Tahun 2009 agar diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang apa yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak dalam pembangunan kepemudaan. Hal ini juga akan berpengaruh ke tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota), karena untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) diperlukan pijakan payung hukum Peraturan Pemerintah (PP).

Secara teknis, instrumen RAN yang sekarang sedang direvisi juga dapat dilihat sebagai salah satu strategi dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan pemuda. RAN bertujuan memberikan panduan dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan pemuda bagi institusi pemerintah, masyarakat, dan pelaku lain yang bergerak dalam pemberdayaan pemuda, baik pada tataran nasional, provinsi

maupun kabupaten/kota. Dengan dilaksanakannya RAN oleh pihak-pihak terkait diharapkan terdapat peningkatan pemahaman akan pentingnya peran pemuda dalam pembangunan demi terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing global. Selain itu juga akan meningkatkan kemampuan dalam menganalisa potensi pemuda dan menyiapkan sarana penunjang di setiap wilayah, agar (1) mampu menetapkan prioritas penanganan masalah pemuda, (2) mampu memilih program yang tepat dan *cost effective* sesuai kebutuhan lokal, (3) mampu membangun dan memfungsikan lembaga pemuda yang sudah ada, dan (4) mampu memantau dan mengevaluasi pembangunan pemuda. Dengan begitu koordinasi penanganan masalah pemuda secara terpadu juga lebih mudah dilakukan (Kemenpora-Bappenas, 2009).

Sosialisasi lebih luas tentang kebijakan ini dapat pula dilakukan melalui kemitraan. Dengan kemitraan, peluang-peluang kerjasama dibuka lebar, dengan melibatkan berbagai sumber daya yang ada sehingga dapat menjadi corong bagi sosialisasi dan peningkatan kesadaran terhadap pentingnya kebijakan pengarusutamaan pemuda ini. Kemitraan dilakukan dengan membuka hubungan dan kolaborasi baik terhadap dunia usaha/swasta maupun perguruan tinggi untuk bidang riset dan kajian-kajian.

4.4. Syarat Implementasi Kebijakan

4.4.1. Komunikasi

Komunikasi yang dimaksud sebagai syarat implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III adalah pelaksana memahami isi kebijakan sehingga ia tahu persis apa yang harus dilakukan. Hal ini berarti pelaksana memahami maksud, tujuan dan sasaran kebijakan, serta memiliki persepsi dan pemahaman yang benar tentang kebijakan tersebut. Dengan demikian akan mengurangi distorsi implementasi jika kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran. Komunikasi bisa juga berarti sosialisasi atau informasi yang diperoleh tentang kebijakan tersebut.

Kebijakan pengarusutamaan pemuda ternyata masih belum banyak dikenal oleh *stakeholder* Kementerian Pemuda dan Olahraga. Untuk konsep pengarusutamaan

sendiri sudah lebih dahulu dikenal sehubungan dengan Pengarusutamaan Gender (PUG). Tetapi untuk bidang pemuda belum pernah disosialisasikan lebih luas di luar Kemenpora.

“Belum pernah mendengar, baru sekarang. Belum pernah juga mengikuti sosialisasinya (Amin Hudoyo, Disorda Prov. DKI). Mungkin masih wacana, belum pernah mendengar. Setahu saya tentang gender dan perempuan, itu di pemberdayaan perempuan (SD). Nomenklatur pengarusutamaan pemuda baru dengar sekarang (AR)”.

Di Kemenpora sendiri walaupun sudah diadakan sosialisasi tentang pengarusutamaan pemuda, tetap diakui bahwa hal ini adalah inisiatif/kebijakan baru dan memerlukan lebih banyak lagi sosialisasi dan komunikasi.

“Ini merupakan inisiatif baru, masih perlu banyak sosialisasi dan komunikasi. Yang pasti, kebijakan ini akan mendorong unit-unit teknis untuk lebih fokus dan melaksanakan kegiatan lebih baik lagi” (HN).

Masukan lain adalah agar konsep kebijakan pengarusutamaan ini lebih diperjelas dulu tujuan dan alasannya sebelum diluncurkan karena persepsi tiap lembaga akan berbeda-beda, sehingga akan mempengaruhi penerimaan dan sikap terhadap kebijakan tersebut.

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh George C. Edwards III tentang komunikasi, menurut J.A.M. Maarse (dikutip dari Hogerwerf, 1993:157) menyatakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dari sisi komunikasi, yaitu diantaranya kebijakan yang baik harus dapat diketahui dari isi (*contents*) kebijakan secara jelas dan rinci. Hal ini berkaitan dengan tujuan, penetapan prioritas, kebijakan yang khusus dan sumber yang memadai. Selain itu diterimanya pesan secara benar, sehingga para implementator memiliki informasi untuk memainkan perannya.

4.4.2. Sumber Daya

Menurut Edwards III, sumber daya adalah faktor yang penting untuk pelaksanaan kebijakan yang efektif. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila pelaksana kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berupa sumberdaya manusia, yaitu kompetensi pelaksana, jumlah staf yang

cukup, dan sumberdaya finansial. Akibat tidak tersedianya sumber daya yang memadai, maka dapat mendatangkan rintangan terhadap implementasi kebijakan

“Di Kemenpora, usaha-usaha ke arah memperkuat SDM selalu dilakukan, baik dari segi usia maupun kapasitas. Sehingga sekarang lebih banyak (usia) yang muda-muda yang di kementerian ini. Untuk mengikuti perkembangan jaman, kompetensi terus ditingkatkan. Dari segi informasi kita ada website, media center. Fasilitas untuk pemuda kita coba tambah, tahun ini lima(gelanggang pemuda) lagi. Budget kita pun meningkat dari tahun ke tahun”(LW).

Masalah yang masih dirasakan adalah kesulitan data. Idealnya Kemenpora memiliki profil pemuda yang komprehensif sehingga terdapat semacam bank data yang juga bisa dimanfaatkan oleh mitra-mitra Kemenpora. Data juga dibutuhkan sebagai dasar bagi perencanaan dan pembuatan kebijakan, apalagi dengan adanya kebijakan pengarusutamaan pemuda, data sangat bermanfaat untuk melakukan advokasi dan edukasi.

Sebagai bagian dari pelaksana kebijakan, sumber daya yang dimiliki oleh instansi lain yang merupakan *stakeholder* Kemenpora dirasakan masih kurang, baik dari segi jumlah maupun kapasitas. Hal ini akan berpengaruh terhadap implementasi kebijakan nantinya walaupun jumlah SDM yang banyak belum tentu menjamin suksesnya implementasi. Keterampilan SDM juga memegang peranan penting dalam kesuksesan implementasi kebijakan.

“SDM kami masih dalam taraf belajar. Dari aspek jumlah sangat terbatas. Begitu pula dari kapasitas dan kompetensi, juga masih kurang. Pengalaman pekerjaan menjadi penting karena disini mengelola manusia, apalagi usianya masih rawan. Database kami lemah, terutama soal lembaga kepemudaan. Ini menyulitkan pekerjaan juga. Sarana prasarana minim” (AR). Untuk sumber daya, kami tidak bisa terlepas dari kebijakan Pemprov. Kondisinya kami kekurangan tenaga dan kapasitasnya perlu ditingkatkan karena kami harus mencetak generasi yang berkapasitas” (AH).

4.4.3. Disposisi/Sikap

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang

diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika pelaksana memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) disposisi adalah tingkat komitmen dan keterampilan kepemimpinan aparat/pejabat pelaksana terhadap tujuan kebijakan, Komitmen aparat dapat menolak, mendukung atau setengah mendukung tapi juga setengah menolak.

Dalam konteks kebijakan pengarusutamaan pemuda, narasumber umumnya sepakat dan mendukung bahwa diperlukan kerjasama berbagai sektor secara sinergi dan harmonis dalam pembangunan kepemudaan. Namun latar belakang dan motivasi SDM pelaksana juga berpengaruh terhadap sikapnya. Ini dialami daerah di mana Dinas Pemuda dan Olah Raganya baru dua tahun berdiri.

"Banyak staf yang belum mengerti tugasnya karena belum paham mengenai permasalahan kepemudaan dan tidak ada latar belakang kepemudaan. Aspek motivasi kerja kurang, keikhlasan dalam bekerja belum tumbuh, sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari cukup menghambat" (AR).

Pada akhirnya, komitmen aparat pelaksana untuk merealisasikan tujuan yang telah tertuang dalam kebijakan adalah variabel yang paling krusial. Aparat badan pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan selanjutnya merealisasikan prioritas tujuan tersebut .

Dilihat dari kerangka perencanaan, Bappenas belum bisa merekomendasikan kebijakan pengarusutamaan pemuda dalam perencanaan karena belum ada landasan hukumnya.

"Pengarusutamaan (pemuda) nanti menghendaki adanya kepastian hukum, sementara ini belum ada landasan hukumnya. Dalam UU (40) juga tidak disebutkan" (DRR).

Dengan demikian kejelasan aturan pendukung kebijakan bisa mempengaruhi sikap pelaksana. Namun yang perlu menjadi pertimbangan dalam menyikapi hal ini adalah bahwa konsep pengarusutamaan yang diusung oleh Kemenpora ini lebih mengarah kepada adanya perubahan pemahaman dan pola pikir pembuat dan pelaksana kebijakan bahwa pembangunan kepemudaan merupakan hal yang penting dan perlu diprioritaskan dalam setiap tahap dan proses pembangunan.

Sehingga ketika perubahan *mindset* lebih menjadi pertimbangan, maka aturan hukum akan bersifat pendukung walaupun secara legal formal merupakan hal yang tidak dapat diabaikan dalam perencanaan kebijakan.

4.4.4. Struktur

Dalam rangka keberhasilan implementasi kebijakan pengarusutamaan pemuda, dibutuhkan struktur birokrasi yang mendukung. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik. Tantangan adalah bagaimana agar tidak terjadi *beureucratic fragmentation* karena struktur ini menjadikan proses implementasi menjadi jauh dari efektif. Di Indonesia sering terjadi inefektivitas implementasi kebijakan karena kurangnya koordinasi dan kerja sama di antara lembaga-lembaga negara dan/ atau pemerintahan.

Di Kemenpora, struktur yang menangani khusus tentang harmonisasi dan kemitraan berada di kedeputian V, dipimpin oleh seorang Deputi. Menurut Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga No. 193 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deputi V bertugas menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang harmonisasi dan kemitraan. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, Deputi V berfungsi dalam: (a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang harmonisasi dan kemitraan; (b) koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang harmonisasi dan kemitraan; (c) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang harmonisasi dan kemitraan; dan (d) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pemuda dan Olahraga. Di dalam kedeputian ini terdapat Asisten Deputi yang khusus menangani Pengembangan Kemitraan Kepemudaan dan Keolahragaan yang membawahi bidang Pengembangan Kemitraan Lintas Sektoral, bidang Pengembangan Kemitraan Daerah dan bidang Pengembangan Kemitraan Luar Negeri.

Dalam mendukung implementasi kebijakan pengarusutamaan pemuda, Bappenas dan Kemenkokesra dapat memfasilitasi fungsi-fungsi koordinasi dengan kementerian lain. Khususnya untuk kebijakan ini, RAN berfungsi sebagai forum

koordinasi lintas sektor untuk pembangunan kepemudaan. Sedangkan pada instansi lainnya, struktur koordinasi dan harmonisasi ada di Biro Perencanaan/BPKLN.

Di tingkat daerah, dalam rangka koordinasi dan sinergi kegiatan tidak terdapat struktur khusus. Di Disorda Provinsi DKI Jakarta, hubungan dan kerjasama dipegang oleh Humas, di bawah bagian Umum, begitu juga di Dispora Kabupaten Bogor. Sedangkan untuk koordinasi perencanaan program di tingkat daerah struktur yang berhubungan adalah dengan Bappeda, yang salah satu fungsinya adalah dalam pelaksanaan pepaduserasian perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Struktur birokrasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*). Prosedur operasi yang standar menjadi pedoman bagi setiap pelaksana dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang dapat menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel (Subarsono, 2005).

4.5. Faktor Lainnya

Faktor-faktor yang juga diidentifikasi dalam penelitian ini adalah faktor pendukung, faktor penghambat atau kendala, dan faktor kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan pemuda. Faktor pendukung yang utama adalah telah lahirnya UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Undang-undang ini dianggap sebagai payung hukum yang dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan bagi seluruh Kementerian/Lembaga baik di tingkat pusat maupun daerah. Dengan demikian arah dan tujuan serta sasaran pembangunan kepemudaan menjadi lebih jelas lagi. Faktor pendukung kedua adalah harus adanya komitmen yang kuat, baik dari pembuat kebijakan

maupun pelaksana kebijakan lainnya. Komitmen akan tumbuh apabila terdapat kesadaran dan pemahaman akan pentingnya permasalahan ini sehingga timbul kemauan untuk memprioritaskan kepentingan bagi pembangunan kepemudaan. Kesadaran dan pemahaman didapatkan melalui sosialisasi dan komunikasi yang terus menerus dilakukan sehingga pesan tentang pentingnya kebijakan ini dipahami dengan benar oleh berbagai pihak.

Selain faktor pendukung, terdapat pula faktor yang dianggap sebagai penghambat atau kendala dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan pemuda. Faktor penghambat tersebut diantaranya adalah masih terdapatnya ego sektor, yang berpengaruh terhadap lemahnya pola koordinasi. Sebenarnya munculnya ego sektor lebih disebabkan oleh skala prioritas di masing-masing sektor yang masih lebih menonjol. Akibatnya komitmen untuk bersama-sama dalam meningkatkan pembangunan kepemudaan juga rendah karena lebih mementingkan untuk memprioritaskan tugas dan fungsinya masing-masing. Untuk tingkat daerah, faktor penghambat lainnya adalah sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan terutama dari sisi kualitasnya.

Faktor yang dianggap sebagai kunci keberhasilan kebijakan pengarusutamaan pemuda adalah harus adanya aturan/kebijakan pemerintah yang dapat dijadikan pegangan bagi pelaksanaan kebijakan pembangunan kepemudaan lebih jauh. Dalam hal ini, aturan tersebut dapat berupa Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU No. 40 tahun 2009, agar setiap pihak yang berkepentingan dalam pembangunan kepemudaan memiliki arah dan aturan pelaksana yang jelas. Peraturan ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai pengikat komitmen bagi seluruh pihak yang terkait. Dalam penyusunannya, perencanaan yang baik sangat diperlukan, dengan turut memperhatikan kepentingan dan melibatkan pemuda sebagai sasaran dan pelaku pembangunan.

Faktor kunci keberhasilan lainnya adalah kepemimpinan. Karakter kepemimpinan yang kuat diharapkan dapat mendorong dan menggerakkan pihak-pihak terkait untuk berkomitmen dan mau melakukan koordinasi untuk kepentingan bersama. Kepemimpinan ini tidak hanya harus dimiliki oleh pucuk pimpinan tertinggi tapi juga oleh semua lini agar kebijakan ini dapat berjalan dengan mulus.

4.6. Perumusan Strategi

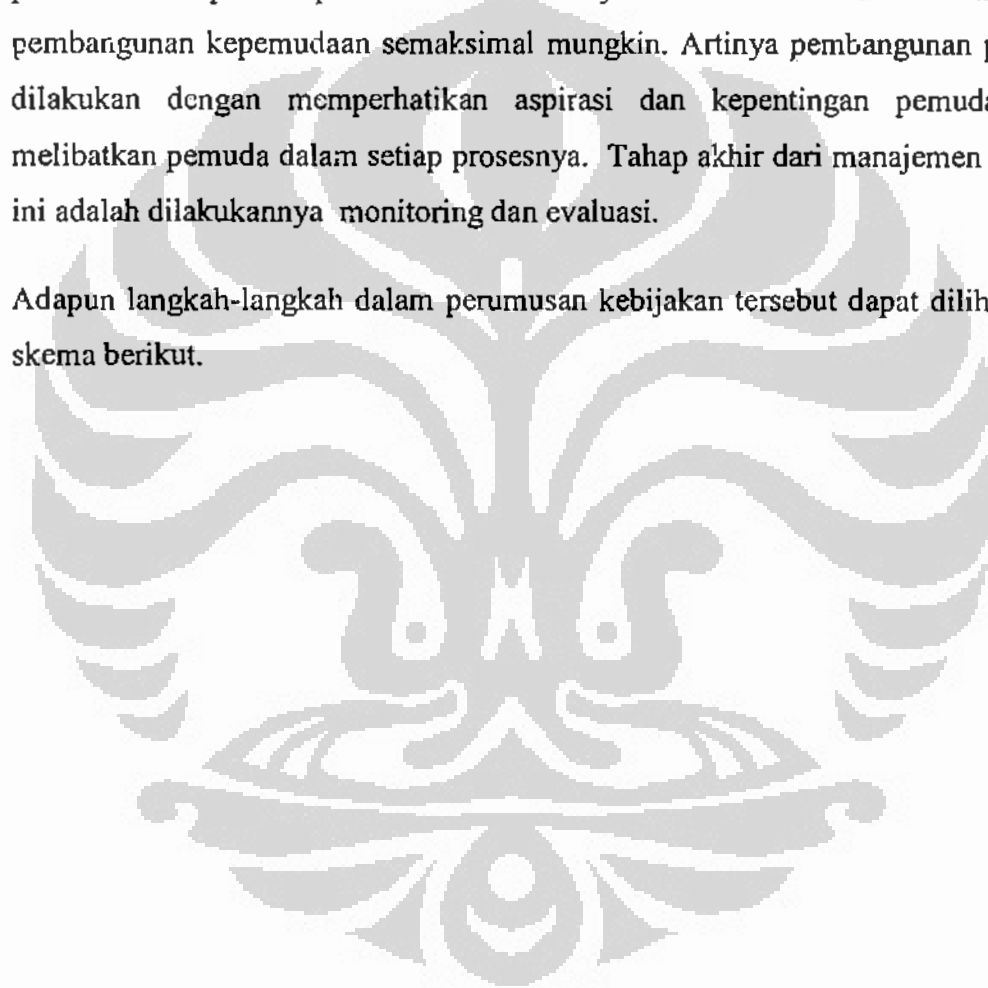
Setelah mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan serta faktor-faktor pendukung, penghambat, maupun faktor kunci berhasil, maka strategi yang diusulkan sehubungan dengan kebijakan pengarusutamaan pemuda adalah perumusan kebijakan yang lebih implementatif untuk mengikat pihak-pihak yang berkepentingan agar mau menerapkan konsep dan kebijakan pengarusutamaan pemuda dalam proses pembangunan. Kebijakan ini merupakan turunan dari UU No. 40 tahun 2009 yang berbentuk Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan ini diharapkan cukup kuat sebagai dasar bagi implementasi kebijakan pengarusutamaan pemuda.

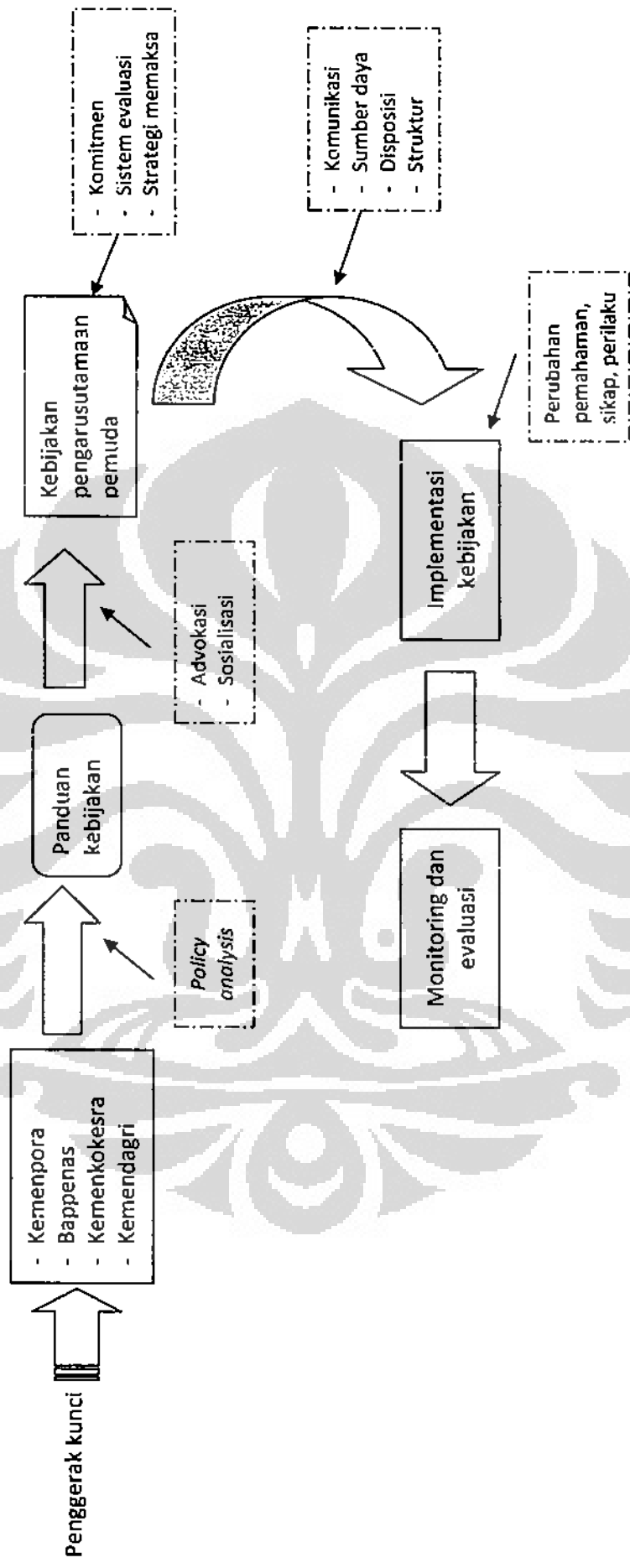
Sebagai langkah awal dalam perumusan kebijakan ini adalah adanya tim penggerak yang berfungsi sebagai tim inti dalam mendorong terbitnya kebijakan ini. Tim ini dibutuhkan karena dalam menginisiasi suatu kebijakan diperlukan sebuah tim yang berfungsi sebagai motor penggerak (*national machineries*) untuk merangkul berbagai pihak dan menggalang dukungan. Tim inti terdiri dari Kemenpora sebagai *leading sector*, Bappenas yang mendampingi dalam perencanaan, Kemenkosra yang berfungsi dalam koordinasi, dan Kemendagri yang akan mengawal implementasi sampai ke tingkat daerah. Selanjutnya tim ini akan merumuskan panduan kebijakan dengan melakukan berbagai analisis kebijakan (*policy analysis*). Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah advokasi dan sosialisasi kepada *stakeholder*. Tujuannya agar terjalannya komunikasi dan tersampainya tujuan kebijakan kepada berbagai pihak.

Tahap selanjutnya adalah ditetapkannya kebijakan pengarusutamaan pemuda. Pada tahap ini dapat diidentifikasi komponen kunci yang merupakan syarat agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik, yaitu adanya komunikasi yang baik kepada semua pihak agar kebijakan ini dapat tersosialisasi; sumber daya yang memadai meliputi sumber daya manusia (kapasitas dan jumlah), tersedianya sarana dan prasarana, data dan informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, serta dana yang mencukupi; disposisi/sikap pelaksana yang

mendukung kebijakan; dan adanya struktur atau standar operasional prosedur agar kebijakan ini dapat terlaksana. Kemudian dilanjutkan dengan tahap implementasi, diindikasikan dengan adanya perubahan pemahaman, sikap dan perilaku dari pembuat dan pelaku kebijakan. Perubahan pemahaman, sikap dan perilaku tersebut diharapkan terjadi dalam setiap proses dalam siklus pembangunan, yaitu dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada monitoring dan evaluasi. Perubahan yang dimaksud adalah perubahan pola pikir bahwa pembangunan pemuda merupakan prioritas serta adanya kemauan untuk melaksanakan pembangunan kepemudaan semaksimal mungkin. Artinya pembangunan pemuda dilakukan dengan memperhatikan aspirasi dan kepentingan pemuda serta melibatkan pemuda dalam setiap prosesnya. Tahap akhir dari manajemen strategi ini adalah dilakukannya monitoring dan evaluasi.

Adapun langkah-langkah dalam perumusan kebijakan tersebut dapat dilihat pada skema berikut.





Gambar 10. Manajemen Stratejik Kebijakan Pengarusutamaan Pemuda
(Diadaptasi dari berbagai sumber)

Halaman ini dibiarkan kosong



BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian tentang Strategi Kebijakan Pengarusutamaan Pemuda yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

5.1. Kesimpulan

1. Dengan mempertimbangkan berbagai masukan, baik dari sisi konteks, pelaku, konten kebijakan, maupun dari sisi perencanaan pembangunan nasional, maka konsep kebijakan pengarusutamaan pemuda dapat dirumuskan sebagai:

“Suatu strategi yang mengikat setiap pihak untuk berkomitmen dalam memprioritaskan pembangunan kepemudaan dalam setiap proses pembangunan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai kepada monitoring dan evaluasi, yang dilakukan secara koordinatif, sinergi, dan harmonis”.

2. Setelah mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan serta faktor-faktor pendukung, penghambat, maupun faktor kunci berhasil, maka langkah yang diusulkan sehubungan dengan strategi kebijakan pengarusutamaan pemuda adalah menyusun perumusan kebijakan yang lebih implementatif untuk mengikat pihak-pihak yang berkepentingan agar mau menerapkan konsep dan kebijakan pengarusutamaan pemuda dalam proses pembangunan. Kebijakan ini diharapkan berbentuk Peraturan Pemerintah, yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 40 tahun 2009.

Manajemen strategi kebijakan pengarusutamaan pemuda dimulai dari menetapkan tim kunci yang berfungsi sebagai motor penggerak dalam merumuskan panduan kebijakan pengarusutamaan pemuda. Tim ini memberikan masukan berupa analisis kebijakan dalam rangka penyusunan kebijakan pengarusutamaan pemuda, seiring dengan dilakukannya advokasi dan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. Setelah ditetapkannya

kebijakan, agar implementasinya dapat berjalan dengan baik harus memperhatikan komponen komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur, sehingga diharapkan adanya perubahan pemahaman, sikap dan perilaku dari pembuat dan pelaksana kebijakan. Tahap akhir dari strategi ini adalah dilakukannya monitoring dan evaluasi untuk melihat apakah kebijakan berjalan dengan baik.

5.2. Saran

Berdasarkan penarikan kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga, agar kebijakan pengarusutamaan ini dapat diimplementasikan dengan baik, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu:
 - a. Komunikasi: sosialisasi dan komunikasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi/kabupaten/kota harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat kebijakan pengarusutamaan pemuda ini adalah hal yang baru.
 - b. Sumber daya: kapasitas sumber daya pelaksana kebijakan harus lebih diperkuat, baik dari sisi motivasi maupun pemahaman terhadap tugas dan fungsi. Penataan database kepemudaan harus ditingkatkan sebagai modal dasar untuk penyusunan kebijakan.
 - c. Disposisi: kebijakan ini harus didukung oleh sikap pelaksana
 - d. Struktur: harus adanya struktur birokrasi dan standar operasi prosedur yang mendukung terlaksananya kebijakan ini.
 - e. Kepemimpinan: implementasi kebijakan ini tidak terlepas dari peran pemimpin yang mengarahkan dan menjadi pedoman bagi pelaksana di bawahnya.
2. Perlunya penelitian lanjutan untuk melihat implementasi kebijakan ini apabila peraturannya telah ditetapkan.

DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, edisi 1. Jakarta: Granit, 2004
- Bappenas. *Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Buku I Prioritas Nasional*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2010.
- _____. *Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Buku II Memperkuat Sinergi Antarbidang Pembangunan, BAB I Kebijakan Pengarusutamaan dan Lintas Bidang*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2010.
- Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Second Edition. University of Nebraska Lincoln: Sage Publications, 2003.
- Dunn, William N. *Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit PT. Hanindita, 1988.
- Hubeis, Musa & Mukhamad Najib. *Manajemen Strategik dalam Pengembangan Daya Saing Organisasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
- Hunger, David J & Thomas L Wheelen. *Manajemen Strategis (terjemahan)*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 1996.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Rencana Aksi Nasional (RAN) Kepemudaan 2009-2014*. Jakarta: 2009.
- Kuncoro, Mudrajad Ph.D. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- Mustopadidjaja R.A. *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: LAN, 2003.

Silawati, Hartian. *Pengarusutamaan Gender, Mulai Dari Mana?*. Jurnal Perempuan No. 50. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan No. 50, November 2006.

Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Wahab, Abdul S. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi, Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.

Tesis:

Budiyanto. *Pengembang Strategi Pemberdayaan Kader Kewirausahaan Pemuda pada Kementerian XYZ*. Tesis pada Program Pascasarjana, Program Studi Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia. Jakarta, 2009.

Laporan dan Makalah:

Kurniawan, Teguh. *Perumusan Kebijakan Publik: Sumbang Saran Pemikiran dari Berbagai Perspektif Teori yang Ada*. Materi yang disampaikan pada kegiatan "Penyusunan Pedoman Perumusan Kebijakan", Jakarta: Lembaga Administrasi Negara (LAN), Februari 2010.

Staf Ahli Menteri Bidang Pengarusutamaan Pemuda dan Olahraga. *Kajian Pengarusutamaan Pemuda dan Olahraga*. Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga, 2010.

Jurnal:

Fischer, Frank, Gerald J. Miller and Mara S. Sidney (Eds.). *Handbook of Public Policy Analysis: Theory, Politics and Methods*, Boca Raton: CRC Press, 2007

Haugstad, Bjorn. *Strategy Theory – A Short Review of the Literature*. KUNNE Nedtegnelse N 02/99, SINTEF Industrial Management: 1999.

Kidner, Camilla & Stephen Curtis. *Mainstreaming Equality Issues*. SPICe Briefing. The Scottish Parliament: 5 August 2003.

Peraturan Perundangan:

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

Dokumen lain:

- Bappenas. *Executive Summary Background Study dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 Bidang Pemuda*. Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Bappenas. 17 Februari 2011. <<http://kppo.bappenas.go.id/files/ringkasan-eksekutifbidang-pemuda%202010-2014.pdf>>.
- Sukirno. 2008. *Strategi Pendidikan Tinggi Indonesia Dalam Menghadapi Pasar Bebas*. 1 April 2011. <<http://sukirnoukiblogspot.blogspot.com/?zx=7e488bc040157951>>.
- Picciotto, Robert. The World Bank, 2002. *The Logic of Mainstreaming, A Development Evaluation Perspective*1. SAGE Publications [1356–3890 (200207)8:3; 322–339; 027743] Vol 8(3): 322–339. 1 April 2011. <http://www.stes-apes.med.ulg.ac.be/Documents_electroniques/EVA/EVA-GEN/ELE%20EVA-GEN%207564.pdf>
- Mainstreaming concepts, key ideas, and strategies. 2 April 2011. <<http://www.gtz.de/de/dokumente/en-SVMP-mainstreaming.pdf>>.
- 10 Februari 2011. <<http://www.jurnalnasional.com/show/newspaper?rubrik=Kesra&berita=132843&pagecomment=1>>.
- Manajemen Stratejik dan Manajemen Kinerja pada Sektor Publik*. Hamka. 2005. *Jurnal Administrasi Publik* Volume 1 No. 4 Desember 2005. 31 Maret 2011. <<http://jurnal.pdff.lipi.go.id/admin/jurnal/1405175187.pdf>>.
- Menakertrans Targetkan 247 Juta Orang dapat Kerja. 22 Februari 2011. <<http://visijobs.com/beta/news/detail/2011/02/22/Menakertrans-Targetkan-247-Juta-Orang-Dapat-Kerja>>
- Geyer, Robert Dr. *Does Mainstreaming Lead to Deepening? The Contradictions of Mainstreaming EU Social Policy*. Paper presented to the workshop, “Enlarging or Deepening: European Integration at the Crossroads”, ECPR Joint Sessions, Mannheim, Germany, 26-31 March 1999. 25 Maret 2011. <<http://www.essex.ac.uk/ecpr/events/jointsessions/paperarchive/mannheim/w27/geyer.pdf>>.
- Hambrick, Donald C. and James W. Fredrickson. 2005. *Are You Sure You Have Strategy?* *Academy of Management Executive* 2005, , Vol. 19 No. 4. 1 April 2011. < [http://www.nwcor.com/NWCOR/Content/Readings/Chapter %2013-%20Strategy-%20AME%20Classic.pdf](http://www.nwcor.com/NWCOR/Content/Readings/Chapter%2013-%20Strategy-%20AME%20Classic.pdf) >.

Halaman ini dibiarkan kosong

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Nama Narasumber :

Jabatan :

Hari/Tanggal wawancara :

Pertanyaan penelitian:

1. Bagaimanakah konsep pengarusutamaan pemuda?
 2. Bagaimanakah strategi kebijakan pengarusutamaan pemuda sebagai bagian dari pembangunan kepemudaan?
-

Panduan wawancara Konsep dan Strategi Pengarusutamaan Pemuda
Konsep kebijakan Pengarusutamaan Pemuda (dilihat dari konten dan konteks kebijakan)

1. Menurut Anda, bagaimana pembangunan kepemudaan di Indonesia?
2. Menurut Anda, sejauh mana pentingnya pembangunan kepemudaan dalam mendukung pembangunan nasional?
3. Bagaimana menurut Anda permasalahan utama dalam pembangunan kepemudaan? Apa penyebabnya?
4. Siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan dalam permasalahan pembangunan kepemudaan? Bagaimana bentuk pelibatan para pihak dalam menghadapi permasalahan pembangunan kepemudaan? Pihak mana yang sebaiknya berperan sebagai *leading sector*?
5. Bagaimana pendapat Anda tentang konsep pengarusutamaan jika dibawa ke dalam konteks pembangunan kepemudaan?
6. Bagaimana bentuk komitmen yang harus dimiliki oleh instansi terkait dalam rangka kebijakan pengarusutamaan pemuda?
7. Bagaimana bentuk sistem yang harus dibangun agar kebijakan pengarusutamaan pemuda ini dapat dievaluasi? (termasuk apakah harus ada peraturan yang mengikat semua pemangku kepentingan)

8. Bagaimana strategi dan langkah-langkah yang harus dijalankan agar pelaku kebijakan mau mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan pemuda?

Faktor-faktor yang berpengaruh dalam Implementasi kebijakan (George C. Edward III)

1. Komunikasi

- a. Bagaimana pemahaman Anda tentang konsep/kebijakan pengarusutamaan pemuda/*youth mainstreaming* sebagai kebijakan sinergi lintas sektor dalam menghadapi permasalahan pembangunan kepemudaan?
- b. Informasi apa yang Anda ketahui tentang konsep/kebijakan tersebut? (Definisi, maksud, tujuan, manfaat, pelaku)
- c. Sosialisasi seperti apa yang pernah Anda ikuti tentang konsep/kebijakan tersebut? Siapa yang mengadakan sosialisasi tersebut, kapan, berapa kali?
- d. Menurut Anda, apakah konsep/kebijakan ini perlu lebih sering disosialisasikan/dikomunikasikan? Mengapa?

2. Sumber daya (staf yang cukup dari jumlah dan mutunya, informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan)

- a. Menurut Anda, bagaimana kemampuan sumberdaya manusia/staf yang melaksanakan kebijakan ini? Bagaimana bila dilihat dari segi jumlah dan kapasitasnya?
- b. Bagaimana ketersediaan informasi yang mendukung guna terlaksananya kebijakan ini? (informasi tentang cara pelaksanaan kebijakan ini, termasuk data penunjang)
- c. Bagaimana bentuk kewenangan dalam tugas dan tanggungjawab agar kebijakan ini dapat diterapkan?
- d. Bagaimana ketersediaan fasilitas pendukung yang diperlukan? (kantor, peralatan, dana)

3. Disposisi/sikap birokrasi atau pelaksana (komitmen pelaksana terhadap program)
 - a. Bagaimana sikap Anda terhadap kebijakan ini? Alasannya?
 - b. Bagaimana persepsi Anda tentang kebijakan ini?
 - c. Bagaimana komitmen Anda dalam rangka terwujudnya kebijakan ini? Bagaimana bentuknya?
 - d. Bagaimana sikap Anda apabila UU No. 40 tentang Kepemudaan diimplementasikan ke dalam Peraturan Pemerintah untuk mengatur pengarusutamaan pemuda dalam rangka sinergi lintas sektor pembangunan kepemudaan? Alasannya?
4. Struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi (*standard operating procedure* yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan)
 - a. Bagaimana struktur birokrasi yang dibutuhkan agar kebijakan ini bisa diterapkan?
 - b. Bagaimana penerapan kebijakan ini dalam siklus pembangunan
 - c. Apa kendala yang mungkin dihadapi dalam mewujudkannya? Bagaimana solusinya?
5. Faktor lain
 - a. Menurut Anda apa yang akan menjadi penghambat dan pendukung kebijakan ini secara umum?
 - b. Faktor apa yang paling penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini? (Faktor kunci keberhasilan) Alasannya?
 - c. Apakah ada masukan lain sehubungan dengan kebijakan pengarusutamaan pemuda ini?

Lampiran 2. Hasil Coding Wawancara

ASPEK	RANGKUMAN
KONSEP	
Konteks pembangunan kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kemempora mendorong K/L lain agar menjadikan isu pemuda sbg prioritas, juga bagi masyarakat umum dan swasta (stakeholder) - Regulasi/UU 40 agar tidak sekedar dijalankan oleh Kemempora tetapi semua pihak - Provinsi (DKI Jakarta) lebih mantap dalam melakukan pembangunan kepemudaan karena sudah ada pegangan regulasi sebagai payung hukum. - Peran pemuda sangat strategis dalam pembangunan sehingga perlu perhatian khusus dalam penanganannya - Penjelasan Prof. Nila lebih menekankan pentingnya pembangunan kepemudaan dilihat secara holistic dan tidak sewaktu saja (cross sectional). Sehingga pendekatan pembangunan kepemudaan lebih kepada pembangunan SDM yang berkualitas, yang dimulai sedini mungkin dari manusia masih bayi, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan yang berkualitas. Hal ini akan berpengaruh pula terhadap pemuda sebagai SDM yang memiliki kapasitas dan daya saing yang tinggi. Penekanan juga terhadap kualitas perempuan, yang harus memiliki informasi dan pendidikan yang baik sebagai pengambil keputusan di tingkat keluarga. Dengan demikian diharapkan rantai kemiskinan yang menjadi biang dari masalah pembangunan (kepemudaan) bisa diatasi. Untuk itu diperlukan peran lintas sektor, terutama kesehatan dan pendidikan sebagai dasar jika ingin memiliki kualitas pemuda spt yg diinginkan. Kapasitas perencana dan birokrasi juga harus baik, agar mereka mengerti pokok permasalahannya dan tepat dalam melakukan perencanaan. - Secara konten bisa dilihat lebih lengkap dalam UU 40/2009, penting karena mendukung pembangunan SDM.
Masalah utama yg ditemukan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan karakter pemuda sebagai dasar perilaku mental, mengingat pentingnya peran strategis pemuda - Pola koordinasi antar kementerian dan instansi terkait masalah kepemudaan (sinergi kemitraan)

ASPEK	RANGKUMAN
Leading sector	- Kemenpora sebagai penggerak, diikuti K/L lain
Pihak-pihak terkait	<ul style="list-style-type: none"> - K/L lain yang memiliki program/kegiatan kepemudaan seperti Kemensos, TNI, Kementerian Kelautan Perikanan dll, karena banyak hal2 teknis yang juga tidak dikuasai oleh sektor pemuda. - KL dgn fungsi koordinasi, sesuai dengan kelompok koordinator
Bentuk pelibatan	<ul style="list-style-type: none"> - Secara teknis, terutama dalam kegiatan-kegiatan yang memerlukan peran serta sektor lain, baik sebagai narasumber maupun mitra penyelenggara kegiatan. - Dalam RAN sebagai forum koordinasi
Konsep pengarusutamaan	<ul style="list-style-type: none"> - Di seluruh kementerian dan lembaga agar memasukkan pemuda sebagai salah satu bidang yang dianggap penting untuk pembangunan. - Masalah kepemudaan tidak hanya menjadi urusan Kemenpora tetapi semua stakeholder diharapkan memberikan perhatian - Di tingkat Provinsi, belum mengenal secara nomenklatur pengarusutamaan pemuda, tetapi setuju bahwa pembangunan kepemudaan harus dilakukan lintas sektor dengan koordinasi yang baik. - Masukan Bappenas harus jelas dulu apa tujuan pengarusutamaan itu. Dalam hal ini tidak bisa seperti PUG karena tidak ada masalah yg harus disetarakan. Jadi masukannya, lebih baik konsep pengarusutamaan difokuskan pada bidang2 tertentu seperti kewirausahaan atau kepemimpinan. - Masukan KemenPPPA bahwa <i>mainstreaming</i> lebih kepada perubahan <i>mindset</i> pembuat dan pelaku kebijakan
ELEMEN PENGARUSUTAMAAN	
Komitmen	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen harus terlihat melalui adanya kegiatan2 yang memprioritaskan pemuda di setiap K/L setiap tahunnya, memasukkannya ke dalam Renstra tahunan kaitannya dengan perencanaan nasional. - Komitmen hrs dibangun melalui sosialisasi dan komunikasi, baik formal maupun informal. - Bappenas berkomitmen utk koordinasi dan sinergi

ASPEK	RANGKUMAN
	<p>melalui inisiatif RAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemenkokesra berkomitmen dalam membawa isu ini mulai dari tingkat kedeputian samap tingkat Presiden bila diperlukan.
Sistem untuk evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - Secara formal belum ada, baru evaluasi per kegiatan saja (hal ini terjadi di tingkat pusat maupun provinsi/kab.), baik tentang materi maupun pelaksanaan kegiatan. Evaluasi keseluruhan mengenai dampak belum dilakukan. - Bappenas: RAN sebagai instrument untuk mengetahui sejauh mana instansi dan lembaga melaksanakan pembangunan yg targetnya pemuda. - SPM (masih dirancang) - NSPK (tingkat kabupaten/kota), baru dibuat 3
Strategi yang dijalankan	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenpora sedang menggodog aturan pelaksana yaitu RPP Kewirausahaan dan Lembaga permodalan pemuda sebagai salah satu bentuk implementasi UU 40. - Karena tidak bisa berjalan sendiri2, perlu aturan yang mengatur peran pihak2, sampai ke tingkat provinsi/kab./kota. Dengan demikian keterkaitan antar instansi ada kejelasan dan tidak terjadi tumpang tindih - Harus ada grand design pembangunan kepemudaan, supaya ada kejelasan mau dibawa kemana pembangunan kepemudaan kita. - Dengan menjalankan RAN sebagai forum koordinasi - Harus ada PP/Perpres/Inpres sebagai turunan UU tentang koordinasi dan sinergi - Kemitraan
SYARAT IMPLEMENTASI	
Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi UU 40 sebagai langkah awal, tidak secara spesifik pengarusutamaan pemuda. - Tingkat provinsi belum pernah ada sosialisasi ttg pengarusutamaan pemuda dan jika ingin digulirkan perlu dilakukan sosialisasi - Bappenas belum mendengar ttg pengarusutamaan pemuda, tetapi dalam konteks koordinasi dan sinergi sosialisasi dan komunikasi selalu dilakukan
Sumberdaya	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenpora memiliki keterbatasan anggaran dalam

ASPEK	RANGKUMAN
	<p>melakukan sosialisasi langsung sampai ke tingkat kabupaten kota</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ditingkat provinsi, anggaran dibatasi kebijakan perprov shg SDM juga terbatas. Peningkatan kapasitas SDM juga dibutuhkan dgn alasan akan mencetak SDM yg berkapsitas tinggi juga. - Jalur informasi di tingkat Prov. (DKI) perlu ditingkatkan krn sering lambat diterima. Data biasanya diambil melalui BPS dan Sudin2 sampai tingkat kecamatan dan hal ini juga terbatas karena keterbatasan tenaga. Fasilitas khusus pemuda di tingkat Prov belum ada, selama ini lebih ke fasilitas olahraga dan remaja, dimana kegiatan kepemudaan menumpang disitu. - SDM di Bappenas utk kepemudaan masih kurang. Data dan informasi selalu diupdate karena
Sikap/Disposisi	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Prov mendukung kebijakan ini nanti karena memang tidak bisa berjalan sendiri, asal ada sosialisasi dan komunikasi yg jelas. - Bappenas belum bisa merekomendasikan pengarusutamaan pemuda dalam perencanaan karena landasannya belum ada, juga tidak ada di UU 40.
Struktur	<ul style="list-style-type: none"> - Dalam penyelenggaraan urusan pemuda di daerah, diselenggarakan berdasarkan NSPK (PP38/2007), tetapi Kemenpora baru membuat 3 jenis NSPK. - Di tingkat Prov. untuk lintas sektor tidak ada yg menangani khusus, biasanya melalui humas (dibawah bagian Umum). - Dari Bappenas bisa mendukung secara struktur untuk adanya koordinasi dan sinergi karena masuk pd fungsi manajemen
Faktor pendukung	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah adanya UU 40 sebagai modal utama dan payung hukum pijakan, tidak hanya bagi Kemenpora tetapi bagi semuanya. - Sarana prasarana harus mendukung, infrastruktur harus bagus
Faktor penghambat/kendala	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya komitmen K/L lain dalam masalah kepemudaan karena skala prioritas. - Ego sektoral - Belum punya design yang terkoordinasi baik dengan kemenegpora, masih jalan masing-masing. - Lemah dalam sosialisasi

ASPEK	RANGKUMAN
	<ul style="list-style-type: none"> - Secara input masih kurang bagus, kurang banyak, Pembina pemuda juga masih kurang kualitasnya, iklim dan lingkungan belum mendukung. - Tidak adanya landasan hukum pengarusutamaan pemuda - Perlu persamaan persepsi tentang kepentingan ini
Faktor kunci keberhasilan	<ul style="list-style-type: none"> - Komitmen dan kesadaran pentingnya pembangunan kepernudaan - Kepemimpinan, karena masyarakat kita masih paternalistic, mengikuti pemimpinnya - Ada regulasi yang baik dan benar, penganggaran yg tepat dan perencanaan juga harus tepat, dan melibatkan pemuda.
Masukan lain/ penekanan	<ul style="list-style-type: none"> - Penting membuat aturan agar bisa dijalankan sampai ke tingkat bawah. - Pemimpin harus memiliki konsep yang bagus agar bisa diikuti oleh semua. - Kemenpora harus proaktif melakukan koordinasi dgn KL dan instansi terkait tentang kepemudaan. - Setiap pihak harus konsisten melaksanakan UU - Adanya keberlanjutan dalam membangun SDM

Lampiran 3. Transkrip Wawancara dengan Informan

Agus Ridallah

Kasie. Pemberdayaan Pemuda Dispora Kab. Bogor

Tanggal wawancara: 26 Mei 2011

Bagaimana menurut bapak itu pembangunan kepemudaan di Indonesia seperti apa sekarang. (D)

Sebetulnya yang namanya pembangunan pemuda itu menjadi tugas semua ya. Dalam artian, tidak hanya pemerintah. Dan masyarakat juga punya kewajiban begitu. masyarakat dalam artian dari lembaga-lembaga kepemudaan, KNPI, OKP, melakukan hal yang sama untuk masalah pemuda. Hanya kalau saya melihat bahwa persoalan yang paling dasar itu adalah bahwa memang sinergi yang dibangun. Kan gitu. Yang dibangun dengan terlahirnya sekarang kementerian pemuda dan olahraga, koordinasi dengan berbagai departemen, itu belum nyambung. Kalau saya lihat kenapa, jadi saat ini dari berbagai departemen mereka punya program kepemudaan. Kan gitu. Dengan berbagai judul literature, ada yang sama, ada yang berbeda. Tapi sebetulnya itu fungsinya adalah biasanya kepemudaan, gitu. Pusatnya butuh banyak mereka yang program-program kepemudaan. Nah yang saya lihat, kementerian pemuda dan olahraga belum mampu menyatukan. Jadi sinerginya gimana? Apalagi tingkat kabupaten kota. Yang sama. Baru. Kita baru berdiri itu tahun 2009 ya. Jadi praktis kita baru 2 tahun lewat 5 bulan. Karena 2009 itu kan kita belum punya program. Baru tahap konsolidasi. Baru 2010 kita punya program. Nah setelah di dinas ini, yang pertama dari aspek program, pemerintah kecenderungannya lebih ke olahraga. Itu dibuktikan dengan penganggaran. Anggaran untuk olahraga begitu besar walaupun kepada sarana ya, sarana olahraga. Pembangunan gedung, timpang banget kalau untuk olahraga bisa mencapai 70%, 30% pemuda. Malah lebih, 80% untuk olahraga. Kenapa? Karena pemerintah dalam hal ini pemangku kebijakan belum sepenuhnya menganggap pemuda itu penting. Kenapa? Karena tidak terukur. Sulit mengukurnya kan? Kalau bangun fisik kelihatan. Kita punya uang 5 miliar, bangun GOR. Jelas kan? Fisiknya ada. Dilihat oleh masyarakat. Tapi kita punya 1000 pemuda, kita latih. Masalah kepemimpinan, seminggu. Misalkan, habis 500 juta. Tidak terlihat kan? Kita hanya bisa mendidik dia pada saat itu, bagaimana dia supaya terbaik, dia bisa benar, yang tadinya tidak pernah sholat menjadi sholat, yang tidak bisa buat proposal bisa jadi buat proposal, yang tidak bisa memimpin sidang jadi bisa memimpin sidang, yang tidak mempunyai keberanian untuk memimpin menjadi berani memimpin. Setelah keluar dari situ kan tidak berwujud kan, semua adanya di mindset masing-masing ya. Yaitu, sehingga mungkin pembangun-pembangun kebijakan belum menganggap, bukan belum menganggap ya. Yaitu tadi tidak terlalu penting. Masih lebih penting kita bangun Rumah Sakit, kita bangun sarana untuk kepentingan masyarakat, bikin jalan, kan gitu. Nah ini, padahal kalau kita tahu bahwa pembangunan pemuda itu sangat penting. Kenapa? Ketika generasi sudah tua-tua ini selesai, penggantinya akan sulit. Iya kan? Apalagi kepemimpinan kan? Kepemimpinan itu kan dipersiapkan. Di pusat ada 18 kementerian yang menyelenggarakan kegiatan kepemudaannya. Dan itu tidak sinergi. Dengan kementerian pemuda dan olahraga yang punya pemudanya, gitu. Gak kan? Gak sinergi kan? Mereka masing-masing saja tidak

ada kaitan hukumnya. Hanya saja double-double kan? Padahal kan pengambilan pemuda pada akhirnya kembali lagi misalnya dia di propinsi, propinsi minta kabupaten, kabupaten masih minta kecamatan, atau bisa ke OKP. Basicnya itu di kabupaten kota. Tetep aja ke desa-desa juga, gitu.

Bagaimana bentuk-bentuk pelibatan para pihak lebih konkritnya ?(D)

Jadi begini. Kalau kita bicara keterlibatan, masing-masing. Kan begini, masing-masing lembaga kepemudaan, kalau pemerintah prinsipnya kalau kita ngelola gini mbak, kita itu ngelola semua pemuda. Baik yang terhimpun di organisasi kepemudaan maupun yang tidak. Baik yang nakal maupun yang tidak nakal. Dari OKP sama dari kecamatan. Trus melibatkan KNPI, OKP, sama kecamatan. Nah disini, kenapa ini penting? Karena saya sudah 2 tahun memperjuangkan supaya ada pelatihan pemuda disini, karena rekeningnya ada, di UU juga diamanatkan, tapi di bappeda selalu mentah. Kenapa? Karena ada di dinas tenaga kerja. Dinas tenaga kerja punya program pelatihan ketrampilan kewirausahaan itulah yang berbau-bau ketrampilan, kewirausahaan. Kepemimpinan penting, tapi lebih penting lagi bagaimana pemuda bisa bekerja.

Jadi sebenarnya masalah utama banyak juga ya pemuda (D)

Sangat banyak. Jadi persoalannya sekarang bahwa ternyata mindset pemuda kita. Kecil sekali mereka yang ingin jadi pengusaha. Itu ternyata yang menjadikan ternyata itu mindset kan. Sulit. Padahal bagaimana mungkin orang bisa jadi kaya sejahtera, kalau hanya bekerja.

Jadi kira-kira menurut bapak konsep pengarusutamaan ini bisa ya kalau dibawa ke dalam, maksudnya dimasukkan ke dalam pembangunan nasional kita (D)

Bisa, karena kita sudah punya UU. Di UU itu sudah dijelaskan tujuan pembangunan kepemudaan apa, apa yang akan kita bangun. Kan 3 ya, kalau saya lihat disitu. Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan. Tiga substansinya. Jadi sebetulnya dengan adanya UU tersebut mestinya ini sudah bisa kita jadikan dasar untuk penyelarasan itu. Yang tadi disebutkan. Hanya memang kita perlu ada sebuah komitmen yang tegas bagi pimpinan. Sebetulnya gongnya di pusat sebenarnya dalam artian konsep seperti itu dikeluarkan dari pusat sehingga daerah mengikuti, karena kalau mengandalkan daerah sulit karena jangkauan pemikirannya belum sampai kesana. Mendengar kabupaten kota lain, mbak. Ada bidang pemuda yang tidak punya anggaran. Bayangin, mbak kalau periksa ya, daerah-daerah lain, jangankan kegiatan, anggarannya gak punya. Makanya saya kalau kabupaten bogor ya cukup luar biasa ya gitu kalau dibandingkan dengan daerah lain. Yang mana sangat terbatas sekali. Kedua, mereka belum mandiri. Belum menjadi dinas. Tapi mereka masih nempel bergabung dengan disdik, bergabung dengan pariwisata, gabung dengan perhubungan. Jadi hanya beberapa kabupaten kota yang sudah dinas belum semua ya, karena memang ternyata itu kan memang dikawal juga.

Jadi itu memang mencerminkan komitmen ya terhadap pengembangan kepemudaan (D)

Jadi dari awal, tidak makanya waktu saya meperoleh dari kabupaten-kecamatan lain yang mereka kan tidak dikawal. Mereka kan di dispora. Yang salah, satu

orang yang tidak aktif akan beda dengan yang aktif di kepemudaan. Orang yang bukanaktif di kepemudaan akan beda cara ngelolanya, dgn yg aktif.

Kalau dari dispora sendiri berarti bentuk komitmen yg harus diperjuangkan salah satunya apa, selain itu. Mungkin anggaran tadi ya (D)

Ya. Anggaran pemuda. Jangan terlalu jauh dengan olahraga. , sekarang jomplang, malah gak nyampe kalikalau gak 80:20 ininya. Kalau gak 90:10. Ini juga. Kalau pimpinan kan berpikrannya, 5 tahun membangun pemuda tidak akan cukup. Itu masalahnya, prioritasnya kurang. Saya berpikir begini, kita bangun dulu infrastruktur, pembangunan kepemudaan mengikuti, gitu aja sekarang.

Bagaimana sistem yg harus dibangun agar kebijakan bisa menjadi prioritas dan arus utama (D)

Membangun pemuda itu kan tidak seperti membangun GOR, bisa langsung dilihat, dirasakan. MEMbangun mental perlu waktu, investasi jangka panjang. Tapi bukan berarti tidak penting. Yang harus dibenahi adalah strategi di program2 ke depan di dispora. Kedua dalam hal ini pemerintah harus ...kebijakan, terutama program2 kepemudaan ini harus diberikan porsi yg cukup layak, tidak terlalu minim. Program sudah bagus, tapi sampai di Bappeda jatahnya cuma sekian, alasannya sudah pagu, kita tidak bisa apa2, karena utk RS, jalan dll.

Apa saja strategi atau langkah2 agar pelaku kebijakan mau komitmen, instruksi pusat atau apa yg mengikat (D)

UU sendiri belum ada PPnya jadi mestinya memang. Di kita harus diakui sekarang pembangunan kepemudaan masih belum bagus, UU sudah punya, aplikasinya masih belum, harus mikir ke depannya spt apa.

Mungkin ada suatu bentuk peraturan yg mengikat (D)

PP harus dibuat dulu, bagaimana mungkin mau bikin perda kalau PPnya belum ada. UU kan masih global, perlu disusun perda, dan perda butuh PP. Saya sudah berapa kali ke menpora , DKi saja mau dianggarkan, tapi tidak bisa jalan karena PPnya belum ada. Mungkin di pusat menganggapnya bahwa PP itu tidak terlalu diperlukan karena mereka berpikir pusat, berpikir besar, padahal perlu penjabaran lebih rinci.

Payung hukum menjadi strategis (D)

Dari PP itulah , di daerah kita bikin Perda, kita atur lebih detail, peran SKPD, Dispora, organissai pemuda, termasuk pendanaannya diatur. Pembinaannya spt apa

Dispora tetap leading sector ya (D)

Tidak apa2 SKPD punya program2 berbasis pemuda, tetapi kita yg punya pemudanya.

Prasyarat agar kebijakan ini bisa diimplementasikan, sisi komunikasi, kebijakan ini sudah pernah didengar atau disosialisasikan?(D)

Pengarusutamaan pemuda, nomenklturnya seperti itu? (Di Kemenpora baru rancangan, ada staf ahlinya, dari sisi perencanaan, mereka melihat kepada sinergi dan koordinasi lintas sektor) Saya kan baru dengar ttg pengarusutamaan, nomenklatur itu baru dengar. Kalau di kita yg namanya mensinergikan ada rakor Kepemudaan, khusus bagian pemuda, mengundang SKPD, OK, Kecamatan, kita undang, beri sosialisasi UU Pemuda. Ini lho tentang pembangunan kepemudaan. Hanya mungkin dalam hal ini ketika kita mensosialisasikan itu tidak serta merta mereka paham dan mengerti pembangunan pemuda, karena banyak hal yg dipikirkan SKPD lain selain pemuda.

Usaha dari sisi komunikasi harus lebih banyak lagi (D)

Harus lebih lagi, UU itu kan baru setahun dua tahun masih transisi, UU tidak mengatur lebih detail ketika kebijakan mengatur ttg pembentukan lembaga. Harus dijabarkan ulang. Beda jika mengatur pembentukan lembaga, jadi lbh konkrit.

Dari sisi sumberdaya bgmn, staf, informasi yg tersedia? (D)

SDM kita masih taraf belajar. Mereka terutama dari aspek jumlah masih terbatas. Dari aspek kapasitas, kompetensi masih kurang, karena yg masuk ke sini tidak ada background organisasi, harus mendalami kebutuhan pemuda dll. Jumlah masih perlu, terutama yg penting pendalaman pekerjaan, karena di pemuda ini kita mengelola manusia. Manusia yg usianya masih rawan, jadi perlu penghayatan, pendalaman. Kalo kita tidak senang jadi sulit. Kita juga berhubungan dgn lembaga2 kepemudaan, yg memiliki corak dan adayg berafiliasi partai. Ada yg kemana, macam2, heterogen.

Informasi?(D)

Masih kurang, pertama database kita belum lengkap. Kedua ada bidang pemberdayaan pemuda yg menitikberatkan personal, ada bidang kelembagaan pemuda. Yang kita tahu kita sangat lemah dalam database, terutama masalah lembaga kepemudaan, karena tidak semua lembaga punya secretariat. Organisasi harusnya punya secretariat. Yg bagus secretariat jelas, ada asset, belum tertata baik shg kalo ada info kegiatan sulit menyampaikannya. Kegiatan untuk pemuda masih kurang, sarana prasarana gak ada, kurang sekali, Jauh dgn Cina.

Bentuk kewenangan dalam tugas dan tanggung jawab spt apa? Agar sinergi bisa jalan (D)

Kewenangan sudah cukup, hanya tinggal kewenangan, disini kan bantuan kepemudaan belum disini, masih di kesra/Sekda, utk memfasilitasi kegiatan kepemudaan yg tidak difasilitasi APBD, yg sifatnya bantuan keuangan di Kesra. Di provinsi sudah, misalnya Disorda menganggarkan bantuan utk 50 OKP, disini tidak ada, adanya di SEKda, sebetulnya itu program yg bagus karena jika bantuan itu ada disini, kita dapat menuntun, membina dan mengintegrasikan. Eksistensi kelembagaan akan terangkat, karena mereka akan datang kesini krn ada kepentingan. Bgmn mereka mau kesini kalau tida ada bantuan. Ketika datang kesini kita bisa membina, memonitor, evaluasi, komunikasi. SEkarang kita hanya berharap kegiatan2 kalau kita mengundang.

Bentuk koordinasi dari sana tidak ada, beda jika kalau harus ada rekomendasi dari sini. Tidak ada pelaporan. Ini salah satu kelemahan koordinasi dan kewenangan,

paling tidak bdsrkan UU kita ada kewenangan fasilitasi. Kan bantuan OKP ada, Pramuka ada, masih di sana. Kita tidak akan bisa memonitor dan membina.

Fasilitas? (D)

Kantor ini masih numpang, ini masih Sekda, kita belum punya kantor, peralatan kantor cukuplah.

Dari sikap pelaksana, thd kebijakan ini utk mensinergikan apakah mendukung (D)

Internal, SDM yg masuk kesini mereka tidak semua berlatar belakang pemuda shg banyak staf yg belum bisa melaksanakan tugas, jadi kendala, kita mau lari sulit. Kedua, aspek motivasi, kurang, keinginan untuk maju kurang, keikhlasan kerja belum tumbuh. Dispora kan dinas baru, staf dari berbagai latar belakang, dating ke sini bingung. Jadi masalah hati, hanya itu sangat mengganggu proses pembangunan, mana yang mendorong kita tidak ada, susah.

Dari struktur organisasi/birokrasi? (D)

Bidang pemuda ini mestinya 3 Kasie, ini hanya 2 kasie, harusnya ada kasi pemberdayaan, kelembagaan dan sarana prasarana, baru seimbang, Sekarang sarannya belum ada shg bisa memfasilitasi sarana prasarana kepemudaan, untuk kegiatan pelatihan, bikin sarana outbond pemuda, utk banyak hal, secretariat kepemudaan.

Dari tata aliran kerja /SOP? (D)

Standar lah, kalau tupoksi sudah jelas. Kembali kepada komitmen secara keseluruhan. Nanti larinya kepada kinerja.

Faktor2 pendukung? (D)

Segara dibentuk Perda supaya pembangunan kepemudaan lbh terarah, sbg semua SKPD termasuk stakeholder bisa terarah. Kalau ada Perda lebih bagus, kalau dari dalam kita hrs bentuk SDM yg berkapasitas. Masih banyak yg belum tahu ttg skup pekerjaannya.

Faktor kunci keberhasilan?(D)

Kalau di kita Perda kepemudaan diharapkan bisa menjadi sebuah pendukung , kalau di pusat berarti PP

Masukan lain ttg konsep pengarusutamaan? (D)

Yang terpenting semua berawal dari aturan main, payung hukum harus dibuat, kita tidak bisa melangkah tanpa aturan, semua harus diatur, itu kuncinya. Untuk pemerintah pusat, UU saja tidak cukup segera buat PP dan aturan2 termasuk juklak juknis yg jelas. Kebijakan Pembangunan pemuda harus disosialisasikan secara benar kpd seluruh stakeholder yg punya kepentingan, karena konsep bagus, sosialisasi tidak bagus percuma. Tingkat propinsi saja belum punya blum dianggarkan, rakor bidang pemuda juga tidak ada anggarannya di Jabar, pantes programnya pada ngaco. SInerginya tidak ada. Provisnsi Jabar punya program, kan harus dilaksanakan sama kabupaten kota, padahal di kita tidak dianggarkan, kita jdi tidak bisa kirim pesertanya. Kalo diambil dr anggaran lain jadi korupsi. Kalau ada rakor, disosialisasikan, kan jelas, programnya apa, kegiatan apa, jadi

bisa dianggarkan kegiatan di tingkat propinsi. Kebijakan blueprintnya tidak ada, mau dibawa kemana pembangunan kepemudaan. Di KNPI saya buat, disini dicoret oleh Bappeda.

Kita gak bisa lepas dari itu, (SKPD, perencanaan, penganggaran) disini ada ego sektor masing2, bappeda dan dewan terkadang tidak sama cara berpikirnya. Sistem kita seperti sekarang tidak bagus, karena tidak dipersiapkan akhirnya yg idealis tapi tidak sesuai kemauan politik pimpinan bisa menghambat kerja2. Termasuk semua kegiatan, berhubungan dengan parpol

Amin Hudoyo

Kasie. Pemberdayaan Pemuda Dinas Olahraga dan Pemuda Prov. DKI Jakarta

Tanggal wawancara: 20 Juni 2011

Kondisi pembangunan kepemudaan di Indonesia? (D)

Dgn adanya UU 40 akan lebih bagus, kita akan melakukan pembinaan akan punya pegangan, payung hukum, sasarannya jelas, walaupun sasarannya masih berbenturan dgn UU lain, mis usia perkawinan, perlindungan anak. UU 40 pemuda 16-30 tahun, tapi dapat KTP baru 17. Dari usia sudah perbedaan, UU Kependudukan 17 tahun sudah dewasa. Makanya yang namanya pemuda dan olahraga, kadang2 kita menangani anak juga, padahal ada perlindungan anak. jadi dg nada UU minimal sudah ada pegangan, lebih focus menangani masalah pemuda. Sekarang tinggal dikembangkan UU itu, dari segi usia saja masih bisa didiskusikan. Terlepas dari itu semua, jadi lebih mantap, lebih yakin dalam menangani pemuda. Sebelum ini kita jalan aja terus.

Dalam menunjang pembangunan nasional, menjadi penting pembangunan kepemudaan? (D)

Iya, kan yang membuat merdeka pemuda, memang strategis, dengan adanya UU itu lebih bagus. Peran pemuda tidak bisa disangkal lagi dan sangat penting sekali.

Masalah utama pembangunan kepemudaan? (D)

Pendidikan mental karakter, karena pemuda kan usia labil sedang mencari jati diri dan bentuk. Itu yg perlu diarahkan, kalau mental tidak dibina bisa salah arah. Jadi yg utama itu. Harus bangga juga dgn Indonesia.

Masalah pemuda yg berhubungan dgn karakter? (D)

Narkoba, belum timbul konsep dirinya, belum jelas, apakah dilatarbelakangi budaya, keluarga, kita tidak tahu. Mungkin itu yang harus diperhatikan, kalau dia punya jati diri, karakter yg bagus mungkin tidak akan terjadi hal2 spt itu. Itu yg harus kita garap, walaupun mutlak pemuda milik semua. Artinya yang menangani pemuda bukan hanya kita, ada pendidikan, dari segi agamanya juga. Dari kita minimal dgn ada UU sudah ada pegangan.

Sektor2 lain yg terlibat, bgmn bentuk keterlibatannya sejauh ini spt apa ? (D)

Seperti di kepaskibrakaan, memang kecil tapi jiwa kepemimpinannya akan timbul, umpamanya dgn kementrian agama dalam memberi materi, dari ABRi ada dalam pembekalan, kerjasama juga dgn instansi lain sesuai bidang tugasnya. Kita

akan menghasilkan paskibraka spt ini hrs dgn instansi mana, pemuda kapal nusantara harus dengan instansi mana, bahan2 apa yang mungkin dikerjasamakan.

Suatu keharusan utk menjalin koordinasi? (D)

Karena secara teknis kita juga kurang menguasainya. Misalnya kapal nusantara, kehidupan di kapalnya seperti apa.

Kalau dalam pembangunan kepemudaan siapa leading sector siapa, apa memang harus kemenpora, atau harus bersama dgn pihak lain ? (D)

Karena sudah ada menteriya, harus menteriya. Masalah koordinasi dia harus mendukung dgn instansi lain. Tapi kebijakan leadernya tetap menpora, itu amanat UU, dari kementerian, begitu sampai di Dinas ya di dinas, instansi lain mendukung.

Pendapat tentang seandainya pengarusutamaan ini dalam pembangunan kepemudaan, kemenpora melihat pada sinergi lintas sektor dlm pemb kepemudaan (D)

Pengarusutamaan itu baru, maksudnya apa? Memang kalau untuk menangani pemuda, banyak yg terlibat dan pemuda juga milik orang Indonesia. Leadernya secara umum ya dgn UU 40, Menegpora, jadi menurut saya harus didukung UU tsb. Dijalankan, dengan berbagai lintas sektoral, mulai dari perencanaan, supaya ada arah untuk melakukan itu. Arah itu dimulai dgn UU. Ini ada pertemuan dengan DPRD dan tokoh agama dan pemuda, ini diantaranya untuk pengarusutamaan. Kenapa perlu hal ini, mengapa bisa terjadi kerusuhan pemuda dan agama? Mungkin ini ada informal leader, ada isu2 dan nadanya negative sehingga pecah. Yang gampang digerakkan pemuda, pemuda kurang pengetahuan mudah disulut. (jadi perlu peran tokoh agama, dprd dll ya)

Berarti setiap pihak yg terlibat harus ada komitmen? (D)

Iya, tanpa komitmen jalan masing2, tidak ketemu, harus ada komitmen mau diapakan pemuda ini dibangun, dibangun kemana, menjadi apa. Komitmen kita selama ini adalah sumpah pemuda, proklamasi. Makanya otonom juga komitmen, tp melupakan 28 oktober, muncul sekat2. Euforia otonomi ttg putra daerah juga ada.

Berarti komitmen dibangun melalui apa ? (D)

Harus dibangun melalui sosialisasi, seperti program kepemudaan. Kalau dari awal sudah kenal, harus dibanyakan program agar anak muda saling kenal, ketemu langsung dengan karakter lain, terjun langsung. Harus dgn komunikasi, sosialisasi, tidak cukup di ruangan saja, harus juga dgn nyata, seperti pertukaran pemuda. Sosialisasi banyak medianya untuk membangun komitmen, di kelas, di lapangan.

Sistem evaluasi dampak seperti apa (D)

Pertukaran pemuda antar propinsi, antar Negara, remaja ceria, paskibraka, dikasih pembekalan, purna tugas dibuat ikatan alumni. Alumni itulah untuk berkiprah yg sudah mempunyai bekal2 kepemimpinan, bisa menularkan ke lingkungan sekitar. Evaluasinya memang secara formal belum, tapi kita melihat hasil dan perbaikan

pelaksanaan selalu ada pembaruan tiap tahun, dari sistem dan materinya. Evaluasi tetap jalan, tapi daya cover program dibandingkan jumlah pemudanya sangat kecil. Kalau semua, kemampuan kita tidak ada, dengan kemampuan inilah kita tangani. Sekarang bagaimana metode itu disebarluaskan diperbanyak, belum karena kemampuan

Langkah2 atau strategi yg harus dijalankan agar baik pemerintah kota/kab, instansi mau memberikan prioritas atau komitmen, apakah hrs ada peraturan lain yg lebih mengikat? (D)

Meinang itu yg diperlukan, tidak bisa dijalankan sendiri2, harus ada peraturan di bawah UU, sampai gubernur, kabupaten. Kalau DKI otonomnya sampai Propinsi, tingkat I. Aturan itu yg harus ada, gak sendiri2 nanti jadi gak ketemu. Tanpa itu kita tidak bisa jalan. Ibaratnya bertanding, aturan dulu yg kita tegakkan, baru kita bertanding. Seperti kita mau lomba ada technical meeting, agar rambu2nya jelas. Jadi keterkaitan dgn instansi lain tidak tumpang tindih. Kalau payung hukum sudah ada secara nasional, ke bawah penerapannya baru dibuat secara rinci, si A mengerjakan apa, si B. Kalau pendidikan ka nada 3 domain yg digarap, taqwa, cerdas, terampil. Kepemudaan juga 3 itu sasarannya, tp bhsnya beda.

Faktor2 yang mempengaruhi, dari komunikasi. Apa sudah pernah mendengar konsep ini? (D)

Secara pribadi belum, pengarusutamaan baru buat saya, apa sekedar istilah atau apa? Belum pernah mendengar dan sosialisasi

Perlu ada sosialisasi lebih jauh?(D)

Kayaknya iya

Koordinasi dan sinergi lintas sektor, dari sumberdaya, SDMnya bgmn kapasitas, jumlahnya? (D)

Untuk sumberdaya, kita tidak terlepas dari kebijakan pemprov . Kondisinya kekurangan tenaga, kalau mau memaksakan tidak bisa, dari administrasi maupn lapangan. Sekarang SDMharus bisa kedua2nya, harus bisa perencanaan dan konsep dengan baik, tapi menghadapi pemuda juga tahu tekniknya. Sekarang mulai jarang , kalau di kepemudaan harus dua2nya dengan keterbatasan orang. Perencanaan pelatihan, berapa lama, selain jumlah, kapasitas SDM juga harus ditingkatkan., karena kita akan mencetak orang2 yg punya kapasitas juga.

Informasi yang mendukung, data, seperti apa agar koordinasi dan sinergi bisa berjalan? (D)

Kebijakan pusat kyknya harus lebih cepat sampai ke daerah, apakah surat tugas, keputusan atau apa saja yang menyangkut pemuda. Kadang kita ketinggalan, walaupun sama2 di Jakarta. Kadang ada pemikiran yg jgauh2 dulu prioritas, malah kita jadi ketinggalan dgn propinsi lain. Pedoman juga diperlukan, aturan2 secara umum, harus ada pegangan.

Dari data2, data2 kepemudaan kependudukan kita ambil dari BPS khusus yg DKI, disamping data2 dari tingkat sudin-sudin juga ada. Dari kecamatan juga ada, walaupun tidak semua, krn kekurangan tenaga juga.

Fasilitas kantor ? (D)

Selama ini kita tidak punya kantor khusus kepemudaan, selama ini pakai sarana pramuka, kantor menpora, kantor yg khusus propinsi belum punya. Gelanggang pemuda olahraga, untuk pemuda nempelnya ke situ. Makanya disini namanya Disorda, karena yang eksis lebih dulu olahraganya. Pondok pemuda kita punya, gelanggang remaja kita punya. Kalo fasilitas pemuda secara umum punya. Itu di lima wilayah. Kalo GOR setiap kecamatan punya, tingkat kota ada, disamping yg lain. Tapi yg khusus pemuda baru gelanggang remaja aja.

Dari sisi pendanaan? (D)

Prioritas di DKI 22-27 trilyun, provinsi DKI. Pendidikan, kesehatan, PU yg besar. Dinas olahraga tidak sampai setengah trilyun, beberapa ratus M. Tetapi dibandingkan dgn jumlah pemuda yang ditangani dgn kemampuan masih jauh. sekarang kepemudaan menangani 24 kegiatan, banyak, dgn dana yg tersedia jauh dan kurang. Harus dari pendidikan dulu, sekarang kita mengisi di luar anak sekolah. Komitmen disorda DKI ada, wajib mendukung, karena tidak bisa jalan sendiri. Aplikasi di jalan, kita minta dinas lain berperan, paling tidak lewat forum dialog, forum di kelas, misalnya dinas social bisa meangani apa? Haru sberbagai sektor

Secara struktur apakah ada yg khusus menangani lintas sektor secara struktur atau SOP atau birokrasinya?(D)

Tidak ada, adanya di humas karena humas bagian kecil dari secretariat. Sekretariat membawahi perencanaan, keuangan, kepegawaian, umum (humas, protocol, persuratan, saranan inten). Yang lintas sektoral di umum, Cuma akhirnya tdk terasa, tapi di pendidikan terasa ana nuansa protocol dan kehumasan. Disini kita belum punya, karena dirangkap. Bidang atau seksi tidak ada.

Kendala yg dihadapi dalam koordinasi sinergi ? (D)

Egosektoral. Masing2 menangani sektor sendiri2, walaupun masalah kepemudaan juga

Faktor kunci keberhasilan (D)?

Kepemimpinan, kita masih paternalistic, apa dilakukan pemimpin akan dilakukan bawahan.

Hal yang mendukung kearah situ(D)?

Kepemimpinan bisa dibentuk, kalau dari lahir anugrah. Melalui pendidikan kepemimpinan. Ada sudah ada bakat, tapi bisa diperoleh melalui pendidikan2, karena masyarakat dan organisasi melalui pemimpin.

Masukan?

Tetap harus aturan dulu dibentuk, sampai ke bawah, baru bisa jalan. Pemimpin juga harus punya konsep yg bagus, masyarakat kita akan mengikut

Dadang Rizki Ratman

Direktur Direktorat Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI

 Tanggal wawancara: 13 Juni 2011

Pembangunan kepemudaan di Indonesia seperti apa? (D)

Pembangunan kepemudaan harus dilihat dari konteksnya, konteksnya dalam pengertian kebijakan perencanaan pembangunan kepemudaan, bisa dilihat dalam UU Kepemudaan no 40/2009, dalam pengertian apa yang disebut pembangunan kepemudaan. Jadi Dini bisa lihat dari UU 40 tsb. Kalau tentang bgmn pelaksanaannya, kalau dilihat siapa yang bertanggungjawab dalam pembangunan kepemudaan, dalam struktur pemerintahan ada kementerian pemuda dan olahraga, jadi pasti dan harus kewajiban kemenpora mjd pemerintah yg paling bertanggung jawab dalam pembangunan kepemudaan secara struktur. Dalam konsep UU 40 itu disebut juga pelayanan kepemudaan, yang isinya secara substansi, penyadaran, pemberdayaan, pengembangan. Pengembangan ada 3, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan. Pertanyaannya bagaimana pembangunan kepemudaan sekarang, lihat saja hasilnya, outcome dan outputnya. Apakah pemuda kita masih sekolah, masih atau sudah bekerja, kalau misalnya tidak bersekolah, tidak bekerja, itulah masalah kepemudaan sekarang, tidak bersekolah dan tidak bekerja diantara range usia 16 sampai 30 tahun. Itu dua indikator utama, masalah lainnya narkoba, premanisme, kejahatan, kriminalitas, itu menjadi masalah dalam skup yang luas. Itulah yg ditulis oleh kita di dalam RPJM, Renstra kementerian, bahwa ada masalah pendidikan, pekerjaan, atau masalah social disebutkan. Itu dari framework yg umum. Menjadi penting karena menyakut kualitas manusia, bagian yg tidak terpisahkan dari pembangunan kualitas SDM, kan pemuda SDM, karena bagian dari peningkatan kualitas SDM. Jd kita meningkatkan kualitasnya, ilmunya, ketrampilan dan skillnya.

Sekarang yg jadi masalah lagi dlm birokrasi bgmn kementerian PORA menjadi leading sector dalam pembangunan kepemudaan. Pernah dicoba dengan menyusun Rencana Aksi Nasional bidang kepemudaan. Ini sama2 semua menyusun dalam tahunan apa rencana masing2 K/L, kegiatan2nya yang mengembangkan, meningkatkan kualitas kepemudaan. Misalnya kemendiknas karena punya sekolah bagaimana usia 16-30 terus sekolah, bagaimana pendidikan agama di pesantren2, madrasah2, bagaimana di kemensos ada karang taruna, di kemenhankam ada bela Negara. Itu sudah terangkum dalam buku ini, sebagai bagian dari strategi kebijakan sinergi koordinasi, kemitraan melalui RAN. RAN dimaksudkan sebagai instrument perencanaan, pemantauan, evaluasi untuk bersinergi, karena nanti RAN dalam pelaksanaannya dilanjutkan dengan pertemuan rutin, bisa setahun sekali atau dua kali, sebagai bentuk koordinasi nyata dan pertemuan koordinasi. Itu disusun 2009-2010 dan akan diupdate terus. Sehingga pelaksanaannya bisa sinergi, sinergi dalam perencanaan, pelaksanaan, ataupun targetnya yang sama.

Sekarang kalau ditanya kebijakan apa yang paling tepat di bidang kepemudaan? Kebijakan yang tepat itu kan selalu kami dari Bappenas memperhatikan 2 intervensi, kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Kerangka regulasi itu

bagaimana mengaturnya dengan regulasi, kerangka anggaran bgmn stimulan2 uangnya bisa dipakai untuk intervensi kegiatan untuk peningkatan kualitas pemuda, pelatihan, pembinaan, pemberian instntif dgn anggaran.

Kerangka regulasi, kita bersyukur sudah ada UU 40 sebagai payung hukumnya, kelemahannya aturan pelaksanaannya belum semua diatur, turunan regulasinya. Yang lebih penting lagi regulasi2 itu adalah kebijakan2 internal di kementrian. Contohnya kemenpora kan ada deputi2, ada asdep2, bgmn internalnya mengatur, bagaimana bidang kepeloporan dan kepemimpinan apa substansi yang harus di berikan bimbingan atau dibina, kebijakan2 internal inilah yang sebetulnya kalau d8ipelajari bisa dilihat dari peraturan mentrinya.

Apa itu bisa jadi masalah utama dalam pembangunan kepemudaan dari sisi kebijakan? (D)

Bisa disebut begitu. Pembangunan kepemudaan itu karena melibatkan berbagai aspek kehidupan kepemudaan dan menyangkut berbagai pbidang pembangunan, masalahnya adalah di masalah koordinasi, sinergi, kemitraan dan kerjasama. Karena menyadari masalah koordinasi sinergi kemitraan itu penting lahirlah UU 40. Jadi secara implicit UU ini menjawab permasalahan besar dalam koordinasi sinergi. Siapa yang memimpin koordinasi sinergi adalah presiden, yang sampai saat ini peraturan presidennya belum keluar. Kerangka regulasi lagi.

Berarti dalam hal ini ada koordinasi sinergi, kemitraan, banyak pihak terlibat? (D)

Kalau kami waktu nyusun RAN kita bagi 3 kelompok, mengikuti kelompok coordinator, perekonomian satu kelompok, hankam satu kelompok, kesra satu kelompok. Di perekonomian apa, hankam apa, kesra apa, siapa yang paling dominan di masing2? Kalau di perekonomian yang paling dominan itu ketenagakerjaan dan UKM, itu yg diharapkan lbh berperan dlm bgmn pemuda jd tenaga kerja yg baik, jadi wirausahawan, kalau di pertahanan keamanan antara aparat kepolisian dan belanegaranya. Kepolisian itu bgmn mencegah pemuda2 tidak terlibat criminal. Nanti ada BNN juga, narkoba. Kalau di kesra pendidikan dan kesehatan, social. Dari tiga kelompok itu sebetulnya sudah disepakati bhw leading sektornya masing2 dipegang oleh Menko, jadi sebelum Presiden melalui Menko. Saya sudah mengusulkan agar bidang perekonomian dipegang oleh Menko Perekonomian, bidang Hankam dipimpin oleh Menkohankam. Kami Bappenas memimpin bidang perencanaan, jadi kalau perencanaan kami. Kami juga sebetulnya punya forum, forum perencanaan itu yg dari RAN itu.. RAN itu instrument menko, kami dan PORA untuk mengetahui sejauh mana instansi dan lembaga melaksanakan pembangunan yang targetnya atau subjeknya atau objeknya pemuda.

Berarti kalau dari sisi koordinasi pihak2 tersebut perlu ada komitmen untuk mau berkoordinasi dan bersinergi ? (D)

Otomatis, koordinasi itu kan mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan. Karena kita tidak punya forumnya. Koordinasi kan harus punya forum, baik di luar struktur atau didalam struktur. Agar kita bisa komunikasi, berkonsultasi. Memang kalau dalam birokrasi, koordinasi harus diaktualisasikan dalam bentuk

pertemuan koordinasi, supaya bisa dibahas. Tapi instrument koordinasi tidak hanya ertemuan, baik formal maupun informal...tapi kalau birokrasi baiknya formal, ada forumnya untuk komunikasi koordinasi. Kami sudah mengusulkan juga ada forum koordinasi dengan Kemenpora dan mereka sering mengundang juga untuk berkoordinasi walaupun berdasarkan unit kerjanya, ujungnya, kerucutnya.

RAN sebagai instrument, berarti ia bisa dibilang sbg suatu system yang disepakati oleh semua pihak, sebagai alat evaluasi? (D)

RAN sbgai instrument tidak menerbitkan atau menciptakan format2 baru dalam perencanaan, didalam pelaksanaan, maupun dalam monev. Contohnya, perencanaan tetap kita menggunakan Renja KL, RKP, pelaksanaan memakai DIPA masing2, pemantauan memakai PP 39 dengan format laporan, instrument ini begitu kita mengadakan forum koordinasi itu, dokumen renja dibawa, hasil pemantauan dibawa, dijadikan bahan untuk pertemuan RAN itu, jadi kita tidak menciptakan dalam pengertian format2 baru dalam perencanaan, makanya disebut instrument, karena masing2 membawa RKP, renja, DIPA, dan hasil monevnya, ayo kita ketemu, bikin tulisan bagaimana hasilnya dari masing2 sektor. Pendidikan melaporkan pendidikan, diramu laporannya. RAN disusun dengan memperhatikan renstra masing2, nanti pemantauannya kita adakan forum pemantauannya. Itu rancangannya, yang sekarang masih di dalam proses penyelesaian di Deputi Harmonisasi.

Apakah dari sisi anggaran berpengaruh dalam RAN ini?(D)

Kalau dari sisi anggaran masing2, misalnya pendidikan untuk pendidikan, kemenag untuk pesantren, madrasah, masing2. Sesuai dengan renja masing2. RAN ini tidak menciptakan anggaran khusus, kami hanya membutuhkan anggaran untuk pertemuan koordinasinya. Jadi RAN ini instrument perencanaan sampai monev tanpa merubah format yang sudah ada.

Artinya komitmen, untuk melakukan secara bersama sinergi tanpa merubah format yg sudah ada, kalau merubah format harus ada aturan baru lagi, memerlukan landasan hukum yang lebih kuat, contoh untuk format monev kan diperlukan PP, untuk RKP peraturan presiden, untuk perencanaan sudah adanya PPnya no 40 ada RKP, RKKL, Renja KL.

Bentuk komitmen ini dianggap cukup memaksa dgn UU 40?(D)

Kan cukup UU komitmen ini, UU 40. Harusnya memaksa, Cuma kelemahannya belum ada peraturan pelaksanaannya, yang belum disusun. PP belum ,perpres belum, padahal disini dikatakan PP paling lambat 2 tahun untuk segera dilaksanakan. Jaidi 2011 harus selesai

Strategi yang lebih konkrit supaya koordinasi ini bisa berjalan (D)

Konkritnya ada Peraturan Presiden, sesuai dengan UU ini tetnang koordinasi, sinergi dsb. Dini bisa koordinasi dgn kemenpora, apakah sudah ada Perpres yang mengatur, atau plg tdk Inpres tentang hal ini, karena Perpres inpres biasanya langsung kpd orangnya atau kepada kementriannya.

Kalau ditanya bagaimana bentuk konkritnya:

1. Bikin regulasi/aturan main → turunan pelaksanaan UU ataupun peraturan menteri yang bersangkutan, ingin mengetahui kementerian yg terlibat ada di RAN
2. Berikan anggaran untuk kegiatan2 tertentu →krangka anggaran→ misal nya memberikan bantuan, uang untuk kegiatan apa...

Konsep pengarusutamaan? (D)

Mengutamakan sesuatu dari keseluruhan kebijakan dalam pengertian yg sama Kalau pengarusutamaan pemuda, harus mengerti dulu, tujuan diarusutamakan itu apa, mengatasi masalah apa, kalau tidak ada mengatasi permasalahan kesenjangan, ketidakadilan, kesetaraan bidang pemuda dibandingkan dengan yang lain atau kelompok umur lain, jangan disebutkan pengarusutamaan, kecuali pengarusutamaan dipersempit menjadi diprioritaskan, akan menjadi lain pengertian pengarusutamaan yang diprioritaskan. Misalnya diprioritaskan dalam setiap bidang pembangunan. Contoh bidang pendidikan, prioritaskan pemuda, pasti diprioritaskan karena 16-30 krn sekolah menengah dan perguruan tinggi, di kemensos diprioritaskan karang tarunanya, bisa juga. Persempit pengarusutamaannya, prioritaskan.

Seandainya konsep pengarusutamaan atau sinergi koordinasi, faktor2 yang berpengaruh dalam implementasi ? (D).

Harus dilihat juga dalam pengarusutamaan pemuda apa indikatornya dikatakan berhasil. Kalau gender ada IPG, indeks pembangunan gender, yang menunjukkan pengarusutamaan itu berhasil atau tidak, nanti pemuda juga harus dirancang juga indikatornya.

Pengarusutamaan juga nanti menghendaki adanya kepastian hukumnya, sementara ini belum ada landasan hukumnya pengarusutamaan itu. Dalam UU juga tidak disebutkan, kecuali kalau gender ada Inpres. Seandainya nanti presiden mengeluarkan tentang pengarusutamaan pemuda, kalau saya melihatnya nanti yang diarusutamakan bukan soal untuk mengatasi kesetaraan dan keadilan, jadi jangan sampai lebih penting pemuda dibandingkan lanjut usia, buaku begitu. Pengarusutamaan dalam pengertian didalam pemuda sendiri apa yang diarusutamakan, kewirausahaan atau kepemimpinan atau kepeloporannya. Misalnya pengarusutamaan kewirausahaan di kalangan pemuda, pemuda dimanapun berada wajib mengikuti kewirausahaan, itu pengarusutamaan bisa, per bidang atau sub bidang. Pengarusutamaan kepemimpinan, semua pemuda 16-30 dilatih kepemimpinan, dari sabang sampai merauke oleh pemerintah pusat dan daerah dilatih leadership, itu pengarusutamaan, yang notabene saya sebut bukan pengarusutamaan tetapi diprioritaskan. Akan berbeda. Karena dalam pengarusutamaan harus dirancang dulu konsep dan indicator keberhasilan dan apakan pengarusutamaan itu memenuhi criteria dalam kerangka regulasi dan anggaran.

Komunikasi, apa belum pernah mendengar tentang pengarusutamaan ini ? (D)

Saya dengarnya baca di Koran saja (tapi kalau dari sisi koordinasi sinergi, sosialisasi dan komunikasi dan semacamnya dilakukan?).

Paling tidak saya koordinasi perencanaan dalam menyusun rencana kerja pemerintah, kan kita koordinasi, musrenbang nasional, pusat propinsi, monev tiap tribulanan kita ketemu, kajian ketemu dalam seminar workshop.

Dari sumberdayanya bagaimana untuk koordinasi sinergi? (D)

Di Bappenas kurang, kita menangani pemuda hanya berdua bertiga, kurang sumberdayanya

Dari informasi, data? (D)

Kita mencoba menyiapkan, mencari

Kewenangan kami membuat kebijakan perencanaan, kami kemudian memantaunya untuk perencanaan berikutnya, bentuknya rencana kerja pemerintah. Selain itu kami juga inisiatif dengan kemenpora menyusun instrument RAN itu.

Unit kerja kami koordinasi, kajian, monev, data informasi.

Fasilitas pendukung? (D)

Tersedia, memadai, tapi selalu merasa kurang

Disposisi terhadap konsep pengarusutamaan ini spt apa, ini kan baru akan diluncurkan, sikap sebagai pelaksana bagaimana? (D)

Bappenas institusi tersendiri, kemenpora institusi tersendiri. Hubungan kerja pasti ada, yang dimaksud disposisi saya kalau saya tolong pelajari, telaah, sikap kami belum merekomendasikan kebijakan pengarusutamaan dalam perencanaan, karena landasannya belum ada, UU 40 tidak mengatakan pengarusutamaan. Bukan against thd bagaimana pentingnya pemuda, karena implikasinya beda, penting, strategis iya, diprioritaskan iya, tapi diarusutamakan tunggu dulu, apa yang memerintahkan pengarusutamaan itu, siapa. Birokrasi kan begitu. Sekarang ada wacana diantara akademisi, intelektual, berdiskusi, silahkan saja bagaimana mengarusutamakan pemuda, silahkan saja sebagai wacana. Tapi secara empiric, belajar dari pengarusutamaan gender, gender diarusutamakan karena ada mengatasi permasalahan, kesetaraan lelaki perempuan, itu mengapa ada pengarusutamaan gender. Kalau pemuda, dengan siapa, apakah dengan pemudinya itu malah gender. Itu argumennya kenapa kita belum merekomendasikan pengarusutamaan pemuda dalam bidang perencanaan.

Kalau mau disimpulkan, konsep pengarusutamaan pemuda harus diperjelas dulu tujuannya, kenapa harus pengarusutamaan itu. Kalau tujuannya belum diperjelas atau belum dirumuskan, pengarusutamaan belum siap sebagai konsep.

Ada yang luput dari definisi yang disusun Kemenpora, yaitu untuk mengatasi masalah apa pengarusutamaan itu? Kalau orang PP mengatakan mindset, sebetulnya bukan itu yang diatasi masalah dari pengarusutamaan itu. Pengarusutamaan gender itu untuk mengatasi masalah kesetaraan lelaki dengan perempuan. Sekarang masalah pemuda, pemuda dengan siapa ketidakadilannya, dengan anak2, orangtua, bayi, bandingkan pemuda dengan anak2, itu pengarusutamaan begitu.

Makanya jika secara wacana, pengarusutamaan pemuda akan lebih tepat kalau kita bicara pengarusutamaan sub-sub bidang kepemudaan, misalnya di bidang pemuda diutamakan kewirausahaan, dibandingkan kepeloporan, kepemimpinan, artinya semua kebijakan bidang kepemudaan utamakan kewirausahaan, itu bisa dilakukan, semua diwajibkan untuk ikut kewirausahaan, mulai dari tingkat SD.]

Secara struktur mendukung untuk koordinasi? (D)

Secara struktur mendukung, untuk koordinasi, perencanaan bisa, pemantauan bisa, karena itu fungsi manajemen, dan harus dilaksanakan, masalahnya sekarang isi koordinasi apa, apakah bidang pengarusutamaan aiau yg mana, krn baru konsep. RAN saja berapa kali pertemuannya, koordinasi terus jalan, bisa dirancang.

Kendala utama ? (D)

Masing2 KL punya tupoksi, yg kalau dijalankan dgn benar sudah memecahkan masalah pemuda. Input bagus, proses bagus ouptutnya bagus, hasilnya bagus. Kenapa tidak ideal, inputnya masih kurang bagus, kurang banyak, kurang apa...Prosesnya masih kurang, ada kekurangan di setiap proses itu, baik yg disebut Pembina pemuda masih kurang berkualitas, ikluinnya belum mendukung, lingkungan belum, jadi bisa dilihat dr berbagai aspek/perspektif

Faktor kunci keberhasilan? (D)

Regulasi yg baik, benar, penganggaran yg tepat, perencanaan yg tepat, selalu kami melihatnya, karena dari ke deputian SDM, input yg tepat itu adalah SDM harus bagus, system bagus tapi SDM kurang, dan sebaliknya SDM bagus tp system kurang jadi kurang juga.

Faktor pendukung ? (D)

Dari fungsi manajemen gampang, sarana prasarana harus tersedia memadai, infrastruktur harus bagus, yang dimaksud infrastruktur ada di UU 40, yaitu sarana prasarana kepemudaan harus bagus. Kekurangannya, pasti terbatas sarana prasarananya, atau kurang berkualitas, misalnya gelanggang remaja, ruang terbuka utk pemuda kurang.

Masukan lain? (D)

Kami melihatnya dari perspektif perencanaan, soal konsistensi, maksudnya begitu sudah keluar UU 40, harus konsisten dgn UU itu, jangan dilanggar lagi atau diusulkan untuk diubah lagi. Konsistensi juga penting, selain komitmen dan koordinasi. Kedua, keberlanjutan, *sustainability*, karena membangun SDM itu sepanjang hayat.

Guntur Pawoko

Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Tanggal wawancara: 23 Mei 2011

Menurut bapak pembangunan kepemudaan di Indonesia seperti apa sekarang? (D)

Artinya begini, saya dari level kebijakan pemuda itu adalah aset produktif kalo dilihat dari segi kelompok umur adalah kelompok produktif. Kalau memang itu,

harus ditangani secara hati-hati. Karena itu adalah prospek masa depan kita. Kalau kita tidak hati-hati menanganinya bisa salah arahnya kemana. Jadi sesuai dengan benangnya itu adalah benang sumber daya manusia. Nah itu ada di RPJP, RPJMN itu adalah meningkatkan daya saing SDM. Intinya sebenarnya itu kan. memang kita sekarang segmennya kepemudaan, itu saya bilang jadi sudah nyambung kan dari atas tujuan pembangunan nasional, trus masuk ke RPJMN, masuk kita kepada substansinya pemuda. intinya mempunyai SDM yang berdayasaing iya kan? Dayasaing itu kan penuh mana-mana bisa siap kancaregional, kancaregional kelas tarkam, kancaregional kelas dunia itu siap. tentunya harus dimasukkan input-input yang produktif. iya kan? Yang bisa membangun bangsa ini ke depan. Itulah intinya makanya perlu adanya pengarusutamaan. Nah ini gimana caranya nanti supaya bisa satu payung. Tentunya harus dibuat satu RAN kan? Rencana aksi nasional dan tentunya mempunyai hal yang sama. RAN itu dibentuk suatu gambaran yang terbesar supaya mereka tuh jalannya jelas sama nanti ke urusan daya saing.

Jadi tidak ada saling tumpang tindih (D)

Makanya sekarang begitu kan. Nah itu nanti siapa yang ngerjain. Menpora jelas gak kuat. Kita usulkan nanti menkokesra. Sebetulnya gak hanya menkokesra juga kan, menko perekonomian, menko pertahanan keamanan, kan ada sendiri-sendiri tu intinya mereka di dalam itu, makanya rencana aksi besar itu nanti kalau memang intinya ke depannya bagaimana ya harus langsung dibawah mungkin wapres atau presiden.

Instruksi presiden. Kalau ini berarti turunannya undang-undang dong pak, PP atau apa? (D)

Ya Inpres. Itu dulu. Karena langsung presiden. Jadi nantinya mungkin kita hanya sebagai secretariat untuk mengkompilasi hal-hal tersebut. Karena kalau kita sendiri gak akan kuat kan? Kita kedudukannya sama, apalagi kita menteri negara. kan gitu? Harus lebih tinggi lagi. kalau memang ini mau jalan lho. ini kita buat grand design besar kan. Harus dibuat satu komite atau apalah yang memang menngerjakan itu. Mungkin ketuanya siapa? Wapres? Minimal kita sudah buat rencana aksi dulu, yang mengelompokkan sebidang-sebidang yang ada di departemen lainnya itu. itu dulu deh, itu aja belum.

Apa itu komitmennya? (D)

Seharusnya, seharusnya kalau menurut saya ya, seharusnya mereka membaca undang-undang yang sama. Intinya hanya keinginan. Harus ada suatu inpres atau apa yang mengelompokkan ini. Ini kan belum ada yang mengikat,

Berarti system yang harus dibangun, supaya ini bisa jalan, mekanisme evaluasi dan sebagainya (D).

Mau per substansi, mau dievaluasi bisa juga supaya jangan ada duplikasi, supaya jangan ada pengulangan, misalnya contohnya dievaluasi di tiap satu bidang.

Jadi kalau lebih konkretnya strategi sama langkah-langkah awalnya dengan RAN itu? (D)

Kita sudah bicara nasional. Nasional per bidang ini dulu. Daerah nanti mengikuti kan. karena per bidang itu menjadi bagian di daerah masing-masing

Jadi strategi yang diusulkan itu RAN itu ya? (D)
RAN dulu. Itu penting.

Kalau menurut bapak apa saja yang kira-kira bisa menjadi faktor pendukung dan penghambat ini pak? Kebijakan ini, konsep ini? (D)

Kalau pendukungnya, faktor penunjang ya, pengungkit. faktor pengungkitnya, ya kita, SDM kita bisa, harus apa gitu. Perunjangnya contohnya undang-undang. Tadi inpres lah. Terus banyaknya pemuda 68 juta. Itu kan tantangan juga itu kan pengungkit. Pengungkitnya lagi, ekonomi kita 7%. itu kan tantangan, peluang untuk pengungkit kita supaya pemuda itu diberdayakan

Faktor penghambatnya kira-kira apa pak? (D)

O kalau pemerintah, penghambat sih gak ada penghambat tabras terus kalau kita. Usaha terus, kalau kita gak boleh ada penghambat. Keinginan dari ego sector itu biasalah. Di setiap departemen ego sector itu banyak.

Trus ini, saya melihat faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasinya ini pak, ini kalau dari segi komunikasi, sudah pernah sejauh mana sosialisasinya? (D)

Selalu. Dengan adanya undang-undang itu kita sudah siapkan satgas sebetulnya.. Upaya-upaya itu selalu kita upayakan. Udah. Termasuk di level bappenas juga sudah. Cuma masalahnya keinginannya itu. Cuma kita tidak tahu kebutuhan bangsa kan gak banya urusan begini. Jadi perlunya dorongan-dorongan, perlunya ada inovatif-inovatif. Kan sekarang inimasih scatter round . Karena itu udah klasik kan dimana-mana. Intinya itu aware.

Jadi semua satu tujuannya kesitu ya ? (D)

Aware. Yang penting kan awareness itu. Awareness tentang hal tersebut. Awareness itu kan sosialisasi. Kalau sosialisasi barangnya belum ada, apa yang mau disosialisasiin? Maksudnya itu difinalkan, entah menjadi kepmen, entah menjadi apa, awalnya dari situ.

Terus, jadi sebenarnya kalau sosialisasi itu sudah sering, sudah terus-terusan dilakukan, memang usaha-usaha ke situ sampai proses ini berjalan sudah pasti akan berjalan terus, gitu? (D)

Selama masih ada menpora, pasti arahnya ke sana. Kan diarahkan ke sana. Sepatutnya begitu.

Jadi selain kemenkeu, juga kementerian yang lain sejauh mana? Kemarin sudah, pas RAN itu sebenarnya ada ya, ikut kan mereka (D)

Cuma bukan menkonya yang masuk. Cuma menteri-menteri dibawahnya. Itu saya bilang tadi. Makanya harus inpres, kesamaan, dengan inpres, dia boleh lintas menko ngerjain apa. tapi intinya terkontrol, terawasi. Coba, kalau di menkokesra jelas kita bisa ngomong banyak karena apa, memang bidang kita.

Dari segi sumber dayanya nih pak, menurut bapak kemampuan sumber daya manusianya atau staf-staf nya untuk melaksanakan kegiatan ini seperti apa pak? (D)

Kalau SDM itu kan, apa namanya dinamis ya. Yang terpenting itu tadi. awareness SDM nya itu. Terus pak, bagaimana ini nya pak. ketersediaan informasi yang mendukungnya pak untuk terlaksananya kebijakan ini.

Tentang cara-cara implementasinya, termasuk data penunjangnya, itu sudah supaya ini bisa terimplementasikan begitu. (D)

Yang utama itu kan kebijakannya dulu. Tiap-tiap substansi segmentasinya kan pasti dia punya targetnya kan masing-masing. Datanya kan sudah ada. Nali, Cuma masalah duplikasi itu kan masalah by name. itu kan perlu kita buat nantinya. Cuma jabaran daripada mau diapakan kebijakan ini melalui output program ini sudah ada. Artinya pendukungnya sudah ada. Hanya tinggal dikelompokkan dari data informasinya, termasuk data pendukung dan dananya sebetulnya sudah ada.

Kalau ini ada juga tentang kewenangan dalam tugas dan tanggung jawabnya, berarti tadi sudah di dalam struktur itu berarti udah ya pak? (D)

Karena sudah diaplikasikan melalui struktur yang ada sekarang. Sudah ada. Jadi awareness itu yang penting. Selain dari kebijakan, sebenarnya awareness. Kebijakan RAN tadi yang tingkatannya lebih tinggi di atas, sama awareness terhadap, bukan problem ya, tantangan ini. Tantangan dari RAN ini setelah jadi awareness

Kalau struktur organisasi udah termasuk ya pak, tata aliran kerja birokrasi juga sudah tadi ya. (D)

Kalau dengan RAN nanti sudah termasuk. daripada struktur apa, ngerjain apa kan jelas, laporannya kemana itu di per output tadi. Di atasnya menkonnya.

Siapa mengerjakan apa, Koordinasi kemana (D)

Harusnya dibuat komite tentang pemuda, komite tentang olahraga. Lagi kita rumuskan. kalau pendidikan buat, kita gak ada fungsi pemuda dan olahraga. Kita kan ditempelin di fungsi pendidikan. Ya gak kuat juga. Cuma minimal kalau olahraga kan unik ya. Komite pemuda, tapi itu harus dibawah presiden. Terdiri dari bukan pemuda-pemuda. Cuma pembuat kebijakan tentang pemuda. Mungkin sekretarisnya bisa menpora, sebab dia kan yang membuat nanti RAN ini bagaimana.

Kalau faktor penghambat tadi kendala tentang ego sector itu kira-kira solusinya itu seperti apa itu pak (D)

Ya tadi itu dibuatkan inpres. Kalau ada inpres dia kan gak bisa kemana-mana.

Ada mekanisme yang sudah tersedia ya (D)

Udah ada. Jadi kalau dibilang strukturnya, kalau level dari pimpinan sudah ada, hanya belum diberdayakan karena belum ada inpres., Berarti istilahnya sistemnya sudah ada. Cuma kita tinggal masukan input kan. Inputnya apa, ya inpres. kalau gak ada inpres kita gak bisa jalan. Contohnya kalau gak inpres, keppreslah, PP yang menguatkan posisi kita. Kan belum ada

Kalau di dalam itu, sebenarnya RAN itu sudah termasuk penerapannya di dalam siklus pembangunan, model perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, itu sudah semua kan tercakup(D)

Dengan adanya RAN itu kan pengelompokan. Nah pengelompokan itu kan harus direncanakan.

Hermin Narwati

Asisten Deputi Bidang Tenaga Kepemudaan Kemenpora

Wawancara tanggal 21 Juni 2011

Bagaimana pembangunan kepemudaan yang sedang berlangsung saat ini?(D)

Dengan Kabinet Indonesia Bersatu II lebih fokus membangun tenaga kepemudaan. Layanan kepemudaan tentunya sudah tahu ada kesadaran, pemberdayaan, pengembangan, Untuk pembangunan kepemudaan ini kita focus usia 16-30 tahun, namun di kemenpora sekarang sedang difokuskan misalnya dengan mengadakan event2 yg mengikutsertakan pemuda. Misalnya dengan KNPI yang sedang pecah, dualism KNPI, diupayakan untuk menyatukan kembali, mungkin dalam waktu dekat kepemudaan diharap menyatu kembali. Dengan menyatunya KNPI kembali diharapkan stakeholder kepemudaan bisa bekerjasama dengan baik. Selain itu juga ada Festival internasional pemuda dan olahraga bahari, rencananya bulan juli di NTB, bagaimana menggugah semangat dan aktivitas pemuda ini. Sebetulnya kementrian PORA sebagai coordinator kementrian yg menangani kepemudaan. Makanya ada RAN dan RAD, dgn mengundang stakeholder, itu yg diatangani asdep kemitraan. Kemenpora tidak sendiri.

Berarti masalah2 utama perlu dukungan lintas sektar(D)

Tidak bisa dikerjakan sendiri, sampai saat ini kemenpora sebagai leading sector dan coordinator.

Pelibatannya seperti apa(D)

Dalam RAN, membuat apa saja yg bisa dilaksanakan scr sinergis. Mis dalam FIBOP, kementrian apa saja yg bisa diajak sinergis, seperti Budpar, UKM, TNI AL, TNI AU, dan PB-PB, pada saat fibop itu kt jg mengundang kepemudaan utk ASEAN, rencananya nanti ASEAN plus 3, yaitu Jepang, China, untuk youth campnya.

Pendapat tentang konsep pengarusutamaan ini seperti apa dalam pembangunan kepemudaan, mungkin ada yg berpendapat ini sekedar sinergi lintas sektor, atau menjadi isu prioritas, atau sampai sejauh mana pembangunan kepemudaan ini harus dikedepankan, apakah sampai harus merubah mindset pelaku kebijakan(D)

Pemuda nantinya akan menjadi tongkat estafet, sehingga penyiapan pemuda menerima estafet, dari sisi birokrasi harus dilaksanakan. Jadi kepemudaan merupakan salah satu yg benar2 ditangani secara focus, jadi prioritas, karena ke depan siapa yang akan mengemban. Bung karno berkata, beri aku 10 pemuda akan aku guncang dunia. Itu salah satu bagaimana pemuda harus benar2 disiapkan dalam menyongsong masa depan. Itu tidak bisa kalau menpora melaksanakan sendiri, sebenarnya ada keinginan untuk menangani keseluruhan, tapi Kemenpora ini kan baru ada lagi, kita juga sedang berupaya untuk bagaimana memberikan kesempatan, fasilitasi dan pelayanan untuk pemuda beraktivitas.

Selain kemenpora dan kementerian teknis, perlu tidak kementerian coordinator dan perencanaan?(D)

Iya tentu, dalam RAN kementerian2 diundang, sebetulnya disitu kita memberikan masukan kegiatannya masing2 supaya nanti terlihat kegiatan kepemudaan dilaksanakan selain rencana anggaran juga aktivitas apa saja. Karena misalnya dari kemensos, untuk karang taruna ada kegiatan a, b, c, d, karena pada kegiatan kita juga mengundang karang taruna dll.

Berarti perlu ada komitmen dari berbagai pihak, diharapkan seperti apa komitmen tsb(D)

Sampai saat ini sepengetahuan saya dalam sinergi, kegiatan2 biasanya swakelola di KL masing2, tapi kalau dilaksanakan sendiri daya tampungnya hanya terbatas, tapi kalau disinergikan daya tampungnya bisa bertambah dan manfaatnya bisa jadi lebih luas. Itu dalam kegiatan2 yg selama ini sudah dilakukan bersama.

Jadi komitmen itu bisa dilihat dari kerjasama2, apakah ada kesulitan?(D)

Sampai saat ini tidak ada kesulitan, karena mereka juga punya tuis yang sama. Kalau UKM tidak ada batas usia, tapi dari Kemenpora dari pra sampai jadi wirausaha. Memang ada pembagian. Kalau produknya sudah bagus, bagaimana agar mereka bisa ekspor, dengan Kemen perdagangan. Alhamdulillah selama ini tidak ada kesulitan. Bahkan tahun ini untuk pelatihan Siaga bencana bekerjasama dgn BNPB, instrukturnya dengan Dinas Sosial.

Apakah ada sistem yg dibangun agar sinergi dapat dievaluasi sejauh mana dampaknya(D)

Dari sisi evaluasi belum samapi sejauh itu, monev masih menjadi kelemahan, perlu ditingkatkan. Tetapi kalau pelaksanaan kegiatan swa kelolakita, kita monitoring. Tetapi sinergi kegiatan yang menpora menyiapkan tenaganya, itu belum ada evaluasi. Lebih ke arah kementerian terkait yg melakukan evaluasi.

Jadi untuk kerjasamanya sendiri belum ada evaluasi(D)

Belum jadi kedepan mungkin lebih baik jika kita sama2 evaluasi, karena yg menyiapkan pemudanya juga menpora.

Dalam mewujudkan komitmen, strategi dan langkah2 apa yg elbih konkrit agar mengikat KL dan merasa tergerak bersama2 atau merasa terikat(D)

MoU sebetulnya sudah banyak, misalnya MoU 5 kementerian kelautan, kemenaker, UKM, Kemenpora, budpar, dari sisi kewirausahaan¹, sudah ada, shg pada event2 kita bisa bareng, itu wadah kita utk melaksanakan kegiatan2 secara sinergis. Sebetulnya MoU2 itu sudah banyak.

¹ MoU lima menteri tentang pengembangan wirausaha

Jakarta, 9/2/2010 Kominfo-Newsroom(D) – Guna mengatasi masalah tingginya angka pengangguran dan kemiskinan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnakertrans(D) bersama Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Pemuda dan Olahraga menandatangani MoU. Menuntut Menakertrans RI Muhaimin Iskandar usai penandatanganan MoU di Istana Wakil Presiden RI di Jakarta, Selasa 9/2(D), MoU tersebut guna perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui penciptaan dan pengembangan wirausaha. MoU itu nantinya diharapkan dapat mendorong dan mengembangkan wirausaha yang akan menjadi suatu gerakan nasional dengan didukung semua pihak, katanya. Penandatanganan naskah kerja sama MoU(D) tentang perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui penciptaan dan pengembangan wirausaha itu disaksikan Wakil Presiden RI Boediono.

Peraturan yg lebih mengikat spt Peraturan pemerintah apakah cukup supaya lebih mengikat(D)

Kalau itu menjadi Perpres spt kegiatan Sail, sbetulanya leading sektornya Kelautan, tp kementerian lain mendukung. Kapal pemuda nusantara dari kemenpora bergabung dengan Sail. Itu juga sebenarnya sinergi kementerian kelautan, angkatan laut, pariwisata, PB-PB spt PB selam, kementerian luar negeri. Jadi Sail SK kepanitiaannya SK Presiden. Sampai saat in belum ada Perpres event sinergis, baru SK kepanitiaan, diikuti SK Meniri leading sector. Lebih kepada kegiatannya, jadi SK untuk kegiatan sinergis. Peraturan pemerintahnya belum tapi bagaimana membangun sinergis sudah.

Faktor2 dalam kebijakan pengarusutamaan ini agar bisa berjalan, komunikasi, secara istilah pengarusutamaan pemuda, apakah sudah sosialisasi, secara internal spt apa(D)

Ini sebetulnya hal baru, pengarusutamaan pemuda dan olahraga di mepora merupakan inisiatif baru, pada saat kabinet IB I belum ada. Menurut saya ada naskah yg kita bahas tentang pengarusutamaan pemuda dan olahraga. Nampaknya sedang digarap hal ini.

Menurut ibu masih perlu banyak sosialisasi dan komunikasi(D)

Iya karena hal ini adalah hal yg baru, karena naskahnya sedang disiapkan mungkin kalau sudah jadi akan disosialisasikan kepada internal, baru kemudian ke luar.

Dari segi sumberdaya, SDM, jumlah staf, kapasitas stafnya, kira2 kemampuan seperti apa apabila kebijakan ini mau diluncurkan(D)

Dari sisi SDM, peningkatan kompetensi pasti harus dilakukan, sekarang sudah cukup memadai, tp utk mengikuti perkembangan jaman kompetensi harus terus ditingkatkan, sudah dilakukan oleh kepegawaian baik secara teknis maupun manajemen dsb. Juga mengikuti arah kebijakan dari cabinet. SEtiap menteri punya kontrak kerja dgn presiden, misalnya tahun ini, kontrak kerjanya adalah kepanduan/pramuka, berarti seluruh personal harus tahu tentang pramuka, tidak hanya seragamnya saja. Apa pramuka itu, jangan sampai salah misalnya dalam memakai seragam. Berarti untuk pengarusutamaan SDM juga harus menguasai konsepnya.

Dari sisi informasi, tentunya dalam sinergi lintas sektor ketersediaan informasi pasti penting, seperti apa(D)

Dari segi data memang sulit, makanya saya peenah waktu di kewirausahaan, tentunya perlu data tetnag kegiatan2 kewirausahaan, namun datanya memang agak sulit diperoleh. Sekarang kegiatan sudah by name by kegiatan, mudah2an itu bisam mempermudah membuat datanya. Kami di tenaga kepemudaan juga begitu. Ini hal baru, kami baru merencanakan membuat data di 2012. SEkarang kegiatannya baru given, jadi sambil berjalan sambil merumuskan apa itu tenaga kepemudaan.

Dari segi wewenang, apakah utk sinergi harmonisasi ada di kedeputan atau seperti apa? (D)

Wewenang utk melakukan kemitraan ada asdepnya sendiri, namun di tingkat teknis, di setiap aktivitas kegaitannya bersinergi dan bekerjasama. Ada yg dituangkan bentuk MoU ada jg tdk. Tp perlu dipilah2 mana MoU yg berjalan atau tidak.

Jadi secara teknis bisa di tiap kegiatan, tp secara struktur ada di kedeputan(D)

Iya, sebagai contoh kita ada kerjasama S2 dgn UGm, spt di Ui ada pemuda yg dpt beasiswa. Sebelum kita melaksanakan penerimaan mahsw hrs ada MoUnya, baru pelaksanaan kegiatan.

Fasilitas pendukung, sarana, prasarana, dana(D)

Dari segi sarana prasarana dan dana memang dana yg dikelola menpora memang sedikit, tapi sebetulnya anggaran kepemudaan di KL lain yg menangani kepemudaan kalau anggaran digabung cukup banyak. Tapi kita tidak tahu anggaran di kementrian lain spt kemensos, pertanian berapa jumlahnya. dari sarana prasarana direncanakan akan dibuat youth center, sudah ada di bulungan, gelanggang OR di jatinegara, itu kan pusat kegiatan pemuda. Ke depan akan dibanun lagi, skrg lagi dibuat di beberapa wilayah. Kami membangun kesukarelawanan, kalau sudah ada youth center bisa dipakai. Ada asdep yg membangun fisik, ada yg mengisinya.

Pak Menteri sudah menyampaikan, manajemen jangan manajemen yg berdiri sendiri2, tp manajemen gedhek, yaitu saling berkait agar lentur dan kuat dan bersatu. Masing2 asdep juga bersinergi, juga seemua deputi bergabung dalam kegiatan. Jadi sinergi selain I dalam internal sendiri juga di luar antar KL.

Sikap dalam pengarusutamaan pasti juga mendukung,?

Iya, misalnya dalam HSP, Haornas semua pasti akan mendukung ke sana.

Dalam struktur birokrasi, sebaiknya seandainya kebijakan ini dilaksanakan apakah tersendiri atau masuk ke setiap unit teknis?(D)

Pengarusutamaan pemuda sebetulnya sudah ditangani oleh deputi teknis, kepemudaan pasti akan menangani pengarusutamaan pemuda. Scara struktur fungsi ada staf ahli PUPO, beliau akan memberikan masukan kepada menteri, diminta atau tidak, selain itu akan memberi masukan pd deputi terkait. Kalau badan tersendiri nanti akan menimbulkan bias karena di teknis sudah ada yg menangani, jd staf ahli yg harus member masukan2.

Faktor penghambat yg mungkin akan ditemui, kendala2nya?(D)

Kebijakan PUPO pasti akan mendorong, tidak akan menjadi kendala, pasti akan mempercepat aktivitas2 dan masukan2. Kalau saya terbuka untuk diberikan masukan atau saran, kalau memang itu pas dan baik utk kebijakan dan pelaksanaan program kenapa tidak. Kalau kendala tidak, pasti kebijakannya PUPO untuk mendorong teman2 teknis untuk focus dan melaksanakan kegiatan lebih baik.

Faktor pendukung agar bisa berjalan dgn mulus?(D)

Karena ini hal baru, saya belum ada dari staf ahli memberi masukan kepada kami. Satu hal pernah bekerjasama di kesukarelawanan, karena beliau pernah di SDP, beliau memberi masukan ttg kegiatan tsb, ttg peserta2nya siapa saja. Selama ini saya lebih didukung dgn komunikasi scr langsung. Karena memang masih baru lebih banyak sosialisasi dan komunikasi(D).

Dalam persepsi ibu pengarusutamaan itu seperti apa seharusnya?(D)

Karena ini masih baru, bagaimana membangun komunikasi, untuk sementara ini baru pada tahapan itu, ke depan kalau beliau sudah punya draft kebijakan akan lebih baik dan bisa disosialisasikan kepada teman2 di teknis.

Faktor kunci keberhasilan?(D)

Kalau ini ada barang atau naskah, tidak pernah dikomunikasikan siapa yg tahu, kebijakan yg bagus harus disosialisasikan. Kalau sudah ada kebijakan, disosialisasikan, penerapannya seperti apa. Jika naskahnya sudah jadi, disosialisasikan, dari staf ahli sendiri membuka pintu lebar2 kalau ada kendala mempersilahkan berkonsultasi, ada komunikasi dan keterbukaan utk berdiskusi dan memberi masukan.

Masukan lain? (D)

Untuk pengarusutamaan pemuda, krn baru membuat naskah, sosialisasi, ada komunikasi, ada keterbukaan juga harus ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Dari monev ini data masuk ke pengarusutamaan utk membuat kebijakan, harus ada data di PUP sbg dasar membuat kebijakan selanjutnya. Jadi harus ada monev setiap pelaksanaan event sbg bahan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Lalu Wildan

Deputi Harmonisasi dan Kemitraan, Kementerian Pemuda dan Olahraga RI

Tanggal wawancara 6 Juni 2011

Tujuan penelitian...(D)

Esensi kementerian ini adl bgmn membuat bangsa kita menjadi harum di dunia, yaitu dgn olahraga. Kemenpora berusaha untuk mengibarkan merah putih, di bidang olahraga, meningkatkan prestasi. Untuk pemudanya bgmn menyiapkan generasi penerus yang lebih berkualitas. Karena kelangsungan berbangsa tergantung pada siapa penerusnya. Itu esensinya. Dengan tujuan2 tersebut, dihadapkan dengan realitas akan menjadi banyak hal menjadi persoalan yg dihadapi, sementara Kemenpora memiliki keterbatasan bahwa dari segi kelembagaan namanya kementerian bukan departemen. Maka domainnya lebih kepada regulasi, kebijakan2. Siapa yang melaksanakan berarti banyak, baik di pemerintah, pusat dan daerah, juga masyarakat. Disanalah mungkin konteks pengarusutamaan itu, jadi bagaimana kita mendorong, mensosialisasikan, mengadvokasi, setelah ada regulasi yg baik dulu. Artinya kita kembangkan regulasi, regulasi yg baik ini kita sosialisasikan, kita advokasi dan edukasi spy stakeholder, pemerintah, pusat dan daerah, masyarakat menangkap apa pentingnya kepemudaan dan olahraga, supaya bisa bersama-sama mencapai tujuan itu.

Jadi bentuk pelibatan para pihak ada dalam RAN itu? (D)

Betul..kita duduk bersama, dengan Bappenas utk menyusun RAN, setelah itu kementerian memonitornya, sejauh mana pelaksanaan.

Jadi dalam hal ini menurut Bapak siapa paling berperan sebagai leading sektornya? Mungkin diperlukan beberapa pihak sebagai penggerak?(D)

Tentunya jika dicek dalam amanah UU kita sebagai leading dlm bidang kepemudaan, tentu bukan berarti harus uangnya, yang penting adalah dalam mengembangkan regulasi atau kebijakan umumnya, baru nanti kita mencoba untuk mensinkronkan, menularkan, supaya walaupun uangnya ada dimanapun, programnya ada dimanapun, tetap ada sinergi untuk arah dan visi kepemudaan itu. Banyak aspeknya, ada kesadaran, pengembangan, pemberdayaan. Kita lebih kepada memberikan guidance atau koridornya. Kita mengedukasikannya, mengkomunikasikannya kepada pihak2 terkait yang mempunyai program itu. Kita tidak juga mau menarik kesini semua, biarkan saja uangnya dimanapun, kementerian agama misalnya buat program apa dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita cek, kegiatan di kemenpora ada dua macam, yaitu membuat regulasi dan ada kegiatan2 tertentu yg sebenarnya pilot project dalam mengembangkan kebijakan sebenarnya. Krn kegiatan2 yg permanen mustinya di kementerian atau di daerah atau di dinas2, jadi kita hanya di koridornya saja.

Berarti mungkin ada suatu system atau mekanisme yg dibangun agar konsep pengarusutamaan ini bisa diterapkan, agar pihak2 tadi mau, seperti apa pak?(D)

Mungkin melalui instrument RAN, yang sekarang sedang dikembangkan adalah SPM Standar Pelayanan Minimal di kepemudaan dan olahraga. Ini memang perintah UU, juga berkaitan dgn MENPAN untuk menjadi kinerja pemerintahan. Urusan kewenangan pemuda dan olahraga sebenarnya sudah menjadi urusan wajib pemerintah kabupaten dan propinsi. Jadi kalau cek UU Pemerintah Daerah dia menjadi salah satu urusan wajib, urusan pemuda dan olahraga yang berwenang sebenarnya pemerintah daerah. Kita tinggal membuat standar, memonitornya, mengadvokasinya. Karena kalau tidak dilaksanakan standar tertentu yg minimal itu maka kinerja pemerintah daerah itu dalam bidang kepemudaan dan olahraga bisa rendah penilaiannya. Ada PP tentang evaluasi penyelenggaraan pemerintahan oleh Depdagri di bidang pemuda dan olahraga kita buat standarnya dan setelah itu kita advokasi agar hal tersebut dilakukan. Dengan adanya instrument SPM dan terbantu dia dalam komunikasi, kita promosikan ml stakeholder yg lain agar bisa menjadi isu yang mainstream di daerah, tidak menjadi isu2 pinggiran, biasanya isu2 kemiskinan yang lebih utama, bukan berarti itu dipinggirkan. Dalam hal ini kita bantu komunikasikan dengan stakeholder kepemudaan agar menjadi lebih diperhatikan oleh pemerintah. Sistemnya adalah SPM, krn dr segi normative sdh diatur UU, turunannya SPM itu, baru kemudian kita advokasi, kita monitor, bagi yg gapnya terlalu jauh dengan standar kita cek apa penyebabnya. Kalau penyebabnya benar2 karena kemampuan finansialnya yang kurang, mungkin kita kasih stimulant. Kita juga punya program kegiatan bantuan sarana prasarana olahraga dan pemuda. Bagi yang kita lihat sangat rendah kita kasih bantuan.

Berarti SPM bisa dibilang sebagai alat ukurnya. Apakah memang sedang dijalankan atau...(D)

Betul, sangat strategis, ini baru kita akan dimulai dirancang, sebagaimana diketahui kementerian ini baru, sempat timbul tenggelam, yang membuat SPM di kementerian lembaga ini juga masih jarang, seperti Lingkungan Hidup, Kesehatan, jadi belum semua kementerian membuat standar pelayanan dan ini masih kita kembangkan. Ini sangat strategis SPM ini.

Jadi sebenarnya ada suatu mekanisme atau cara agar komitmen ini bisa diikat kepada semua K/L, masyarakat/swasta, apa yang bisa mengikat agar pengarusutamaan ini dilakukan(D)

Kita sudah punya UU, kepemudaan, olahraga, sekarang ada pramuka. Kalau kita dalam UU banyak sekali peraturan2 yang mewajibkan, mewajibkan, pemerintah wajib menyediakan sarana apa...ada di UU banyak sekali..Ini berarti pegangan kita kuat sekali. Makanya harus lebih banyak kita komunikasikan agar ini tidak menjadi pepesan kosong, karena begitu menjadi UU harus menjadi komitmen bangsa, harus dilaksanakan, ini perintah

Berarti harus ada peraturan pelaksanaanya pak?(D)

Iya kan ada turunannya PP, misalnya untuk kepemudaan sudah maju ke presiden, PPemerintah tentang kepemimpinan, kewirausahaan, sarana prasarana, ini sudah disiapkan sekarang RPP tentang lembaga pernodalan pemuda, ini menjadi turunan dari komitmen2 untuk merealisir dan memperkuat lagi.

Langkah-langkah yg lebih konkrit, strateginya seperti apa(D)

Kita coba kembangkan beberapa kegiatan yang mengajak kebersamaan, yang melibatkan stakeholder, di promosi kita libatkan organisasi2nya, selain cabang2 olahraga ada juga POMI, yaitu olahraga masyarakat.

Kalau untuk pengarusutamaan pemuda sendiri khususnya strateginya? Mungkin kementerian lain akan menganggap hal ini akan menambah pekerjaan bagi mereka(D)

Makanya kita bersama-sama dengan Bappenas, artinya itulah strategi kemitraan, itulah membuat sekarang secara sistemik dan kelembagaan muncul deputi baru yaitu Deputi Harmonisasi dan Kemitraan, ada staf ahli pengarusutamaan, sekarang kita coba menggandeng perguruan tinggi2 untuk membuat pusat kajian kepemudaan, minggu lalu baru diresmikan dengan UGM, ini kami targetkan tahun ini 7-10 pusat2 kajian muncul di perguruan2 tinggi di seluruh Indonesia. Karena di dalam pengarusutamaan itu penting sekali kajian2, harus ada knowledge based nya, sementara kita tidak punya perangkat itu di kementerian ini, kemitraan, kita gandeng sumberdaya2 itu, kerjasama2, baru nanti dia yg akan membantu kita. Hal ini mungkin bukan hal baru, di kementerian wanita dulujuga ada pusat studi wanita, pusat kajian lingkungan hidup, harus didukung oleh knowledge based dalam program2. Jadi kita strateginya kemitraan itu, sudah muncul di UGM pusat kajian kepemudaan.

Yg juga ingin saya lihat adalah faktor2 apa yang nanti akan berpengaruh terhadap implementasi pengarusutamaan ini, pertama saya mau melihat factor komunikasi, sejauh mana komunikasi yang sudah dilaksanakan di kedeputian ini tentang pengarusutamaan pemuda(D)

Kita punya misalnya rapat2 koordinasi, dengan stakeholdernya, PT, K/L, dan juga dgn OKP2, pusat2 kajian. Jadi kita punya kegiatan spt itu, untuk menggandeng dan mempererat. Kita juga punya kegiatan dengan dunia usaha, kita fasilitasi pertemuan dunia usaha dengan pemuda, apa potensi2 yg ada di swasta bisa diakses. Swasta punya dana CSR spt bank, ini kita fasilitasi, kita dorong, ketuk dia, bagaimana menyambungkan dan mengakses dia. berarti sudah dilakukan ya pak, sosialisasi dan komunikasi. Kita juga punya Tusi kemitraan, tp secara teknis juga kedeputian yang melaksanakan, ada Deputy 1 pemberdayaan, deputy 2, kan begitu. Sosialisasi UU juga dilakukan oleh biro humas kita

Jadi memang dlm sosialisasi itu juga ditekankan pentingnya pengarusutamaan pemuda dalam menunjang pembangunan nasional(D)

Kita coba sosialisasikan substansi UU tsb, bagaimana strategi2nya, bagaimana juga pentingnya kebersamaan komponen2 bangsa.

Menurut Bapak seberapa banyak komunikasi ini harus dilakukan(D)

Harus terus menerus, disini kita punya unit yang menangani promosi dan penghargaan kepemudaan. Ini juga yang melaksanakan sebagai tugas2 komunikasi. Kita kasih penghargaan kpd pemuda2 pelopor yang berkarya. Dengan apresiasi ini diharapkan dia menjadi inspirasi bagi masyarakat luas

Berarti dalam komunikasi itu, semua pihak sumberdaya yang ada di Kemenpora sendiri harus cukup memahami pengarusutamaan pemuda atau cukup memiliki konsep yang kuat dan info yg cukup(D)

Makanya kita tingkatkan . sekarang arah SDM internal, kita tata keorganisasiannya, sekarang arahan Pak Menteri bahwa kementerian ini harus yang lebih muda-muda. Sekarang kita sudah hamper...usia2 pensiun 56 tidak ada, dibawah 56 semua, Cuma ada satu. Ini juga bagian pertanda komitmen, sebagai contoh juga supaya yang lebih muda.

Kemudian dari sisi sumberdaya dalam mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan pemuda ini dari segi jumlah maupun kapasitasnya kira2 apakah bisa, mampu dalam mengimplementasikannya(D)

Makanya kita sangat ini tentang menggandeng, memperbanyak mitra, sebagai bagian dari strategi, karena tidak mungkin kita laksanakan, juga daerah, maka strategi kemitraan itu yang coba kita perkuat, bahwa sudah dengan BUMN, bagaimana kita mendorong dunia usaha. Sekarang Pak Menteri, kemaren kita bikin kajian tentang fasilitas perpajakan yang dimungkinkan, untuk lebih bisa mendorong partisipasi dunia swasta

Berarti selain kita menggandeng, kapasitas di dalam juga harus diperkuat ya SDMnya(D)

Tanda kita sekarang bahwa personil2 yg tadinya kurang kita coba isi, kita rekrut dari luar, menambah, ada penyegaran, memperkuat. Juga dari segi bujet kita meningkat, dari tahun ke tahun terjadi peningkatan, yang tahun kemarin kita bisa dapat anggaran untuk membangun percontohan gelanggang pemuda, tahun lalu lima, tahun ini lima, di propinsi kita taruh gelanggang pemuda yang bisa memfasilitasi yang terjadi interaksi antara kepemimpinan, intelektual, ada seni dan olahraganya, dan juga meleak IT, kita coba desain terpadu.

Dari sisi ketersediaan informasi agar kebijakan pengarusutamaan ini bisa berjalan, bagaimana informasinya cukup tersedia atau bagaimana?(D)

Memang hal ini penting selain untuk akuntabilitas dan menjadi lebih syiarnya. Kita sekarang disamping cara2 biasa, kita bikin portal kemenpora.go.id, terupdate terus. Biasanya webnya kementerian kurang terupdate, tapi portal kita terus terupdate. Jadi apapun kegiatan, juga ada link2nya tentang database dan program2, lelang, pengadaan, disamping kita juga punya media center di lantai 1. Itu untuk mendukung, disamping kita punya humas. Jadi sadar kita tentang perlunya dikomunikasikan, disiapkan perangkat2nya

Kalau dari data-data penunjangnya seperti apa Pak seperti pendidikannya seperti apa dsb(D)

Sekarang sedang dibuat, karena BPS biasanya lebih makro. Di Deputi 1 sedang membuat profil pemuda supaya kita bisa lebih tau dan bila perlu ada wilayah2nya. Ini sedang dilakukan, ok bahan dasarnya dari Sendus BPS kita coba lebh dalami diolah lagi, saya dengar sedang dibikin profil pemuda itu. Saya belum tahu ruang lingkup dan kedalamannya. Memang kita musti menjadi pemasok data, misalnya Dispora dia input kepada kementerian atau dinas2 lain, saling kash data supaya perencanaan lebih tepat, kita tinggal supply. Kalau mau masuk ke suatu daerah profilnya tersedia. Itulah pentingnya sebagai bahan kita untuk pengarusutamaan, kita harus kaya, kita input, bisa untuk mengarahkan secara tidak langsung, misalnya data di sana pemudanya ada sekian tapi belum tersentuh. Kita harus kuat di data, ke depan kita juga akan ke sana. Jadi dalam kita mengadvokasi, komunikasi, supervise, harus kita kuat data. Makanya tentang kajian kami gandeng supaya ke depan bisa lebih focus terarah dan sinergi.

Dari segi kewenangan agar kebijakan pengarusutamaan, kalau sekarang ada staf khusus, kalau nanti bagaimana pak(D)

Ini fokus-fokus, strategi jangka pendek, yang bagus dia buat, menyatu di dalam, bahwa sebenarnya pengarusutamaan dikerjakan oleh semua lini. Sekarang ini bagian dari untuk stressing, mengingatkan, padahal dia ada di mana2.. pasti dia bukan sesuatu yang permanen. Nah semua gerak ini sebenarnya mengarusutamakan, pada saat dia berkinerja baik dia akan menjadi arus utama

Fasilitas pendukung(D)

Kita punya aspek promosi dan penghargaan, dari segi bujet juga tercermin meningkat setiap tahun

Dari segi perimbangannya pemuda dan olahraga bagaimana setiap tahun, apakah memang lebih banyak olahraganya, bagaimana?(D)

Memang kalo kita lihat dalam satu tempat, satu saat memang terkesan kami mungkin rasionya 70 30, tapi yang olahraga juga pemuda, yang ada dimana2, Depsos, Karang Taruna, Diknas, kementerian lain. Tidak bisa kita potret dari perbandingan itu. Karena yg berolahraga yg muda2 juga. Tergantung melihatnya dari mana. Kita juga usahakan kenapa menjadi bujet OR lebih tinggi, karena event2 nasional k ada penyelenggaraannya, itu yg membuat meningkat, dan juga prasarana dan sarana OR, Kalau pemuda di sini kecil tapi plus plusnya ada dimana-mana. Jadi tidak bisa langsung mengatakan kurang perhatian thd pemuda kalau hanya lihat bujetnya.

Kemudian tentang sikap/disposisi tentang pelaksanaan pengarusutamaan pemuda dari dalam kementerian ini(D)

Itu yg kita coba, tentang semangat, kita anggap bahwa sangat2 penting mengurus pemuda, menjadi isu yg penting. Itu kita coba ingatkan daerah, mungkin mengentaskan kemiskinan bisa lewat olahraga. Bagaimana pelari2 itu yang tidak pakai sepatu mengharumkan, kesejahteraannya juga harus diperhatikan, membawa perubahan baik pada pribadinya, lingkungannya. Kita himbau daerah2 agar memberikan perhatian. Tidak hanya prestasi olahraga, bisa juga mengurangi bujet kesehatan, produktivitas meningkat. Makanya kita dorong untuk bisa menjadi salah satu budaya, gaya hidup modern, yaitu dengan berolahraga.

Kalau tentang struktur organisasi, yang ada di kementerian ini agar kebijakan pengarusutamaan bisa berjalan, apakah perlu ada pokja tersendiri atau sudah cukup(D)

Kita menerapkan organsiasi baru, sekarang 2 deputi yg menangani kepemudaan, yaitu pemberdayaan dan pengembangan. Deputi kemitraan ini mendukung kedua deputi ini, baik dari urusan sarana prasarana, promosi penghargaan dan standarisasi. Mungkin kita bergerak bagaimana standarisasi kurikulum pelatihan kepemimpinan, sekarang sedang dikembangkan. Sekarang menjadi lebih focus secara kelembagaan, fungsi dan tugas sudah tertata, harmonisasi dan kemitraan mendukung.

Kalau dari siklus pembangunan seperti perencanaan, pelaksanaan, sampai monev bagaimana agar pengarusutamaan bisa dimasukkan (D)

Makanya menjadi salah satu instrument kita itu di SPM, dan juga yang pertama dia menjadi kewenangan wajib Pemda, sehingga harus dilaksanakan urusan itu. Melaksanakan urusan ternasuk harus ada perencanaan, budgeting, yaitu tentang besar kecilnya perhatian. Ini juga terkait dgn kemampuan fiscal daerah yg bervariasi. Sebenarnya kalau kita mau mengikuti system itu, kalau dia sudah menjadi kewenangan wajib, harus dilakukan, kalau tidak kinerjanya jadi jomplang. Berpengaruh terhadap performance kinerja pemerintahan, karena urusan pemuda dan olahraga menjadi kewenangan wajib. Saya kira makanya menjadi kita ingatkan juga pada saat perampingan kelembagaan, bahwa kita ingatkan apakah lembaganya menjadi satu dinas asal memadai, kita ingatkan leewat rakor. Secara bertahap yang tadinya tidak ada dinas khusus di daerah muncul Disnas Pemnuda dan Olahraga, ini menandai komitmen darah, ini bagian yg kita dorong. Kalau ada lembaganya pasti anggarannya lebih besar.

Kendala yang mungkin dihadapi(D)

Kendala yang pertama memang menjadi besarnya persoalan bangsa. Diantara ini menjadi seringkali perhatian menjadi skala prioritas. Tapi saat bilang pendidikan, kemiskinan, pengangguran, sebenarnya yang diatasi adalah pemuda juga. Yang selalu menjadi program prioritas adalah pengentasan kemiskinan, pendidikan, porsi pemuda juga cukup besar di dalam segmen2 lapisan penduduk, shg scr tidak langsung mengatasi pemuda. Yang kita maukan adalah tentang, mungkin kita sebut mempertajam atau lebih berkualitas, sentuhan2 tentang pemuda itu, tapi kalau dari segi penanganan program kegiatan sudah banyak. Sekarang bagaimana kita tingkatkan lagi kualitasnya, misalnya kepemimpinan, bagaimana programnya supaya lebih bagus dan lebih diperbanyak lagi supaya lebih focus. Artinya diperbanyak lagi. Makanya kita butuhkan profil, tahu persis siapa, dimana, berapa, jumlah pemuda, bagaimana karakteristiknya pendidikannya dsb supaya lebih terarah. Misalnya tentang kewirausahaan, agar kita tahu siapa yang berwirausaha, diharapkan yg berpendidikan, bukan org yg terpaksa. Sehingga kita pilah2 supaya dipertajam lagi. Agar diharapkan by design, agar banyak orang maju karena direncanakan secara sistematis, jangan yg mengalir saja, lebih terencana. Demikian yg kita harapkan dari program2 kepemudaan.

Faktor pendukung?(D)

Pendukungnya komitmen, artinya agar semakin ngotot para penyelenggara ini dgn program2yg berkualitas supaya menghasilkan orang2 muda yg berkualitas sbg persiapan ke depan. Juga tentang kesadaran tentang mutu, komitmen tentang mutu, mutu program, proses, kualitas yg lebih baik, penggunaan anggaran juga mengikuti, semuanya harus excellent, baik penyelenggara maupun sasaran kita yang muda, kita dorong dan fasilitasi.

Faktor kunci keberhasilan agar sukses?(D)

Kuncinya kita rumuskan kebijakan yang baik, yang berdasarkan kajian, diterima oleh stakeholder yg banyak supaya jadi komitmen, diimbangi oleh semangat penyelenggara yang kuat, semangat tentang mutu. Baru kemudian dukungan anggaran. Hanya semangat tapi kalau program tidak berkualitas, atau uang banyak tapi tidak ada komitmen mutu, penyelenggara tidak serius tidak bisa .

Prof. Dr. Nila F. Moeloek, Sp.M.

Utusan Khusus Presiden RI untuk MDGs

Tanggal wawancara 27 Mei 2011

Yang pertama mungkin dilihat secara umum dulu, menurut ibu bagaimana pembangunan kepemudaan yang sedang berlangsung di Indonesia sekarang ini.

(D)

Kalau saya lihat gini ya, mungkin saya review. Coba kita diskusikan ya. Kan penduduk kita ini sekarang yang sekarang presentasinya lebih banyak.ada banyak, Ini triple burden yang terjadi. Jadi dulu kita hanya nanti ada penyakit infeksi dan penyakit non infeksi. Tapi sebenarnya 3 kalau menurut saya. Satu adalah anak-anak, jadi anak-anak ini harus diimunisasi atau gizi baik. Ini adalah tugas kita kan, karena dia harus tumbuh kembang. Kita ingin pemuda tentu dengan IQ yang baik ya. Tapi memang dasarnya disini. Di mulai tetep gak bisa,

dia hanya di tengah-tengah. Jadi harus dimulai dari dasar. Kemudian dia disini adalah pasangan usia yang subur, nah disini juga populasi makin lama makin meningkat. Ini mengerikan sekali. Kita sekarang jelas populasi kita naik 23.5 juta yang harusnya dicapai di 2015. Sekarang sudah dicapai menjadi 237.6 juta. Nah, ini orangtua ini juga nambah, penyakitnya banyak. Jantung, diabet, katarak, penyakit orangtua. Nah, jadi kita kembali kesini. Kita gak bisa kalau intervensi hanya di tengah ini. Karena itu saya selalu mengambil kedaras, kebawah, siapa yang mau mendidik anak yang baik ini? Ibu, perempuan. Pemuda aja sih, pemudi. Perempuan ini mestinya, sangat baik sekali mengerti ada pengetahuan, saya gak bilang pinter semua kayak kamu, tapi minimal dia mesti ada sifat perempuannya, punya pengetahuan, informasi. Sayangnya, saya hafai. 33% tidak tamat SD. Nah, disini kita lihat terutama di desa. Sekarang ini akan menghasilkan anak perempuannya juga tidak pandai, cepat kawin, cerai, terus TKW, apalagi nih jadi masalah PSK dan sebagainya karena dia mau hidup. Nah jadi sekarang ini kalau kita lihat perempuan ini lho, ringkih sekali disini. Jadi disini negatifnya banyak. Si cowok ini juga sekarang hanya buruh harian kita lihat negatifnya. Karena dia tidak punya juga kepandaian yang memadai. Jadi walaupun pemerintah bikin ekonomi, bikin pabrik, tapi kalau SDM nya rendah bagaimana? Kita tetap aja kalah sama orang asing. Jadi investasinya, investasi asing.

Kalau mau bicara tentang menpora menjadi *mainstream* dari pemuda menurut saya tidak bisa dilihat hanya dari kebijakan. Kebijakan disini pemuda harus berolahraga. Top down. Tapi sebenarnya kita mesti lihat bottom nya ini gimana? Ini yang saya komentor dengan bottom ini tadi. Bottom ini juga harus kita angkat ke atas ini peraturan turun ke bawah. Jadi menpora kalau mau main streaming dia harus mulai dari dasar. Sekarang kita anggap data dasar dari pemuda pemudi mungkin dari usia yang pasangan subur Paling banyak SMP ke bawah. Ini paling besar. SD, tidak tamat SD. Kita tanya juga mutu guru bagaimana, kualitasnya? Itu yang saya lihat. Terus kedua kalau perempuan. Perempuan ataupun laki-laki. Kenapa HIV AIDS tinggi sekali di sini dan tambah lama tambah tinggi. Apakah kita ada diajarkan tentang organ reproduksi? Dan nanti akhirnya baru semua ini tadi karena sekolah dan sebagainya, timbullah masalah kemiskinan. Kalau secara bappenas angkanya hampir 14 atau 15% itu tapi sama dengan 31 juta penduduk ini hidup yang 1 dolar. Kedua kita perlu sandang, kemudian akses kesehatan dan akses pendidikan. Kita jatuh miskin kalau kita sakit sekarang.

Jadi prof, diantara itu kan semuanya tadi kita lihat ada pendidikan, kesehatan, pada akhirnya mengarah kepada kemiskinan bisa ditarik gak prof benang merahnya, permasalahan utamanya? (D)

Saya sih permasalahan utamanya negara kita sebenarnya menurut saya. Jadi mungkin kamu mengatakan kita seharusnya mempunyai system. Kesisteman kalau saya bilang. Tadi kalau kamu mau ambil dari kesehatan dulu, ibu-ibunya harus mengerti bagaimana mendidik anaknya dan menjaga kesehatan anaknya, bagaimana member ASI misalnya.

Berarti tadi memang harusnya membangun system terlebih dahulu. (D)

Jadi sistemnya baik kesehatan dan baik juga kepada pendidikan. Sistemnya bagaimana kita membuat keluarga yang harmonis. Dengan kita mendapatkan nanti remaja yang tadi kreatif, inovatif, mandiri.

Kalau dilihat dari penyebabnya, bagaimana prof? ada pandangan tentang penyebab? Itu semua kan menjadi satu system (D)

Penyebabnya karena kita sekarang system kesehatan kita kan tidak terstruktur. Kedua pendidikan, apakah pendidikan kita ini juga tidak terstruktur, kualitasnya dipertanyakan. Karena itu kamu lebih baik kritik pemerintah. Jangan regulasi melulu.

Berarti kan prof, itu kan dalam hal ini kemenpora punya inisiatif untuk kebijakan ini. tapi tentu saja melihat sector ada kesehatan, pendidikan, ekonomi, berarti kan ada pihak-pihak yang saling terkait. (D)

Lintas sector. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Jadi, apalagi pemuda. Harusnya ini pemuda ini tidak sendiri tapi lintas sector. Mulai dari kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut prof, kira-kira bentuk kerjasama lintas sector, pelibatan para pihak itu seperti apa (D)

Kamu gak usah terlalu detail. Tapi kamu bilang kan kalau kita mau pemuda sehat pertama kita sudah komentar. Dari bayi disehatin. Artinya kesehatannya, sistemnya gimana, pendidikannya bagaimana, supaya dia inenjadi leadership. Leadership itu sebenarnya satu, jujur, disiplin

Dalam sinergi itu prof, siapa yang memimpin, kira-kira sebagai leading sector dalam hal ini kan mungkin kalau kemenpora dia berinisiatif (D)

Dia harus bisa meyakinkan lintas sektoral itu kepada kementerian yang lain.

Dalam hal ini menpora ya (D)

Iya. Pemuda kita juga harus gizi baik, paradigma sehat.

Berarti memang harus ada terutama dalam lintas sector tadi ada komitmen yang memang harus dipegang oleh pemegang kebijakan di tiap-tiap kementerian, lembaga dan (D)

Tidak mungkin kita tidak lintas sektor. MDGs itu 8 point tidak bisa dipisah-pisah. Semuanya berantai.

Kalau gitu ada system seperti apa menurut prof yang harus dibangun (D)

Dia harus mengerti persoalan lain untuk mengangkat pemuda menjadi sehat, kreatif, mandiri.

Apakah ada suatu bentuk apa ya, mungkin kalau sector-sector itu menganggcp dibidang pembangunan kepemudaan mungkin merasa apa yang bisa mengikat (D)

Ada. Kebijakan yang dia mau dibuat kalau bikin kebijakan pemuda harus leadership. Jadi memang harus ada semacam pemikiran holistik yang menyeluruh.

Kalau strateginya kira-kira bagaimana atau langkah-langkahnya yang menuju kesitu (D)

Ya harus dimengerti oleh semua kementerian.

Jadi memang kebijakan lintas sector itu sinergi itu memang setuju untuk dikomunikasikan lebih banyak. (D)

Jadi kalau kita mengharapkan pemuda yang berkualitas, pemuda yang mempunyai sifat leadership, itu, kesimpulan kamu, tidak bisa kita instan. Jadi tidak bisa apa yang kita terima sekarang, saya ubah sekarang, tidak mungkin. Jadi tidak bisa kebijakan ini hanya melihat secara *cross sectional*, sewaktu saja. Jadi kita harus memang melihat dari dasarnya. kalau saya sih kesimpulannya itu. Jadi dari pembinaan atau perencanaan keluarga yang baik.

Kira-kira apa yang menghambat ini (D)

Saya bilang perempuan harus pandai.

Kira-kira faktor yang bisa mendukung ini supaya ini bisa berjalan, kebijakan ini kira-kira ada faktor pendukung, atau apa (D)

Pelaksananya k harus mengerti dulu apa masalahnya dan dianalisa.

Factor kunci keberhasilan supaya ini semua bersinergi dan antar ini bisa berjalan (D)

Ada yang berpendapat dari sumber daya ekonomi. Tapi menurut saya kita harus edukasi, mundur lagi sedikit, dari mula. Kalau mau di tengah tentang reproduksi. Saya mau manusia menghargai apa yang diberikan Tuhan.

Masukan lain yang perlu ditekankan sehubungan kebijakan ini.

Usul analisis yang setepat2nya, dengan berpikir secara holistic, tidak sektoral dan kita melihat fakta yang ada dan melihat bgmn mendayaungkitkan keadaan spt sekarang. Penduduk juga mustinya diatur dan berkualitas, jadi SDMnya berkualitas.

Nurhasan Zaidi

Anggota DPR RI Komisi X

Tanggal wawancara 25 Mei 2011

Bagaimana pandangan Bapak tentang pembangunan kepemudaan yang ada di Indonesia sekarang. Sejauh mana sudah dilakukan(D).

Jadi kalau saya lihat secara umum, begini. Bahwa secara umum pergeseran kaum muda terutama pada skala pasca reformasi ini itu kan distribusi peran kepemudaan itu luar biasa sekarang. Akses dan informasi luar biasa, begitu cepat. Dan kalau kita bicara membatasi level pemuda, UU yang sekarang dirumuskan oleh UU kepemudaan itu kan 30 tahun. Orang yang menjadi aktivis kepemudaannya. Menjadi aktivis di organisasi kepemudaan ini sebuah terobosan luar biasa. Karena bagi kita ini efek kaderisasi pembelajaran, karena kalau kita perhatikan sekarang ini sebelum ada UU itu walaupun ada transisi 2 tahun. Nah sekarang dalam konteks sekarang, di dalam peran pembangunan ini, dalam konteks peran proses pembangunan, akses, hampir semua lini diprogram kementerian itu punya program kepemudaan. Fungsi kepemudaan itu kalau anda pelajari di APBN di anggaran setiap kementerian, pemuda tani, pemuda koperasi, di pemuda kesehatan jadi diperkirakan bahkan dari sisi anggaran, fungsi anggaran kepemudaan itu hampir sekitar 60, 50 triliun. Padahal di kementerian karena ini menteri Negara Cuma puluhan, ratusan miliar lah. Sangat kecil, yang lebih banyak anggaran olahraga. Jadi sebenarnya fungsi anggaran saja di kepemudaan itu hampir di setiap kementerian itu terutama di menteri pendidikan, di kesehatan, di pertanian,

di dalam negeri bahkan, depdagri itu banyak. Jadi sebenarnya pemerintah memberikan porsi peran di dalam anggaran maupun program luar biasa. Nah, sekarang persoalannya adalah pola koordinasi. Yang punya kebijakan kan di kementerian pemuda dan olahraga. Kebijakan regulasi kepemudaannya. Nah sekarang yang diperlukan adalah pola koordinasi antar kementerian atau antar instansi terkait. Makanya di dinas-dinas pemuda di tingkat kabupaten atau propinsi, dinas-dinas itu suka digabung. Dinas pemuda, olahraga dan pendidikan. Atau dinas pemuda dan budaya pariwisata. Digabung, karena di kebudayaan dan pariwisata juga ada irisan program kepemudaan dan pariwisata juga. Jadi masih lemah di kita itu adalah pola koordinasi dan terintegrasi antar kementerian ini. Satu sisi kemenpora punya regulasi bagaimana regulasi itu supaya optimal bisa, karena program sendiri tanpa didorong oleh stimulan anggaran, ini program juga tidak lancar. Makanya ketika saya sering turun ke daerah pada mengeluh masalah anggaran, karena kan nyaris tidak ada tetesan ke bawah. Sebenarnya kalau koordinasinya bagus, program tentang kepemudaan itu di seluruh kementerian itu banyak luar biasa.

Jadi menurut bapak, bentuk pelibatan kementerian-kementria tersebut bentuknya keterlibatan secara konkrit salah satunya tercerminnya dari anggaran (D).

Pasti mereka kalau mengalokasikan anggaran tersebut berarti mereka konsen sebenarnya ya. Keterlibatan mereka ke dalam pembangunan kepemudaan.

Menurut bapak, pihak yang paling berkompeten untuk menjadi leading sektornya (D)

Ya, memang ini disini harus penanggungjawab utamanya di kementerian pemuda dan olahraga. Untuk mengkoordinasikan titik lemah kita di birokrat, sebenarnya. Mengkoordinasikan bagaimana akses yang bisa sinergi seperti program pertanian. Sekarang, orang desa ngapain rame-rame ke kota. Sumberdaya perekonomian, petani, peternakan, luar biasa. itu kan? Nah ini di kemenpora itu yang harus punya proaktif memanage potensi-potensi yang ada. Secara peran, sebenarnya peran pemuda kita di negeri kita setelah reformasi itu luar biasa sekarang. Artinya peran-peran sekarang ini kan orang lebih melihat kepada kapasitasnya.

Jadi menurut bapak kalau memang kemenpora itu ingin menggagas suatu kebijakan pengarus utamaan menjadi relevan ya pak dalam hal ini dalam konteks sinergi lintas sector itu karena mereka sekarang sedang menggulirkan gitu menyusun, menyusun rancangan kebijakan untuk pengarus utamaan pemuda itu.(D)

Dengan mengkoordinasikan dengan kementerian. Mungkin belasan kementerian yang terkait dengan itu.16 kementerian, betul. Yang mempunyai fungsi kepemudaan. Yang punya fungsi entrepreneur saja pemberdayaan ekonomi itu fungsinya belasan juga di kementerian fungsi enterpreneur ya dan itu kebanyakan enterpreneur juga yang ditumbuhkan anak-anak muda. Fungsi pendidikan saja di 18 kementerian. Karena kan tentara punya AKABRI, kementriann kesehatan punya sekolah dinas kesehatan, dalam negeri punya STPDN. Kayak begitu.

Bentuk komitmen seperti apa yang konkrit yang harus dimiliki instansi-instansi itu pak, sehingga terlihat mereka itu memiliki komitmen terhadap pembangunan kepemudaan, bentuknya seperti apa (D)

Kalau selama ini saya lihat belum punya design yang terkoordinasi baik dengan kemenegpora masih jalan masing-masing, designnya itu tidak, kayak design tentang penanggulangan masalah sosial kemiskinan. Ini kan masing-masing kementerian sepertinya berebut anggaran dalam fungsi ini kayak pingin punya sinterklaus semua. Seperti anggaran pendidikan diarahkan oleh UUD 20%. Otomatis dari 1200 triliun APBN tiap tahun kurang lebih 20% amanat UUD itu sudah 240 triliun sehingga setiap kementerian yang punya program pendidikan otomatis dapat angka 20% itu.

Berarti di dalamnya termasuk (D)

Ya kepemudaan juga begitu

System yang harus dibangun jadi seperti apa. Jadi yang bisa mengikat semua itu.

Mengikat semua kementerian dan lembaga (D)

Ya memang ini regulasinya ada di menko. Di presiden. Dan DPR juga di Panggar besar

Secara konkrit strateginya seperti apa pak, menurut bapak? Strateginya supaya ini bisa berjalan. Langkah-langkahnya (D)

Ya strateginya pertama ada rensra bersama tentang. Kayak di, nih contoh ya. Saya belum baca detail tentang kepemudaan ya, tapi itu gambaran umumnya ya. Seperti di pendidikan nasional, Renstra pendidikan nasional kita juga belum jelas. Yang ada baru rensra kementerian pendidikan nasional, tapi rensra grand design pendidikan nasional kita ini siapa yang penanggungjawab yang mendesign? Porsi orang sarjana kesehatan, kedokteran, sarjana pertanian, sekolah kementerian dalam negeri, design itu kita belum punya, belum ada kejelasan termasuk mendesign kepemudaan. Tapi dengan UU kepemudaan, sebenarnya sudah terobosan yang luar biasa. Itu sisi tergambar dalam UU kepemudaan sebagai mau kemana pemuda kita ke depan. Paling tidak itu untuk proses membingkai UU kepemudaan kita. Tapi dalam porsi rensra masa depan kepemudaan kita itu ya saya belum punya gambaran.

Menurut bapak kalau yang dilihat ini kendala apa yang dihadapi untuk sinergi lintas sektor untuk kebijakan pembangunan kepemudaan. Kendala-kendala (D)

Kendala dalam koordinasi dengan beberapa kementerian?

Untuk pembangunan kepemudaan. Yang ditemui seperti apa pak? (D)

Ya, kalau saya lihat sih pertama masing-masing kementerian harus sadar bahwa UU kepemudaan ini telah terbit, telah disahkan. Dan kita lemah sering pada sosialisasi UU kepemudaan ini. Yang kedua, peran kementerian pemuda olahraga harus lebih proaktif di dalam melakukan koordinasi antar kementerian ini yang punya fungsi program-program kepemudaan. Kemudian hal lain juga organisasi kepemudaan harus pro aktif juga. Bahkan program dinas-dinas kepemudaan di tingkat propinsi maupun tingkat dua harus proaktif. Mensinergikan program-program ini. Kelemahan kita memang sering pada pola koordinasi. Itu aja.

Pribudiarta Nur Sitepu

Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tanggal wawancara 31 Mei 2011

Yang pertama menurut bapak sampai sejauh ini bagaimana pembangunan kepemudaan yang ada di Indonesia secara umum aja pak yang sudah berjalan. (D)

Seluruh komponen pembangunan itu harus bisa juga melihat bagaimana pemuda itu bisa berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari seluruh sumber daya pembangunan. Yang paling penting itu, jadi dia sebagai objek dan dia sebagai pelaku daripada pembangunan. Jadi bukan hanya sekedar dia dipenuhi kebutuhannya, tapi juga didengarkan suaranya, bagaimana dia mampu berpartisipasi aktif, bagaimana dia memperoleh manfaat dari seluruh, jadi bukan hanya sumber daya yang ada di pora, tapi dari seluruh sumber daya bidang pembangunan yang ada di republic ini. Yang sebenarnya harus didengar supaya suara pemuda itu ada di semua bidang pembangunan. Satu dia sebagai objek saja, yang lain dia sebagai subjek dan objek. Dia berperan aktif. Bukan hanya dia menerima dampak, tapi juga mampu untuk bersuara mempengaruhi pengambilan keputusan.

Menurut bapak bagaimana kontribusinya kepada pembangunan nasional itu. Sejauh mana? Kalau dia berperan, berarti dia akan menyumbangkan kepada proses-proses pembangunan itu ya, ada kontribusinya. (D)

Pemuda itu kalau menurut UU kepemudaan yang baru dari 16 sampai 30, sebenarnya anak, ada sebagian dia sebenarnya remaja, ada sebagian dia sebenarnya dewasa. Dimana setiap kebutuhan ini kan berbeda. Jadi kalau ditanya bagaimana ini nanti sumbangannya terhadap pembangunan, dia tentu akan ada pendekatan yang berbeda-beda terhadap pemuda. Ada pendekatan terhadap anak yang tidak. Kalau anak itu kan dia belum punya implikasi hukum ya. Kemudian ada dia disebut remaja, peralihan. Ada disebut kemudian dia dewasa. Kalau menurut saya pendekatannya akan berbeda-beda. Kalau dia mau *mainstreaming*, dia berbeda-beda jadinya. *Mainstreaming* itu kan strategi. Dalam pikiran saya ya, jadi *mainstreaming* pemuda ini sebenarnya adalah bagaimana memasukkan isu-isu pemuda dari mulai tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.

Dalam UU Pemuda dikatakan koordinasi lintas sektor dipimpin oleh presiden. Karena memang masih baru dan belum ada peraturan pelaksanaannya (D)

Koordinasi lintas sektor itu lemah. Sama seperti anak. Dia masuk koordinasi lintas sektor. Kalau *mainstreaming* itu mengubah maise. Mengubah pemikiran, mengubah pikiran kita. Tapi kalau dia koordinasi lintas sektor, itu dia akan masuk di program-program bagaimana mau menkoordinasikan kalau dia gak punya programnya. Jadi kalau dia koordinasi lintas sektor, dia hanya mengkoordinasikan sektor-sektor yang punya program yang sama. Itu terbatas. Kalau *mainstreaming* dia lebih luas karena dia mengubah pola pikir.

*Jadi *mainstreaming* lebih kepada pola pikir. Kalau dia diwujudkan, pola pikir itu kan lebih kepada bentuk komitmen ya pak. maksudnya tetap ada wujudnya dalam bentuk implementasi program? (D)*

Kalau dia hanya koordinasi lintas sektor, dia hanya menkoordinasikan program-program yang sejenis, serumpun. Apa bisa nanti misalnya pemuda

menkoordinasikan program-programnya energy sumber daya mineral, mengkoordinasikan program-program dari lingkungan hidup, program-program PU, program-program pertahanan keamanan. Kalau dia kan gak punya program serumpun.

Jadi memang koordinasi itu belum tentu menjadi main streaming? (D)

Belum tentu main streaming. Karena dia memang harus ada dulu, gitu lho. Jadi kalau dia koordinasi lintas sektor, dia ada programnya, dia sudah ada anggarannya. Kemudian dia dikoordinasikan, gitu kan? Kamu ngerjain ini, kamu ngerjain ini, begitu kan ya? Kemudian dia punya program nasional, grand design nya kali ya, grand designnya kemudian jadi utuh karena dikerjakan oleh A,B,C,...yang memang pekerjaannya, pekerjaan pemuda. Sama-sama mengerjakan tentang pemuda.

Kalau konsep main streaming sendiri kalau lebih jauhnya menurut bapak, seperti apa? (D)

Kalau konsep *mainstreaming*, dia harus mengubah *mindset*. Jadi karena dia mengubah *mindset* sebenarnya begitu orang itu menyusun perencanaan program, di dalamnya itu sudah ada isu, ini saya ngomong gender ya mbak, begitu orang si perencana itu dia menyusun rencana di dalam kepalanya itu sudah ada isu gender. Kalau *mainstreaming* itu kan strategi. Strategi PUG itu. Dia tracknya ada dua ya, satu dengan cara diintegrasikan, satu dengan cara pemberdayaan. Kedepan yang belum dilakukan kita mau ke partisipasi masyarakat. Kemudian management strateginya, mengolah strategi mulai dari yang kita sebut national machineries, yaitu penggerak, nasional. Dulu nasional machineriesnya Kementerian pemberdayaan perempuan. Kemudian kita analisis aktor. Sebenarnya siapa aktor yang paling berperan, ada kementerian keuangan, bappenas, sama kementerian dalam negeri. Kemudian, dengan menyuarkan yang namanya anggaran responsive gender, keluarlah peraturan menteri. Peraturan menteri, bappenas bahwa yang disebut national machineries itu 4, KPP, keuangan, bappenas dan depdagri. Kemudian ini bikin kebijakan, bikin panduan, jadi dari kebijakan yang sifatnya makro sampai kebijakan yang sifatnya teknis. Ini kemudian dilakukan proses pengintegrasian. Jadi ini kebijakan KL yang responsive gender. Disini ada bentuk-bentuk aktifitasnya ya. Ada kajian kebijakan di policy analysis. Waktu dia kesini ini ada advokasi, ada sosialisasi, sama pelatihan. Ini betul-betul komunikasi. Jadi advokasi kita bilang levelnya level menteri. Kalau sosialisasi itu levelnya sudah pelaksana teknis. Kalau pelatihan itu sudah khusus, misalnya pelatihan legal drafter, pelatihan data, pelatihan bagi perencana, pelatihan bagi auditor, dia dapatnya pelatihan, pendampingan teknis bintek/TA, kemudian jadi kebijakan yang responsive gender. waktu dia jadi kebijakan responsive gender, ada perubahan. Perubahan pemahaman, perubahan sikap, perubahan perilaku. Ini syaratnya. Jadi dia harus jadi budaya organisasi. nah, sehingga kemudian, setelah itu kita bisa identifikasi ada 7 komponen kunci yang harus dipenuhi, sebelum dia mampu untuk melaksanakan. Ini kan implementasi. Implementasi yang responsive gender, implementasi kebijakan yang responsive gender. Disini ada 7 komponen kunci, mbak. Yang pertama itu adalah komitmen, kedua ada programnya, ketiga ada sumber daya manusianya ada sumber daya yaitu manusia dan dana, empat ada lembaganya yang menangani baik itu structural maupun ed hock, lima ada system informasi data terpilah, yang ke enam ada partisipasi masyarakat, yang ke tujuh

ada alat analisis atau instrument. Harus dipenuhi dulu tujuh-tujuhnya. Baru dia bisa mengimplementasikan. Baru dia bisa masuk kesini. Disini nanti ada indikatornya lagi. Indikatornya seperti sumber daya yang kompeten. Jadi sumber daya pelaksana proyek yang kompeten. Trus kemudian ada system komunikasi. Disini masuk nanti monev, ada lagi seperti efektivitas dan efisiensi jadi kinerja segala macam. Itulah yang disebut dengan mengintegrasikan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai monitoring evaluasi. Nah nanti ini mengubah situasi dan kondisi. Situasi kondisi ini nanti akan masuk kesini policy review, policy evaluation, itu yang disebut dengan strategi mainstreaming. Konsep dan manajemennya.

Apakah pengarus utamaan pemuda ini memang akan menjadi main streaming atau koordinasi, tapi memang secara nomenklatur pengarus utamaan(D)

Kalau Pengarus utamaan dia harus itu main streaming. Mengikuti konsep pengarus utamaan. Secara komplit. Jadi kalau memang sekedar koordinasi lintas sektor itu belum *mainstreaming*. (D)

Tapi kalau untuk pengarus utamaan ini berarti pihak-pihak yang terlibat kalau di kementerian tadi kan ada keuangan, bappenas, ada kementerian dagri, (D)

Itu hanya sebagai drivernya saja. Pengarah, pengendali. Empat itu. Karena memang dia actor yang paling dominan dalam penancangan pembangunan.

Actor yang paling berpengaruh atau aktor paling, sebagai penggerak dari strategi ini (D)

Karena dia dari sisi keuangan nasional dia memang regulatornya itu mereka.

Penggerak utamanya. Berarti kalau seandainya pengarus utamaan pemuda ini bisa diterapkan seperti itu memang harus dikaji lagi, kira-kira actor-aktor yang itu nanti kira-kira siapa yang paling berperan. Kalau menurut bapak kira-kira pihak-pihak mana saja ?(D)

Ya kalau menurut saya kalau dari sisi pemerintah sebenarnya itu juga sih. Berarti di situ ada kementerian, bappenas, departemen keuangan, departemen dalam negeri. Kalau dia mau *mainstreaming* ya. Sama saja, depdagri itu dia berperan kan karena daerah itu semua kan rujukannya dia sampai ke tingkat desa.

Kalau itu berarti bentuk pelibatan pihak-pihak itu seperti apa pak? Itu kalau dari mesinnya ya, kalau dari pihak-pihak lain berarti tetap semua, seperti KemenPP tetap dengan semua kementerian lembaga juga ?(D)

Dengan semua kementerian lembaga dan dengan semua lembaga masyarakat itu mengacu kepada peraturan menteri tentang lembaga masyarakat ya. Lembaga masyarakat itu semua termasuk LSM, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, asosiasi-asosiasi itu kan, asosiasi dokter, asosiasi bidan, asosiasi segala macam, semuanya ada 6 itu kalau gak salah. Jadi sebenarnya semua masyarakat sampai dunia usaha dan akademisi. Malah perannya akademisi itu justru partner. Dia partner. Jadi karena dia posisinya partner dia harusnya memberikan pendampingan teknis.

Berarti kalau ada pengarusutamaan pemuda, berarti mungkin leading sektornya memang harus berdiri sendiri, apakah kementerian, menurut bapak gimana? (D)

Kalau menurut saya kita tidak bisa kerja sendirian. Kementerian kan bukannya *superbody* yang akan didengarkan oleh semua KL. Semua KL bisa bilang saya tidak ada urusan dengan pemuda.

Kalau komitmen yang harus dimiliki oleh instansi-instansi seperti apa bentuknya? (D)

Komitmennya untuk memenuhi 7 komponen itu, mbak. Dalam 7 komponen itu nomor satu kan komitmen. Dia berkomitmen untuk melaksanakan yang 2 sampai 7. Karena kalau dia gak punya 7 itu, dia gak bisa implementasi.

Jadi prasyarat ya (D)

Prasyarat, kondisi awal. Prasyarat, benar itu. Kondisi prasyarat.

Jadi komitmennya tidak hanya sekedar komitmen tapi harus terwujud dalam bentuk 2 sampai 7. Ada program, ada sumber daya, di dalamnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis, punya duitnya, ada lembaganya, baik mungkin dia, struktural kan gak mungkin ya, structural mungkin dia fungsi jadi ad hoc. Pokja atau total point, ada alat analisis yang bisa dia pakai, ada partisipasi masyarakatnya, ada system informasi datanya. Kalau kita sangat butuh itu data. Saya rasa pemuda juga gitu seharusnya. Ada datanya. Jadi dasar penyusunan kebijakan. Ini saling begini mbak sebenarnya diantara 7. Saling ada inter relation antar variable. Tidak bisa bikin program kalau tidak ada data, tidak ada alat analisisnya. Untuk melihat ada masalah. Terus semua itu kan didasari oleh harus adanya sumber daya manusia dan ada uang. Dan ada lembaganya tempat dia duduk. Apakah dia itu berupa pokja atau dia berupa structural. Ada saling, partisipasi masyarakat, sangat berperan sekali. Sebagai partner, pengontrol atau dia pelaksana.

Berarti kan membentuk suatu system ya. Jika dibawa ke dalam pengarus utamaan pemuda bagaimana sistemnya yang harus dibangun. Apa memang harus dari atas ada peraturan yang dulu sehingga dia bisa mengikat atau memang ya tadi apakah dimulai dari merubah mindset itu seperti apa menurut bapak. (D)

Yang pertama kalau kami ya, ini kan tergantung, sebenarnya tergantung (kekuatan politik juga ya. Tidak bisa meyakinkan orang kalau tidak orang itu paham dulu. Jadi kita melakukan advokasi sosialisasi dulu. Jadi komunikasi gender lah. Komunikasi gender kan bagaimana dari mulai menteri lah. Menteri pesannya apa, channelnya melalui apa. Siapa saja sasarannya. Kalau menteri ya ketemu dengan menteri. Kalau menemui menteri itu dengan menteri. Atau pakar yang selevel dengan menteri. Yang levelnya sama dengan menteri, pakar. Ini baru dia kesana kan. Untuk ketemu dengan menteri. Pesannya apa yang harus dikemas. Biasanya kan dia berupa policy briefing ya gak banyak-banyak, 2 lembar 3 lembar gitu kan ya. *Channeling*melalui apa? Tatap muka misalnya. Terus turun lagi ke bawah. Kalau deputi kemana? Ketemu dengan deputi misalnya kan? Dibikin terus sampai di level akhirnya pelatih. Kalau berkomunikasi seperti apa? Dibikin. Nah karena itu kemudian kita akan ini. Kita identifikasi ini semua dari mulai menteri sampai pelaksana teknis. Pelaksana teknisnya itu perencana, penyusun anggaran, penyusun data, enumerator, legal drafter, itu yang penyusun peraturan perundang-undangan. Itu selalu ada di dalam setiap pemerintah itu kan apa. Auditor. Dia bisa masuk lagi melalui audit kinerja. Jadi nanti akan beda-beda tuh bicaranya. Pesan yang dibawakan bisa berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan dia kan? *Channeling* juga akan melalui channel yang berbeda-beda. Lembaga masyarakat, terus masyarakat umum secara luas.

Jadi yang nomor satu memang ada mengkomunikasikan, pensosialisasian? (D)

Baru setelah itu bisa dibangun komitmen. kita 15 tahun lho mbak. Sekarang 2011 ya, kita bicara mengenai gender inpresnya kan sudah dari tahun 2000. Sudah 10 tahun.

Memang ini ya diharapkan akan menjadi masukan untuk kemenpora. Ada konsekuensi-konsekuensi yang memang harus dihadapi. (D)

Kalau koordinasi lebih sederhana. Tapi kalau dia *mainstreaming*, dia harus mau terjun ke dalam berbagai dimensi kehidupan masyarakat, apa itu dimensinya dimensi lingkungan, apa dimensi-dimensi ekonomi, apa dimensi-dimensi social, budaya, hukum, lebih kompleks. Dan kita sebenarnya di kementerian ini sendiri kan pembangunan anak, pembangunan anak itu pembangunan lintas sektor. Sebenarnya inginnya *streaming*, belum mampu karena gak punya alat dan sistem. Faktanya sih yang sederhana yang dipahami oleh para perencana.

Alat analisis sebenarnya berguna untuk melihat apakah suatu kegiatan atau program memang sudah responsive terhadap isu tersebut atau tidak. Untuk mengevaluasi juga ya pak. (D)

Ya. Dan dalam perjalanannya kemudian berkembang macam-macam. Dari mulai yang tadinya hanya analisis gender, analisis anggaran responsive gender, kemudian saya pikir ya walaupun belum ada kedepan harus ada audit gender. Kalau bicara audit gender, di dalamnya udah masuk tuh reformasi birokrasi.

Jadi sudah lebih luas lagi ya tadi. Gender itu lebih luas lagi kepada system birokrasi. (D)

Keseluruhan system birokrasi, bukan hanya program, bukan hanya anggaran saja, tapi belum ada ya. Kalau ditanya ke saya mana barangnya, gak ada. Baru wacana pemikiran.

Kalau secara konkrit itu bagaimana agar, apa strategi dan langkah-langkah supaya memang pelaku kebijakan ini mau mengimplementasikan kebijakan pengarus utamaan pemuda ini, ada kemauan, komitmen dan kemauan dalam implementasinya? (D)

Yang pertama kan harus ada kebijakan-kebijakan ramah pemuda dulu kan, harus ada kebijakan peduli pemuda dulu kan. Nah untuk bisa menjadi kebijakan peduli pemuda itu harus ada komitmen dulu. Komitmen dari para pengambil keputusan tertinggi. Bahwa mau ada itu dari presiden. Dari presiden, bahwa akan ada, bahwa republic ini memang harus ramah pemuda atau peduli pemuda. Kalau *mainstreaming* ya.

Tetap harus dari atas dulu. (D)

Ya, dari atas dulu. Nanti setelah itu kemudian baru ke dalam strategi yang lebih rasional. Semua menteri, semua kepala lembaga, semua kepala daerah, baik propinsi maupun walikota. Setelah itu ikut pengolaan seperti ini.

Kalau dari segi komunikasi, menurut bapak bagaimana? Apakah kebijakan ini memang sangat perlu dikomunikasikan. Terus sosialisasinya seperti apa yang perlu dilakukan? Baik dari segi komunikasi, sosialisasi itu bentuk konkritnya seperti apa pada kementerian lembaga yang lain?(D)

Yang pertama bahwa ini berpengaruh, jadi isu ini memiliki pengaruh yang besar terhadap kehidupan bermasyarakat. Pertama itu dulu sebenarnya. Meyakinkan

para pemangku kepentingan bahwa isu tentang pemuda ini adalah salah satu isu yang memiliki pengaruh besar.

Tingkat urgensinya ya pak (D)

Tingkat urgensinya, harus disampaikan itu dulu sebenarnya kepada para pengambil keputusan. Terus kemudian isunya ini penting harus segera dilaksanakan. kemudian juga menurut saya penting juga sebenarnya pressure dari masyarakat gitu ya. Jadi kan kita bikin setting agenda yang ada di pemerintah tetapi kita perlu juga kita membangun opini masyarakat.

Membangun opini publik. (D)

Membangun opini publiknya. Jadi memang harus dua-duanya. Dari bawah dan dari atas. Kadang-kadang bikin peraturan perundang-undangan, bikin dulu masalah. Baru kemudian kita bilang, nah ini jadinya. Kalau kita sih ngumpulin berbagai macam best practices. Pembelajaran-pembelajaran di masyarakat itu kita perlihatkan. Karena itu bisa kita bilang bahwa ini isu-isu penting.

Jadi istilahnya komunikasi itu harus juga didukung oleh data, riset awal ya untuk menunjukkan tingkat kepentingannya bahwa ini penting. Terus ini hampir sama pak dengan yang itu dengan yang 7. Kalau dari segi sumberdaya bagaimana pak? Yang harus dari segi manusia, staff yang melakukan kebijakan ini nantinya gitu. (D)

Kita masuk ke dalam system pelayanan ya, kualitas SDM yang dibutuhkan ya, sebenarnya ujungnya ini semua sebenarnya pemerintah melayani publik kan. Design yang ada sekarang kita ini kompetensi, jadi mengembangkan standar kompetensi untuk aparat public yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ada standar kompetensi teknisnya. Nah itulah yang kemudian kita berdasarkan kebutuhan-kebutuhannya mereka kita bikin modul-modul. Jadi ada modul untuk legal drafter, karena nama kita semua, nama asdep di kita itu udah namanya actor yang, assistant deputi pengarus utamaan gender dalam bidang hukum, gitu. Jadi nanti dia yang menyiapkan modul-modulnya untuk legal drafter.

Jadi sebenarnya mainstreaming ini konsepnya lebih kepada dia tidak menuntut adanya anggaran itu. (D)

Tidak menuntut adanya anggaran khusus. Karena yang akan dirubah mindset kan, bukan anggarannya. Anggaran responsive gender adalah seluruh anggaran.

Kalau dari bapak sendiri, bagaimana sikapnya terhadap kebijakan pengarus utamaan pemuda ini. (D)

Kalau kita paham, mengerti, kita akan sambut dengan positif. Masalahnya saya belum pernah di training masalah pemuda, jadi saya tidak mengerti. Cuma saya mengerti bahwa pemuda umurnya 16-30 itu aja yang saya tahu. Saya tidak tahu permasalahan pemuda yang di bawah 18, pemuda 18-20, dan pemuda yang di atas 20. Saya belum tahu karena saya belum mengerti. Belum pernah ada sosialisasi tentang itu.

Cuma secara konsep, pengarus utamaan sudah familiar ya. (D)

Konsep pengarus utamaannya saya paham. Tapi mengenai isu pemudanya, saya tidak paham. Karena belum pernah ada yang ke kita. Di konsep mainstreaming itu

sangat sekali kita harus berperan aktif. Jadi kebiasaannya birokrat itu dia duduk, menunggu. Dalam pendekatan mainstreaming, tidak bisa. Tidak bisa pendekatan yang menunggu. Dia harus pro aktif. Karena kekuatannya itu ada di komunikasi. Kepada berbagai pihak.

Jadi bisa juga disalah persepsikan kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, apa sih tujuan dari kebijakan (D)

Saya juga sering sih diundang sama pak Dadang, direktur Bappenas, tapi kalau saya lihat gini, minta mengidentifikasi program gini, ya saya kirim staff saya aja. Tapi kalau saya diundang untuk berdiskusi, misalnya itu akan lebih, saya akan merasa lebih penting ya. Tapi kalau hanya mengidentifikasi program dan anggaran, ya saya masih banyak kerjaan lain.

Hambatan organisasi itu dari segi tadi misalnya, strukturnya seperti apa, budayanya, budaya organisasi (D)

Dalam satu organisasi ada kepentingan yang berbeda antar satuan kerja. Nah itu yang diidentifikasi disini sehingga nanti hasilnya adalah perlunya adanya aktifitas untuk sosialisasi, atau fasilitasi atau pelatihan. Jadi di dalam satu organisasi itu harus saling mendukung kalau memang itu terpenuhi ya. Jadi tidak ada hambatan dari dalamnya sendiri.

Kembali lagi ke pangarus utamaan pemuda pak. Kalau dari segi struktur birokrasi itu, struktur organisasi seperti apa yang dibutuhkan?(D)

Supaya dia mampu melakukan pengarus utamaan pemuda dia harus ada kelompok kerja yang membicarakan itu. Harus ada vocal point, jadi harus ada penggerak movernya yang dia ahli mengenai pemuda ini. Pokja-pokja itu berasal dari semua unit. Jadi tergantung tujuannya. Misalnya, kalau kita kan pokja PUG tujuannya bikin program responsive gender. Maka semua kelompok di dalam pokja ya harus para perencana, penyusun program. Misalnya, tergantung tujuannya. Tergantung konsepsi pemudanya itu nantinya mau mengarah kemana, tergantung kebutuhan output yang dihasilkan oleh setiap pokja.

Kalau dilihat secara keseluruhan pak, menurut bapak apa kira-kira kendala yang mungkin dihadapi untuk mewujudkan strategi pengarus utamaan pemuda ini. (D)

Kendalanya mungkin yang susah bikin analisis itu. Alat analisisnya. Mumpung momennya sekarang masih pak SBY, harusnya bisa lebih cepat. Kan dari segi politis, pemuda diuntungkan, kan? Kemenpora. Harusnya sekarang. Nanti ke depan kita gak tahu. Karena bikin alat analisis kan kerjasama dengan universitas.

Apa yang kira-kira menjadi factor pendukungnya. Mungkin sebagai gambaran sudah ada UU kepemudaan ya, mungkin (D).

Menurut saya faktor pendukung utamanya ya komitmen dan konsisten. Kayak gender ini kan 15 tahun dari tahun 95. Kita berdiri tahun 78. Dari yang ceritanya ngomongin perempuan, sekarang ke depan menurut saya pengarus utamaan itu laki-laki. Seperti tadi isu kekerasan, kan? Jadi dia konsisten. Komitmen dan kita konsisten. Akan terus. Jangan nanti sepotong. Sekarang ngomong mainstreaming pemuda. Terus besok, pindah yang lainnya. Mainstreaming gak bisa waktu pendek.

Kalau yang jadi penghambat, kira-kira apa? (D)

Penghambat itu sebenarnya pemikiran-pemikiran bahwa ini pekerjaan tambahan. Mainstreaming pemuda. Begitu misalnya mereka datang ke sini, ke KPP dan ngomong mengenai mainstreaming pemuda, maka temen-temen asisten deputi di tempat saya akan berfikir, tambahan lagi kerjaan. Duitnya gak dikasih sama pora, kerjaan pula. Ya itulah, mungkin dalam jangka pendek mereka akan berfikir begitu.

Kalau menurut bapak, apa yang bisa menjadi kunci keberhasilannya untuk strategi ini supaya bisa diterapkan. (D)

Ada peraturan UU. Yang pertama ada peraturan UU itu menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen. Menurut saya itu dulu, setelah itu baru bisa menggerakkan sistemnya. Membangun sistemnya dan system itu berfungsi, gitu. Yang menjadi kunci pertamanya itu peraturan UU untuk menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melakukan. Kayak inpres PUG pemerintah berkomitmen untuk melakukan pembangunan yang responsive gender. Setelah itu masih banyak lagi kerjaan lain. Pemuda ini kalau mau bikin pengarus utamaan kerjanya banyak sekali.

Sanusi

Kepala Bagian Hukum Kementerian Pemuda dan Olahraga

Tanggal wawancara 23 Mei 2011

Program itu kegiatannya untuk kepentingan pemuda, tidak hanya menpora, kita harapkan pemuda ini justru diseluruh lini, diseluruh sector, di seluruh kementerian dan lembaga itu bagaimana memasukkan pemuda sebagai salah satu bidang yang dianggap penting untuk pembangunan ya. Intinya kan seperti itu. Sekarang bagaimana konteks menpora yang selaku katakanlah leading sector dari kepemudaan itu bisa mendorong KL itu betul-betul secepatnya dalam setiap program, dalam setiap event, dalam setiap kegiatan mencantumkan kegiatan pemuda di dalamnya. Kalau ada pertanian, itu ada prioritas bagaimana membawa pemuda. kemudian kalau di kehutanan, misalnya bagaimana departemen kehutanan juga mendorong kegiatan yang mengarah pada pemuda kehutanan. Begitu juga departemen yang lain-lainnya. Dari sisi itu mungkin menpora dari UU no 40 dari 2009 tentang kepemudaan yang antara lain tidak mengklasifikasikan yang lain-lainnya, hanya umur aja ya, umur antara 16 sampai 30 itu betul-betul memprioritaskan pembangunan kepemudaan secara menyeluruh. Ini seperti itu. Makanya menpora mendorong agar regulasi itu betul-betul juga bukan hanya menpora yang menjalankan itu tapi seluruh leading sector, seluruh kelembagaan, kementerian dan lembaga. jadi Alhamdulillah kita sudah punya UU pemuda yang menjadi payung hukum bagi semuanya kan UU bukan hanya untuk menpora, UU untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah itu salah satu sarana bagaimana kita mendorong KL yang lain dan seluruh sector maupun stakeholder terkait menginginkan pentingnya pembangunan kepemudaan melalui itu. Oleh karena itu kita coba breakdown juga dari UU pemuda ini kita bagaimana menurunkan ke dalam peraturan pemerintah. Bagaimana dari peraturan pemerintah juga kita keluarkan lagi ke yang lebih operasional lagi ke peraturan menteri sehingga sampai focus detail setiap kegiatan itu pemasukan unsur kepemudaan di dalam kegiatan-kegiatannya. Secara umum kan seperti itu.

Jadi sebenarnya kalau fungsi menpora sendiri lebih kepada leading sektornya? (D)

Ya lebih mengarah bagaimana kita mendorong unit yang lain tapi itu bukan berarti sepenuhnya tanggung jawab menpora ya, tapi dengan program pengarusutamaan pemuda juga. Diharapkan urusan kepemudaan ini bukan hanya menpora tok, gitu. Urusan semua kementerian, urusan semua stakeholder terkait, juga harus niau gak mau juga memberi perhatian kepemudaan itu. Jadi seperti itu aja.

Bentuk seperti apa yang bisa diharapkan dari pemangku kepentingan itu (D)

Konkritnya kan setiap tahun, setiap KL kan ada semacam RKKL ya, rencana kerja keuangannya dan program kegiatan paling gak setiap departemen itu adalah yang menhususkan kegiatan untuk kepemudaan. Kan kadangkala sekarang ini saya merasakan gaungnya masih belum ini tapi kalau semua sector, semua lini memasukkan itu dalam pembangunan programnya apa yang kita harapkan pengaruh keutamaan pemuda ini bisa berjalan karena tergantung komitmen aja masing-masing pimpinan dan bangsa, komit gak dengan undang-undang kita ini. Kalau komit sebenarnya mau tidak mau ya.

Jadi memang seperti yang disinggung tadi system yang harus dibangun bisa membuat setiap lembaga itu terikat karena agak sulit juga kalau tidak ada pemaksanya. (D)

Itu salah satu, mengapa menpora memprioritaskan setelah UU olahraga, UU pemuda antara lain itu. Bagaimana greget pembangunan kepemudaan itu menjadi perhatian dan menjadi dorongan. Ya itu tadi menjadi payung hukum yang harus juga dilaksanakan tidak hanya oleh menpora tapi juga oleh KL-KL yang lain, kementerian dan lembaga yang lain. Bahkan siapapun yang punya peduli dengan masyarakat secara umum ya, stakeholder bukan hanya lembaga pemerintah, lembaga swasta juga dia harus berpikir bagaimana membangun kepemudaan.

Kalau bentuk itu memang turunannya lebih baik bagaimana pak. Apa peraturan pemerintah memang, pemerintah supaya lebih ada gregetnya. (D)

Ya sebenarnya di dalam UU pemuda itu kan disitu disebutkan pelayanan kepemudaan ya, meliputi ada penyadaran, penyadaran buat pemuda, ada pemberdayaan pemuda, ada pengembangan pemuda, nah pengembangan pemuda itu sendiri juga terdiri dari pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan kewirausahaan pemuda, pengembangan kepeloporan pemuda, ya kan? Ada satu lagi yang diturunkan dengan peraturan menteri tentang pengembangan pimpinan pemuda. nah kita ini sekarang sedang menggodok beberapa aturan turunan itu, artinya lebih kongkritnya bagaimana kita diamanatin untuk PP tentang pengembangan kewirausahaan pemuda dan disitu diatur, sekarang draftnya masih di sekmenpora, kita rapat disana tadi. itu bagaimana mekanisme kelakuan implementasi dari membangun pengembangan kewirausahaan pemuda di mana, kepeloporan pemuda bagaimana, kepemimpinan bagaimana, itu semua nanti mengarah kepada peraturan-peraturan yang lebih detail, dimana lebih operasional. Dan itu kita harapkan tidak hanya menpora yang punya hal seperti itu, dalam membentuk permodalan pemuda kita harapkan dari instansi mana, lembaga mana, baik daerah maupun nasional. Nah itu salah satu langkah konkrit ini, asal kita

punya komitmen ini. Kalau dikatakan strategi kebijakan, menpora sudah mempunyai strategi kebijakan untuk membangun kewirausahaan pemuda, antara lain melalui regulasi itu UU pemuda. itu kan salah satu strateginya. Dan sekarang sedang menuju ke tingkat operasional.

Dengan RPP itu kan termasuk strategi dan langkah-langkah untuk supaya implementasi kebijakan pengarusutamaan bisa dijalankan. (D)

Iya, sehingga semua stakeholder semua KL juga mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah.

Kemudian untuk kebijakan pengarusutamaan ini sudah pernah ada sosialisasinya atau apa yang pernah diikuti atau pernah didengar? (D)

Ya intinya kalau dari sisi hukum ya, ketika kita mensosialisasikan undang-undang pemuda maka otomatis disitu kita masukkan poin-poin yang yang terkait dengan itu ya langkah awal itu dulu sebetulnya sehingga betul-betul pentingnya pembangunan kepemudaan itu bisa dirasakan baik di pusat maupun di daerah. Baru tahap itu ya. Sementara ini.

Jadi sebenarnya usaha-usaha untuk sosialisasi itu masih terus ya pak. (D)

Masih, masih terus. Cuma kita memang keterbatasan anggaran ya, tidak bisa. Kita sih pinginnya menjadi satu apa ya, kayak semacam apa ya, bersambung gitu lho. Ketika kita menyelenggarakan di propinsi A, misalnya kan. Nah, kita kan nasional ke propinsi A. nah propinsi ini harusnya bisa mem break down lagi ke kabupaten kota yang terkait dengan itu mestinya. Nah kabupaten kota harusnya membreakdown lagi dalam pelaksanaan sosialisasi itu ke kecamatan-kecamatan. Harapannya seperti itu. Berantai, kira-kira begitu. Dengan sosialisasi itu juga kita harapkan pemerintah daerah juga punya komitmen yang sama dengan kita dimana memasukkan harus semua program dan kegiatan serta agenda pelaksanaan pembangunan juga memasukkan unsur pemuda di dalam pembangunannya.

Saya kira hal-hal seperti itu lebih tepat ya, kalau saya dari sini regulasi bahwa melihat bagaimana kebijakan pemerintah, saya kira sudah tepat kok dengan kita bisa menelorkan UU pemuda itulah salah satu visi payung hukum yang menjadi pijakan seluruh Indonesia. UU itu kan bukan hanya untuk menpora. Seluruh Indonesia berlaku. Itu suatu modal utama. Tentang penjabaran tentang setiap ini, kita punya tugas ada tim teknis disini, diantaranya deputi-deputi itu deputi pengetahuan, deputi kepemudaan. Bagaimana mem breakdown, melaksanakan, komitmen dengan UU yang ada.

Menurut Bapak, kira-kira factor-faktor apa yang bisa menjadi, mungkin tadi ada UU pemuda ya, memang bisa dibilang sudah lebih satu langkah. Langkah plus untuk kebijakan ini. Selain itu ada apa lagi, yang kira-kira mendukung supaya ini bisa sukses (D)

Ya tentu kan UU tadi kan kita bicara secara umum. Kita harapkan secara operasional setiap instansi lembaga kan punya apa namanya ya rencana strategis, renstra. Rencana strategis kegiatan yang kita harapkan dalam seluruh KL itu memasukkan ke dalam rencana strategis itu. Tentang kepemudaan, disitu ada slot, karena kaitannya dengan Bappenas, badan perencanaan nasional kan, kalau gak dimasukkan kesitu gak bisa di plot secara nasional. Jadi UU sudah jelas, implementasi UU itu bahwa kita harapkan dengan komitmen dan sadarnya, pentingnya pembangunan kepemudaan, maka setiap KL ini harus memasukkan

slot dari program-program kepemudaan di dalam rencana strategisnya 5 tahun ke depan. Terlihat disitu konkritnya.

Kira-kira faktor penghambatnya yang kira-kira bisa menghambat atau menjadi tantangan (D)

Ya kalau, yang pertama sejauh mana komitmen pimpinan dari lembaga itu. Pertama. Yang kedua ya skala prioritas karena kita melihat kebijakan politik pada saat itu pada skala prioritasnya lebih mengarah ke yang lain daripada pemuda, ya itu saya pikir ada pengaruhnya memang kalau ketika skala prioritas itu menyampingkan kepemudaan ya pada akhirnya tidak maksimal akhirnya.

Sebenarnya sih banyak ya, kalau menurut saya yang paling utama saat ini ya itu tadi bagaimana kesadaran pentingnya pembangunan pemuda ini bisa masuk di segala lini. Itu nomer satu komitmen dan kesadaran. Itu nomer 1. Yang lainnya tentu didukung oleh RAN, didukung oleh SDM, misal nya universitas. Bagaimana universitas ini bisa, seharusnya kalau memang ini bukalah fakultas tentang strategi kepemimpinan pemuda. Bisa aja. Kiat-kiat semacam itu sudah dilakukan oleh temen-temen di asdep, assistant deputy kepemimpinan.

Jadi bisa saya simpulkan komitmen itu juga harus ada faktor pengikatnya, seperti peraturan jadi memang komitmen ada tapi kalau payung hukum istilah kita, turunan dari UU 40 itu ya (D)

Kita juga sudah mulai mengarah pada ya itu tadi untuk mengikat tidak hanya pada tingkat nasional tapi juga propinsi kabupaten kota kita juga harus mengikat tadi yang namanya dengan NSPK Norma Standar Prosedur dan Kriteria bagaimana kewenangan propinsi, kewenangan pemda daerah kabupaten kota, bagaimana kewenangan pusat,

Suarmansyarh

Asisten Deputi Urusan Pemuda

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI

Tanggal wawancara: 8 Juni 2011

Untuk melihat konsep pengarusutamaan pemuda ini, bgmn sebenarnya pembangunan kepemudaan sekarang seperti apa? (D)

Memang pemuda ini merupakan hal yg sangat strategis, mulai dari dulu sampai sekarang pemuda merupakan tumpuan harapan bangsa ini. Kalau kita lihat sejarah, semua pendobrak adalah pemuda. Namun sekarang pemuda sudah kehilangan jati dirinya, kalau kita lihat dari perjalanan ini, kalau dulu kan semangat juang, character building, wawasan kebangsaan, bela negara kelihatan sekali ada benang merahnya. Sekarang pemuda perlu diberikan semacam materi atau pengetahuan dan sekaligus sikap perilakunya yang berkarakter, jadi tidak bisa dibiarkan

Jadi menurut Bapak permasalahan utama dalam pembangunan kepemudaan ini seperti apa?(D)

Pertama pembangunan karakter itu musti. Dan pembangunan pemuda tidak langsung kepada pemudanya juga. Media misalnya cara mewawancarai tokoh2 nasional, pejabat2, sekarang kita lihat seakan2 memojokkan, sehingga media, keluarga semuanya selain daripada pemuda itu. Makanya sekarang muncul lagi perlu dihidupkan Pancasila, karena kita sudah kebablasan. Dari situ dulu

makanya penting sehingga pemuda betul2 dikatakan harapan bangsa, masa depan. Ada juga pemuda2 yang punya karakter yang bagus, banyak juga, tapi yang kita lihat di tivi tiap hari ada tawuran, demo dsb.

Berarti ada pihak2 yg berkepentingan dan harus dilibatkan dalam pembangunan kepemudaan ini? (D)

Jadi semua sektor, jadi jika kita membangun pemuda tidak bisa pemudanya saja, keluarganya juga, karakter building, dosen2, media, juga harus. Jadi banyak melibatkan semua sektor. Di pemerintahan juga, ada beberapa K/L yg melakukan pembinaan pd pemuda, seperti Kemensos, Kemendiknas, Kemenag, jelas, apalagi Ke;menpora sudah jelas. Kemensos tagana, karang taruna, Pertanian ada pemuda tani, kenen pemberdayaan perempuan, kemen pariwisata juga ada. Menurut saya masing2 sektor mempunyai kewajiban untuk melakukan pembinaan kpd pemuda2nya. .

Tentang konsep pengarusutamaan pemuda bagaimana menurut bapak jika pengarusutamaan pemuda jika dibawa kepada pembangunan kepemudaan, apakah bisa atau tidak, karena selain bisa menjadi mindset juga diharapkan menjadi isu utama yang diprioritaskan? (D)

Pemuda ini sebenarnya suatu tokoh sentral, kalau rusak pemuda maka rusaklah Negara ini. Pemuda sangat strategis dibandingkan yg sudah tua ini. Kalau yang muda2 harus bisa membangun, persaingan aglobal tidak bisa yg tua2, harus pemuda, ekonomi kreatif juga dilakukan oleh pemuda yang melakukan inovasi dan sebagainya. Yang tua2 hanya jadi penasehat saja. Oleh sebab itu makanya pemuda kami harapan bangsa, hanya harapan, tidak pernah jadi pemimpin, masa depan, sebaiknya harapan masa kini, protes dia. Saya setuju, sekarang sudah kelihatan, banyak, tetapi setiap pembangunan mereka harus berpikir secara holistic, jangan memakai politik praktis.

Berarti dalam pembangunan kepemudaan harus ada komitmen yang dibangun dari, baik oleh pengambil kebijakan maupun pemuda sendiri, seperti apa bentuk komitmen itu? (D)

Kalau kebijakan kita sudah punya UU 40, dari situ sudah ada tentang kepemimpinan, kepeloporan, karakter dsb. Mereka tinggal lagi mengacu kepada itu. Sekarang PP yang sedang disusun sebagai pelaksana UU tetrag kewirausahaan dan sarana prasarana. Dalam membuat kegiatan2 pemuda harus tanya pada mereka sendiri, tidak bisa top down

Berarti sehubungan dengan kegiatan K/L yang berhubungan dgn pengarusutamaan harus ada PP yg mengikat? (D)

Di dalam UU itu mengamanatkan harus membuat PP, PP itu tentang kewirausahaan dan sarana prasarana pemuda. Dalam pembangunan sarana prasarana pemuda ini, jangan kita buat sarana prasaranya, kita buat gedung atau apa tapi orangnya tidak ada. Jadi dalam perencanaan mereka dilibatkan, terwakili.

Menurut Bapak apakah harus ada system yg harus dibangun untuk mengevaluasi suatu program sudah mengakomodasi kepentingan pemuda atau belum, apakah perlu alat analisis atau alat ukur, seperti apa yg harus dibangun? (D)

Buat aja dulu, kita lihat, memang perlu, kira2 melakukan analisis, berupa instrument, sebelum kita melakukan suatu perencanaan.

Mungkin kan selama ini program2 kepemudaan, yang penting sudah terlibat pemuda disitu, tetapi tidak dilihat apakah benar ada implikasinya thd pemuda, apakah perlu ada suatau alat ukur (D)

Memang perlu ya suatu instrument untuk melakukan evaluasi sehingga kalau kita hanya ngomong2 begini saja, tidak bisa diukur namanya bohong. Tetapi yg paling penting bg saya mereka dilibatkan, selama ini pemuda berjalan sendiri2, dananya tidak tahu dari mana, kalau mau bikin program atau seminar, minta dari pemerintah, padahal pemerintah juga tidak punya.

Kemenkokesra melihat pembangunan pemuda sekarang yg sudah berjalan seeptri apa, dengan kementerian, instansi lain, apakah sudah ada koordinasi yg baik, atau perlu usaha2 ke arah sana(D)

Makanya saya bilang kemaren, ada RAN, saya lebih senang ini disinergikan, shg kegiatan akan lebih besar, efektif efisien shg suatu instansi2 tidak berjalan sendiri-sendiri, misalnya di instansi2 ini mis. Dalam pembangunan karakter bangsa yang satu bilang wawsan kebangsaan, yang satu bela Negara, yang satu lg pembangunan karakter, ini isinya hamper sama, tapi satu focus. Kalau ini bisa diintegrasikan lebih bagus. Sementara ini mereka jalan sendiri2.

Strateginya lebih konkritnya seperti apa agar kebijakan ini bisa diimplementasikan (D)

Langkah awalnya sama2 sama menyusun perencanaannya. (Perencanaan bidang kepemudaan ditingkatkan dari mulai perencanaan secara komprehensif, berbagai instansi pemerintah juga disinergikan programnya, Harapannya ke depan benar2 dapat berjalan aksi-aksinya pemuda bisa lebih maju lagi, program juga bisa terlaksana dengan baik sehingga berbagai kegiatan spt pembangunan karakter, pembangunan jati diri pemuda sendiri bisa terlaksana dengan baik)

Jadi kualitas perencanaan ditingkatkan, disinergikan ya (D)

Jadi begini , bersama2 mereka membuat perencanaan program, tetapi kementerian2 ini harus berkumpul untuk melihat sektor2 lain yg mempunyai pembangunan pemuda mana yang bisa disinkronkan, sehingga pada saat anggaran keluarkita bisa bersama2.. Mereka punya ini, saya punya ini, ini kan bisa berjalan bersama.

Apakah kementerian/lembaga mau, tidak menganggap ini suatu beban, kadangkala merasa masalah pemuda tidak menjadi prioritas karena lebih prioritas masalah yang lain (D)

Ego sektor agak susah sih.

Apakah memang harus ada pengikat, konsekuensi atau apa (D)

Di dalam UU pemuda itu tidak ada sanksi, memang ego sektor itu..

(Dwi: kalau menurut saya sejak awal kita melibatkan pemuda, apa keinginan pemuda seperti apa, bentuk kegiatan seperti apa, substansi spt apa, dari awal sehingga perencanaan jelas, keinginn pemuda ditampung aspirasinya, dibuat perencanaan yg bagus, disinergikan, berjalan sesuai dengan harapan pemuda, sehingga bisa maksimal, aspirasi pemuda masuk, program pemerintah masuk, anggaran juga tersedia jadi terencana scr baik..Begitu juga dalam implementasi, sesuai perencanaan awal, pemuda juga dilbatkan dalam pelaksanaannya. Setelah pelaksanaan, melalui evaluasi², pemuda juga dilibatkna, apakah menghasilkan maksimal atau byk kekurangan, pada tahun depan mgkn bisa ditutupi, sehg kedepan program pemdua dapat berjalan maksimal, yg harapannya tidak bisa instan hasilnya).

Dari komunikasi, apakah sudah mendengar atau mengikuti sosialisasi ttg hal ini, baik secara nomenklatur istilah pengarusutamaan pemuda atau secara khusus?(D)

Belum pernah, kalau pengarusutamaan gender sudah pernah. Pengarusutamaan pemuda harus lebih besar, jadi sehingga bisa digunakan, kalau perlu dibuat grand design pembangunan seperti karakter bangsa, itu kan melibatkan semua pihak, sama dengan pemuda, dibuat agar bisa menjadi pegangan bagi kementerian lain.

Seandainya ini jadi diimplementasikan apakah dipandang perlu dilakukan komunikasi dan sosialisasi yg lebih intensif kepada K/L lain, suatu bentuk komunikasi, (D)

Nanti dari kantor kita kalau itu sudah jadi suatu rancangan, kita bisa bantu sosialisasikan.

Kalau dari segi sumberdaya, bgmn, SDM, fasilitas, dana agar ini bisa terlaksana, baik dari kemenkokesra maupun secara umum(D)

Di dalam dari sinkronisasi koordinasi kita ada, kita bisa membantu biayanya, tetapi di dalam implementasi pengarusutamaan pemuda tadi masih banyak yang harus dilihat, harus membuat perencanaannya. Di kesra itu kan kebijakan, dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan di menkokesra, makanya kalau grand desainnya sudah ada atau panduan dan pedoman umumnya, kita bisa mengundang kementrian dan lembaga, bisa kita selenggarakan, bahwa dalam melakukan pengarusutamaan pemuda itu begini, begini, begini, Ketika itu diimplementasi, melakukan pembinaan kepada pemuda-pemudanya, itu kementrian dan lembaga, menkokesra tidak punya kewenangan lagi. Kalau menkokesra turun ke pemuda²nya itu namanya menginjak kaki orang.

Dari segi kewenangannya, disini juga ada ya pak kewenangannya untuk melakukan hal itu (D)

Iya

Dari segi disposisi atau sikap Kemenkokesra?(D)

Dari awal sudah saya bilang pemuda itu harus ditangani secara serius kalau kita mau menjadi Negara yang maju, (tidak ada lack of kepemimpinan).

Komitmennya dalam bentuk itu ya pak dukungan koordinasi dan membantu seandainya sudah ada strateginya (D)

Iya. Kalau perlu nanti sampai level menteri, dan perlu dibawa ke sidang cabinet...jadi kerja menkokesra begini, kita ini kan dulu dengan level eselon 2, baru level eselon 1, kalau perlu lagi penggalangan komitmen lebih tinggi, bisa sampai ke rakor tingkat menteri. Tapi kalau tidak juga bisa tembus, masih bermasalah juga nanti masuk ke sidang cabinet. Menkokesra dari hasil rakor di tingkat menteri menkokesra membuat laporan kepada bapak presiden bahwa perlu dimajukan ke sidang cabinet. Kalau sidang cabinet, mau tidak mau semua harus ikut, tapi kalau cukup sampai level menteri, semua menteri yang kita undang komitmen, cukup sampai di situ, tidak perlu sampai sidang cabinet.

Menurut Bapak apakah setingkat kementerian pelaksana seperti kemenpora sendiri apakah perlu membentuk semacam pokja atau apa yang bisa membuat antar lembaga duduk bersama merumuskan hal ini di luar struktur? (D)

Tanyakan pada menpora apakah mereka perlu atau tidak, nanti kalau saya bilang perlu nanti dia bilang kita buat sendiri...karena pertanyaannya ke menpora.

Kalau dari segi struktur birokrasi, disini memungkinkan hal itu, kebijakan tersebut bisa di..., mungkin ada fungsi2 koordinasi, dalam struktur birokrasi, memungkinkan tidak, dari SOPnya? (D)

Di kemenkokesra, seluruh hal yang berkaitan dengan pemuda bisa kita koordinasikan dan sinkronasikan kalau dipandang perlu, apalagi apabila di kemenpora atau instansi lain terdapat overlap persoalan di bidang pemuda akan cepat kita angkat, kita koordinasikan, kita cari solusi yang terbaik, yang jelas kantor kemenkokesra siap untuk mengkoordinasikan berbagai hal di bidang pemuda, peluangnya ada, jelas, kita selalu stand by, siap.

Masukan lain? (D)

Sosialisasi harus ada semacam keputusan atau inpres atau PP atau mainstream yang jelas. Kalau sudah ada sesuatu hal yang jelas bisa kita angkat. Tapi sepanjang itu masih berupa konsep harus dimatangkan dulu

Ini kelihatannya masih panjang, disusun dulu, apakah perlu dibuat tim atau tidak, silahkan saja, kemudian apakah perlu dirapatkan, kalau sudah ada gambaran perlu diangkat menjadi inpres atau perpres, perlu atau tidak. Kita akan dukng semua, akan kita fasilitasi.

Faktor penghambat yang kemungkinan akan dihadapi (D)

Sebenarnya dikatakan ego sektor juga tidak, kalau diperhatikan selama ini, Cuma yang mengajak tidak ada, penggeraknya tidak ada, makanya kita perlu suatu macam Sekber Sekretariat bersama, sehingga bila buat kegiatan pemuda, tidak harus berkantor disana, cukup dgn internet, ada sekretariat bersama sehingga bisa komunikasi. Yang duduk disitu betul2 orang yg menangani itu. Jadi orangnya jelas tidak berganti2. Kalau pokja kecil, ini lebih luas, sehingga semacam jaringan bisa komunikasi dan informasi, tidak sendiri-sendiri.

Kemarin sudah bagus itu membicarakan soal RAN, koordinasi, saling memberikan informasi. Yang penting mereka misalnya punya aksi apa, jamboree

pemuda, tanggal berapa. Kita bisa partisipasi hadir/pasif atau mereka bisa mengirim pemuda.

Faktor pendukung agar bisa terimplementasi, adanya komitmen, yg lbh konkrit? (D)

Komitmen bersama yang lebih penting

Faktor kunci keberhasilan? (D)

Kuncinya adalah tenaga perencanaan penting, karena perencanaan akan dilaksanakan setahun kemudian, atau 5 tahun kemudian. Kalau perencanaan benar, ditambah tenaga teknis mengerti apa perencanaan grand desain itu maka sasarannya akan benar. Tapi kalau perencanaan salah maka sasarannya tidak akan kena juga. Oleh karena itu diperlukan tenaga perencanaan yang benar, dan disesuaikan juga dengan kemampuan pemerintah, dari sisi pemerintah, dalam hal ini porsi anggaran yang sudah disiapkan juga diarahkan ke sana, jadi tidak masing2. Perencanaan pemuda harus benar2 melibatkan pemuda, aspirasi pemuda harus kita serap, kita sinkronkan dan padukan secara komprehensif.

Masukan tambahan yg perlu ditekankan? (D)

Tambahan factor kuncinya komitmen, baik dari perencanaan maupun sampai instansinya. Komitmen juga termasuk Bappenas dalam menyusun RPJM, bappenas juga memberikan guidance atau rambu2. Oleh sebab itu saran saya segera kerjakan ini, panduan atau grand desainnya baru nanti kita lihat ini berhasil atau tidak. Makanya kita lihat apakah ini perlu inpres, kuncinya adalah komitmen, apabila sudah punya komitmen yang tinggi pasti akan jalan. Juga dorongan dari pemuda itu sendiri, mereka itu kan selain jadi objek juga subjek. Mereka yang didepan. Sekarang mereka sebagai subjeknya.

Syah Djohan

Kepala Seksi Karang Taruna, Kementerian Sosial RI

Tanggal wawancara: 13 Juni 2011

Bagaimana pembangunan kepemudaan menurut Bapak sekarang ini? (D)

Pembangunan kepemudaan dimulai dari karang taruna. KT itu agen pembangunan, motor penggerak pembangunan desa kelurahan adalah karang taruna.

Jadi perannya dalam menunjang pembangunan nasional menjadi strategis? (D)

Menurut saya paling strategis karang taruna, karena ia tidak berpolitik. Karena dia bergerak di bidang kesejahteraan sosial, amal saja. Berlatih bagaimana ia menjaga dirinya karena ia kan potensi, sempurna, Mereka harus saling menjaga, yang pintar mengajari yg bodoh, mengadakan pelatihan, membuka jaringan.

Masalah utama dalam pembangunan kepemudaan (D)

Kalau saya, satu mereka menganggap bhw mereka bukan potensi yang diandalkan. Karena dia tidak bisa melepaskan ikantannya dengan orangtua. Seharusnya mandiri. Dari awal tidak diajarkan mencari uang sendiri, karena dia mengandalkan ortunya. Jadi kemandirian itu jauh.

Jadi di kemensos ini kegiatan2 kepemudaan pasti memerlukan pihak2 lain(D)
 Segala sesuatu tidak bisa dikerjakan sendiri, makanya kita itu dibagi per sektor2. Pertanyaannya mengapa tidak bisa kerja sendiri, karena memang UUnya mengatur begitu, kalau Kemensos semua, maka tidak akan sanggup mengerjakannya,

Kalau selama ini dgn kementerian apa saja(D)
 Dulu tenaga kerja, transmigrasi, sekarang UKM, kemendagri, kami sering komunikasi. Kemenpora, juga jangan sampai kalau sudah masuk karang taruna tidak mau lagi masuk pemuda. Bedanya kalau kami pembinaan UKSnya, kalau Kemenpora pembinaan dirinya secara mental spiritual, bagaimana berbangsa bernegara. Kalau kita bukan, bagaimana orang susah jadi orang senang. Tapi bgmn juga orang senang jangan sampai jadi orang susah.

Bagaimana bentuk2 kerjasamanya selama ini(D)
 Peraturannya UU no 11 tentang kesejahteraan social, mencakup semua, kaitannya dengan UU 11 ini banyak departemen2 dan kementerian2 yang disebutkan didalamnya. Jadi bukan tumpang tindih, tapi kita ambil bagian kita masing2.

Kalau untuk pembangunan kepemudaan?(D)
 Di karang taruna, khusus kepemudaannya.

Menurut Bapak siapa seharusnya penggerak pembangunan kepemudaan?(D)
 Harus bersama2, semua harus bersama2, karena karang taruna agen pembangunan.

Sampai sejauh ini sinergi harmonisasi dengan kementerian lain(D)
 Karang taruna ini sebenarnya sudah dikenal lama, tetapi unit2 teknis Pembina karang taruna banyak. Instansi pemerintah unit teknis namanya. Pertanian, terikat dengan pertanian, secara teknis tapi, kesehatana, pembinanya kemenkes, program2 memanfaatkan karang taruna. Seluruh instansi terkait maupun orang per orang boleh sebagai donatur.

Pendapat bapak selama ini koordinasi antar kementerian seperti apa, apakah sudah cukup?(D)
 Iya, perlu diperlihara dan ditingkatkan, tidak bisa kerja sendiri. Harus kerjasama.

Bagaimana agar tiap sektor itu mau, apakah harus ada aturan yang mengikat?(D)

Kalau MoU itu sementara, antara dua kementrian.
 Karena tiap kementrian punya UU berbeda2 kita perlu MoU agar tiap sektor mengerjakan tugasnya bersama2 sesuai dengan tujuan. Misalnya 17 agustusan, yang terlibat tidak semua, menpora leading sektornya, mendikans melibatkan anak2 sekolah. Yang melibatkan madrasah2 kementrian agama. Pasti melibatkan penanggungjawab2 leading sektornya.

Strategi agar koordinasi bisa berjalan dengan baik(D),

Kami sifatnya kebersamaan, kami sebenarnya penunjang, bukan pokok. Karena kamisebenarnya berkaitan dengan yang lain.. Permasalahan social timbul bukan karena satu, misalnya orang menganggur, dari Kementrian tenaga kerja, orang sakit kemenkes, kami dapat imbasnya dari berbagai macam hal perbuatan yg terjadi.

Sosialisasi, komunikasi seperti apa(D)

Program itu disinkronisasikan saja, kalau kita butuh pelatihan, misalnya kesehatan minimal narasumber dari Kemenkes. Atau butuh di desa itu ya usaha sendiri di desa itu. Misalnya ikut di puskesmas, supaya jadi tahu juga.

Dari sisi SDM, dana, fasilitas bgmn agar koordinasi bisa berjalan bagaimana?(D)

Cukup, pusat pelatihan punya, STKS ada di Bandung
Fasilitas cukup. Dana anggarannya APBN, tergantung APBN, PMKS banyak atau tidak, misalnya untuk bencana alam dari cadangan. Pelatihan2 dari APBN

Dari sisi informasi?(D)

Informasi kita kuat, ada media2, khusus KT ada media KT

Sikap Bapak bgmn mendukung harmonisasi?(D)

Itu yang diharapkan, selama ini kalo bisa bersama2 walaupun baju mereka lain. Bagaimana sasarannya sama, jadi bergerak bersama secara berstruktur.

Dari SOP dalam melakukan koordinasi dgn pihak lain(D)

Kalau sifatnya nasional, langsung menteri ke menteri, kalau sifatnya tidak nasional pak dirjen bisa. Antar subdit juga bisa. Secara prosedur bisa.

Kendala?(D)

Jadwal masing2 sering tidak bareng. Misalnya bulannya berbeda dalam melaksanakan kegiatan. Seharusnya enaknya komunikasikan dari anggaran., ambil jadwalnya dari anggaran. Itu kalau banyak instansi,tapi kalau Cuma 2 instansi agak mudah

Faktor kunci keberhasilan? (D)

Kuatkan program, mantapkan program, dibahas, dilaksanakan. Pendukungnya dana, SDM, tapi kadang2 SDm juga sulit diajak.

Strategi pengarusutamaan pemuda sudah dengar?

Masih wacana saja ya? Belum action.